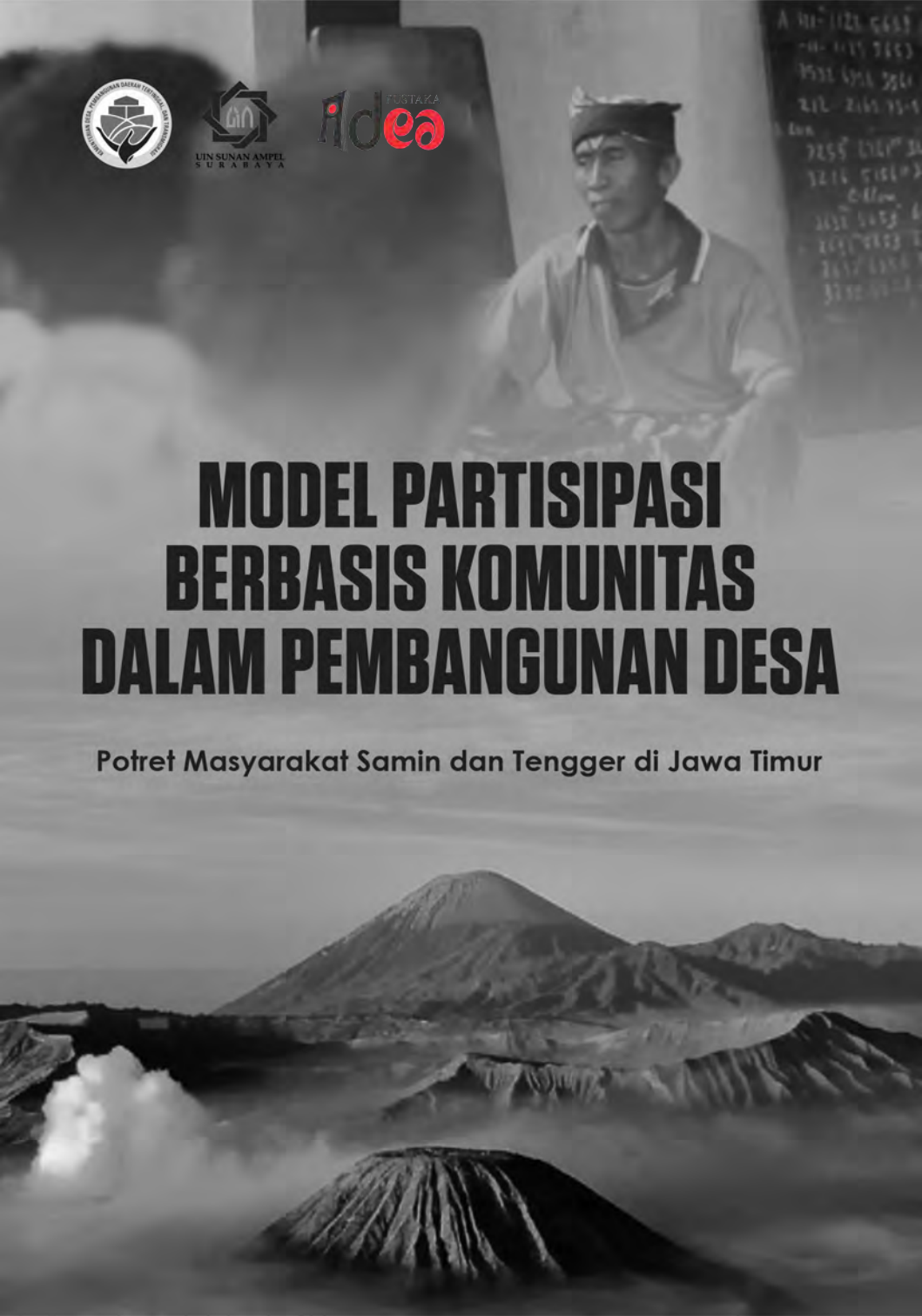

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

PUSTAKA idea

MODEL PARTISIPASI BERBASIS KOMUNITAS DALAM PEMBANGUNAN DESA

Potret Masyarakat Samin dan Tengger di Jawa Timur

MODEL PARTISIPASI BERBASIS KOMUNITAS DALAM PEMBANGUNAN DESA

Potret Masyarakat Samin dan Tengger di Jawa Timur

Penyusun	:	Moh. Syaeful Bahar, Aniek Nurhayati, Sulanam, Muhammad Nuril Huda, Wasid dan Hasan Mahfudh
Penyunting Ahli	:	Khoirun Niam, Abd. Basyid, Abd. Halim, Rubaidi, Ali Arifin dan Ali Mustofa
Cover & Tata Letak	:	Ismail Amrullah

Copyright©2022

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang

Diterbitkan oleh Pustaka Idea

Jln Bendulmerisi Gg. Sawah 2-A Surabaya

Hp. 0818319175

Bekerjasama dengan Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

dan UIN Sunan Ampel Surabaya

xxii + 281 hlm, 14x20 cm

Cetakan Pertama, Februari 2022

ISBN 978-602-6678-21-8

Kata Pengantar

PENYUSUN

Salah satu piranti dasar dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan desa adalah tersedianya informasi yang akurat dan relevan guna menopang kebijakan-kebijakan strategis. Kebutuhan informasi dalam kerangka pembangunan desa tentu tak sebatas kumpulan data numerik yang rutin tersusun tiap tahun, tetapi juga data substatif tentang dinamika kehidupan masyarakat pedesaan. Selama ini kita bisa melihat beragam nilai budaya telah tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat, hal tersebut merupakan wujud kearifan lokal yang mestinya bisa menjadi modal penting dalam pembangunan pada level pedesaan.

Buku ini mencoba untuk menyajikan ruang diskusi seputar dinamika kehidupan komunitas, serta urgensinya

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

dalam membantu proses pembangunan desa. Melalui proses riset dengan pendekatan etnografis, penulis berusaha menggali berbagai gejala sosial di tengah komunitas Samin dan suku Tengger. Kedua komunitas ditilik dari sudut tata kehidupan, nilai dan ajaran, perubahan sistem sosial, hingga kontribusinya dalam pembangunan desa. Pada sisi berbeda, penulis juga mengidentifikasi beberapa model dukungan yang bisa diberikan oleh pemerintah guna merawat nilai dan ajaran leluhur komunitas agar tetap lestari.

Kajian terkait partisipasi komunitas dalam pembangunan desa pada masyarakat Samin dan Tengger ini diulas secara serial dalam lima bab. Bagian pertama dimulai dengan alasan pentingnya penulisan buku, dilanjutkan tinjauan teoretik seputar pembangunan desa dan pertisipasi masyarakat pada bagian kedua. Potret kehidupan komunitas Samin dan suku Tengger disajikan pada bagian ketiga. Bagian Keempat memaparkan model pembangunan desa yang menekankan adanya kontribusi timbal balik antara partisipasi komunitas dengan dukungan pemerintah. Bagian akhir buku ditutup dengan refleksi dan rekomendasi sebagai pijakan dalam upaya pembangunan desa secara berkelanjutan.

Hadirnya buku ini juga sebagai refleksi akan pentingnya sinergi antar simpul pemberdayaan masyarakat, yakni pemerintah, perguruan tinggi, dan komunitas. Kerjasama antara Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi dengan UIN Sunan Ampel Surabaya menunjukkan perhatian besar dari pemerintah akan pentingnya kajian akademis sebagai

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

rujukan dalam pembacaan fenomena masyarakat sekaligus bahan penyusunan kebijakan pembangunan desa. Penulis berharap, buku ini dapat menjadi sumber informasi dan referensi, baik oleh pemeritah maupun kelompok NGO dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa. Terima kasih tak terhingga atas dukungan semua pihak dalam penulisan buku ini, tak lupa kritik dan saran sangat kami harapkan demi perbaikan buku ke depan. Semoga dengan terbitnya buku ini membawa keberkahan dan manfaat bagi semua. Aamiin.

repo uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

Kata Pengantar

Dr. (HC) Drs. H. Abdul Halim Iskandar, M.Pd

(MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI)

Pembangunan desa merupakan pilar penting dalam pembangunan nasional. Jika desa dapat berdaya, mandiri, serta mampu membangkitkan potensi lokal mereka untuk kepentingan kesejahteraan masyarakatnya, maka desa tersebut sejatinya telah membantu percepatan pembangunan nasional secara keseluruhan. Hal itu tidak berlebihan sebab 91% kewilayahan Indonesia merupakan wilayah desa. Guna memenuhi kebutuhan pembangunan desa, pemerintah terus mengupayakan terobosan baru dalam pembangunan desa yang komprehensif. Keberhasilan membangun saja tidaklah cukup, sebab selanjutnya hasil-hasil pembangunan itu diharapkan dapat memberi manfaat langsung bagi masyarakat desa. Untuk itu pemerintah berikhtiar agar hasil-hasil

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

pembangunan yang ada di desa, selain bermanfaat juga dapat lestari dan dilestarikan, serta dapat selalu dirawat dengan baik oleh masyarakatnya.

Kerangka di atas sejatinya berakar pada pentingnya penguatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa (SDGs Desa), yang meniscayakan adanya penjagaan terhadap potensi-potensi lokal desa agar tidak tercerabut. Untuk itu, dalam SDGs Desa ke-18, kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif ditambahkan sebagai jangkar yang memungkinkan desa dapat mengolah potensi lokal mereka dan tetap dapat berkembang secara dinamis sesuai dengan cita-cita kemajuan nasional. Poin ke-18 ini meniscayakan adanya penelusuran dan penemukenalan potensi-potensi lokal yang beragam di seluruh Indonesia: antara satu potensi dengan potensi lain tidak perlu seragam, sebab hal itu akan menggerus kekhasan masing-masing desa.

Guna mencapai hal di atas, partisipasi lokal dalam pembangunan desa dibutuhkan agar hasil-hasil pembangunan yang digagas bersama antara pemerintah (baik lokal, regional, maupun nasional) dengan masyarakat sebagai pemilik wilayah desa mereka dapat berjalan beriringan dan tidak kontraproduktif. Kesatupaduan kedua entitas ini jika tidak dapat saling memahami akan menjadi kendala tersendiri bagi pembangunan dan pemajuan desa itu. Oleh karena itu, pembangunan desa yang mengedepankan partisipasi masyarakat, penjagaan hasil-hasilnya dapat lebih baik ketimbang pembangunan desa yang menegasikan partisipasi masyarakat.

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

Penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa perlu terus ditingkatkan, hal itu untuk menemukan model terbaik yang berakar dan tumbuh dari dalam desa itu sendiri. Partisipasi masyarakat ini setidaknya akan bersinggungan secara dinamis dengan pengambil kebijakan di tingkat desa, dan karenanya juga akan menghasilkan pola atau model baru yang khas terbangun dari dalam desa itu sendiri. Mengingat prosesnya yang dinamis tersebut, model partisipasi, kesadaran, keguyuban, dan kegotongroyongan yang ditampilkan oleh masyarakat pada suatu desa, tidak dapat digeneralisasi begitu saja, sebab selalu ada hal kunci yang menjadi pemantik atas partisipasi mereka dalam pembangunan desa.

Kajian yang dilakukan oleh UIN Sunan Ampel Surabaya ini memberi gambaran bahwa partisipasi yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat (baca: komunitas) sejatinya adalah gambaran betapa desa-desa di Indonesia memiliki kekhasan tersendiri. Kekhasan itu selanjutnya juga berimplikasi pada pentingnya melakukan penguatan pada aspek tertentu, yang selanjutnya dapat memantik munculnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Desa dengan komunitas adat sebagaimana dalam kajian ini, setidaknya secara garis besar memiliki kekuatan yang sama, yaitu kesadaran menjaga keseimbangan alam. Kesadaran ini selaras dengan kearifan lokal yang selalu muncul di desa secara turun temurun: jika kamu menjaga alam, alam akan menjagamu.

repo uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

Terimakasih atas partisipasi UIN Sunan Ampel Surabaya ini yang sudah memberi perspektif lain dalam melihat pembangunan desa. Penjelasn-penjelasan yang ada dalam buku ini seyogyanya juga menjadi bagian yang melengkapi dan menjadi salah satu bahan pendukung untuk pengambilan kebijakan dalam pembangunan desa di Indonesia. Kementerian Desa PDTT akan terus mengupayakan yang terbaik bagi percepatan pembangunan desa dengan tetap memperhatikan dan melestarikan nilai-nilai setempat.

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

Kata Pengantar

Prof. Masdar Hilmy, S.Ag., M.Ag., Ph.D

(REKTOR UIN SUNAN AMPEL SURABAYA)

Perguruan tinggi memikul tanggungjawab untuk turut hadir dan berkontribusi secara nyata dalam pembangunan nasional. Melalui peran tri dharma perguruan tinggi, UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan salah satu misinya yaitu mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset. Karena itulah, kampus ini juga memperkuat pola pengabdian masyarakat dengan pendekatan university-community engagement. Berbagai terobosan dilakukan oleh kampus ini dengan memperkaya pendekatan dalam pengabdian masyarakat, seperti participaroty action research (PAR), community based research (CBR), community based participatory research (CBPR), assets based community driven development (ABCD),

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

dan berbagai pendekatan lain dalam pemberdayaan masyarakat.

Dengan berbekal ragam pendekatan pemberdayaan masyarakat di atas, UIN Sunan Ampel Surabaya memandang pentingnya berkontribusi dalam pembangunan nasional yang memiliki kekhasan dan sentuhan keagamaan. Proses pemberdayaan yang dilakukan tak lain agar masyarakat dapat secara sadar turut membangun lingkungannya dan menjadikan proses-proses pembangunan yang ada di lingkungan itu bernilai guna dalam kurun waktu yang lama. Atas dasar itu, perlu dikembangkan model pemberdayaan dan pembangunan masyarakat yang mengakar dan tumbuh seiring dengan perkembangan masyarakat. Hal itu untuk suatu tujuan agar apa yang telah dihasilkan dapat dilestarikan dan dimiliki secara penuh oleh masyarakat.

Pelestarian hasil menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan berkelanjutan. Hal itu tidaklah berlebihan, sebab hasil-hasil yang hanya dapat dirasakan dalam waktu pendek, umumnya keterlibatan dalam pelestarian hasil itu tidak berjalan maksimal. Pelestarian hasil juga bermanfaat bagi masyarakat dan pengampu kebijakan. Bagi masyarakat, hasil-hasil pembangunan agar dapat dirasakan dalam waktu yang lama tentu juga butuh perawatan bersama oleh masyarakat. Bagi pengampu kebijakan, hasil-hasil yang lestari, berarti juga memberi peluang baginya untuk memperluas pembangunan masyarakat dan tidak terjebak pada perbaikan-perbaikan (renovasi, rehabilitasi). Guna

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

menggapai kemanfaatan yang optimal itu, diperlukan kesadaran untuk menjaga dan merawat hasil-hasil tersebut.

Kesadaran yang baik di lingkungan masyarakat dalam pembangunan meniscayakan pentingnya partisipasi mereka dalam pembangunan secara berkelanjutan. Harus disadari bahwa pembangunan yang tidak dirawat dengan baik hanya akan sia-sia dan tidak berguna bagi pemajuan masyarakat itu sendiri. Karenanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan juga dibutuhkan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelestarian hasil-hasil pembangunan tersebut. Kunci dari partisipasi ini adalah tumbuhnya kesadaran pada diri mereka untuk turut berkontribusi secara nyata pada kemajuan lingkungannya.

Kehadiran kajian yang dilakukan oleh gugus tugas di bawah kendali LP2M UIN Sunan Ampel Surabaya ini mencoba memberi tawaran tentang model partisipasi yang dilakukan oleh kelompok dengan karakter dan tradisi kultural tertentu. Kelompok ini, atau dalam kajian ini disebut sebagai komunitas, sejatinya merupakan modal sosial yang dengan kekuatannya dapat berkontribusi secara nyata dalam pembangunan masyarakat. Kekuatan kelompok demikian ini ada pada kepatuhannya menjalani kehidupan dengan berpegang teguh pada nilai-nilai kultural yang telah mereka warisi secara turun temurun. Melalui nilai itu pula, mereka berupaya membangun dan menjaga kehidupannya secara arif.

Atas terselenggaranya kajian ini, UIN Sunan Ampel Surabaya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya

repo uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

kepada Kementerian Desa PDTT yang telah mempercayakan penyusunan kajian ini. Meski kajian ini telah disiapkan dengan baik, kami sadar bahwa pembacaan atas hasil kajian ini dalam perspektif yang luas, juga akan didapati kekurangan-kekurangan. Namun demikian, kekurangan itu tentu harus dianggap sebagai tantangan untuk melakukan perbaikan di masa yang akan datang.

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Pengantar Penyusun iii
Pengantar Dr. (HC) Drs. H. Abdul Halim Iskandar, M.Pd (Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi) vii
Pengantar Prof. Masdar Hilmy, S.Ag., M.Ag., Ph.D (Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya) xiii
Daftar Isi xix

BAB I: MENGAPA PARTISIPASI BERBASIS KOMUNITAS 1
A. Kebijakan Pembangunan Desa 2
B. Komunitas Samin dan Suku Tengger Sebagai Situs Kajian 18
C. Etnografi sebagai Pendekatan 31

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

D. Peran Perguruan Tinggi dalam Pemberdayaan Masyarakat 41

BAB II : PEMBANGUNAN DESA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT 43

A. Pembangunan, Pemberdayaan dan Partisipasi .. 44

B. Partisipasi dan Desentralisasi 62

C. Lingkup, Level dan Indikator Partisipasi 72

BAB III : TATA KEHIDUPAN MASYARAKAT PEDESAAN 97

A. KOMUNITAS SAMIN 98

1. Asal Usul Komunitas Samin 98
2. Sistem Keyakinan/Kepercayaan Komunitas Samin 109
3. Sistem Sosial dan Ekonomi Komunitas Samin 121
4. Dinamika Sosial Komunitas Samin 133

B. SUKU TENGGER 138

1. Asal Usul Suku Tengger 138
2. Sistem Keyakinan/Kepercayaan Suku Tengger 149
3. Sistem Sosial dan Ekonomi Suku Tengger 172
4. Dinamika Sosial Suku Tengger 193

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

BAB IV : MODEL PARTISIPASI KOMUNITAS DALAM PEMBANGUNAN DESA 201
A. Dari Komunitas untuk Desa 202
1. Peran Komunitas Samin-Tengger dalam Pembangunan Desa 202
2. Bentuk Partisipasi Komunitas Samin-Tengger dalam Pembangunan Desa 216
B. Dari Desa untuk Komunitas 226
1. Dukungan Pemerintah untuk Pemberdayaan Komunitas 226
2. Institusionalisasi Nilai untuk Keberlangsungan Komunitas 234

BAB V: REFLEKSI & REKOMENDASI 245
A. Refleksi Kebijakan 246
B. Rekomendasi 254

DAFTAR PUSTAKA 257
LAMPIRAN 271

repo uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

BAB I

Mengapa Partisipasi Berbasis Komunitas

A. Kebijakan Pembangunan Desa

Indonesia adalah negara dengan wilayah mayoritas pedesaan. Karenanya Ketika membicarakan tentang kemiskinan, studi kemiskinan di desa terus menjadi wacana yang diperbincangkan dengan aksi yang jauh dari yang dibutuhkan. Media Indonesia, Senin 8 November 2021 memberitakan bahwa Survei Ekonomi pada September 2020 yang dilakukan oleh BPS menunjukkan bahwa penambahan penduduk miskin lebih dalam di wilayah pedesaan.

Pada September 2019, presentase penduduk miskin di perkotaan sebesar 6,56 persen, naik menjadi 7,38 persen pada Maret 2020 yaitu dari 9,86 juta orang menjadi 11,16 juta orang sehingga pertambahan penduduk

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

miskin sejumlah 1,3 juta orang. Sedangkan di daerah perdesaan, presentase penduduk miskin pada September 2019 yaitu sebesar 12,60 persen naik menjadi 12,82 persen pada Maret 2020, penduduk miskin di daerah pedesaan naik sebanyak 333,9 ribu orang yaitu dari 14,93 juta orang pada September 2019 menjadi 15,26 juta pada Maret 2020. [1] Sehingga presentase jumlah penduduk miskin Indonesia di perkotaan yaitu sejumlah 7,38 persen dan di perdesaan sejumlah 12,82 persen.[2]

Kemiskinan yang banyak terjadi di pedesaan merupakan hal yang lazim di dunia. Menurut data World Bank, di sekitar 89 negara berkembang, 80 persen penduduk yang sangat miskin tinggal di daerah pedesaan. Survey ini didapatkan dari sampel 89 negara sedangkan data penduduk miskin secara global dikutip dari *Food and Agriculture Organization of The United Nation,* sekitar 1,45 miliar orang diidentifikasi sebagai penduduk miskin dengan presentase 26,5 persen dari 104 negara yang di survey. Bahkan setengah dari hasil survey tersebut yaitu sejumlah 706 juta orang diidentifikasi sebagai sangat miskin karena kekurangan parah yang mereka alami. Hal ini terjadi di beberapa negara seperti

1 https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1744/persentase-penduduk-miskin-maret-2020-naik-menjadi-9-78-persen.html. Diakses pada 5 November 2021, 08.00.

2 Profil Kemiskinan Di Indonesia Maret 2020, Berita Resmi Statistik No. 56/07/Th. Xxiii, 15 Juli 2020, https://www.bps.go.id. Diakses pada 4 November 2021, 09.00.

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

Chad, Ethiopia, Gambia, Mauritania, Niger, Pakistan, Sudan dan Sudan Selatan.[3]

Fakta bahwa kemiskinan di desa lebih dalam juga menjadi studi di Amerika Latin yang dilakukan oleh Lopez dan Vades[4] bahwa hampir semua studi empiris yang tersedia tentang kemiskinan terfokus pada sektor perkotaan meskipun faktanya di sebagian besar negara berkembang kemiskinan (dan masih) jauh lebih luas dan lebih dalam di daerah pedesaan. Selain itu, analisis dan kebijakan untuk kemiskinan pedesaan kemungkinan besar akan berbeda dari analisis dan kebijakan untuk kemiskinan perkotaan, yang sebagian besar karena dua alasan: *pertama*, tidak seperti kasus daerah perkotaan, sebagian besar penduduk miskin pedesaan adalah produsen wiraswasta; *kedua,* tingkat ketidaklengkapan pasar adalah jauh lebih luas di pedesaan daripada di perkotaan. Dengan demikian analisis masyarakat miskin pedesaan secara eksplisit mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas rumah tangga sebagai pengusaha kecil dan sebagai unit produksi. Selain itu, dampak ketidakcukupan pasar terhadap rumah tangga sebagai produsen dan konsumen harus

3 Ana Paula De La O Campos et al, *Ending Extreme Poverty In Rural Areas: Sustaining Livelihoods To Leave No One Behind*, (Rome: Food And Agriculture Organization Of The United Nations, 2018), 4-5.

4 Ramon Lopez, Et Al. Preface at *Rural Poverty in Latin America*. (London: Macmillan, 2000), Vii.

repo uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

memainkan peran yang lebih sentral dalam konteks pedesaan daripada di perkotaan.

Secara tegas, Brandt dan Otzen[5] menyatakan bahwa untuk generasi berikutnya, pengurangan kemiskinan akan dicapai terutama melalui pembangunan pertanian dan pedesaan, karena sekitar 80 persen orang miskin di dunia tinggal di daerah pedesaan. Pertanian dan daerah pedesaan akan dapat berkembang secara memuaskan hanya jika kontribusi yang dibuat oleh pemerintah pusat dan daerah serta sektor swasta dirancang sedemikian rupa agar efektif secara kelembagaan dan organisasi. Kerangka kebijakan pertanian memastikan bahwa orang miskin memiliki akses ke sumber daya dan ada insentif yang cukup untuk menjadi produktif dan inovatif dalam lingkungan yang positif dan memiliki kerangka aturan pasar pertanian dunia dan pertanian internasional. Pemeriksaan pengalaman konseptual dalam beberapa dekade terakhir dan temuan analisis *cross-section* kuantitatif baru-baru ini memperjelas bahwa pengurangan kemiskinan membutuhkan langkah-langkah pembangunan pertanian dan pedesaan oleh pusat dan pemerintah daerah dan sektor swasta dan lingkungan kebijakan pertanian yang sesuai.

Indonesia yang mayoritas penduduknya tinggal di pedesaan, telah menyadari pentingnya membangun desa secara lebih terencana dan berkelanjutan (*sustainable)* dalam

5 Brandt Hartmut, et al. *Poverty Oriented Agricultural and Rural Development*. (London: Routledge, 2007), Xx-Xxi.

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kementerian Desa dirancang untuk mengatasi beberapa problema pedesaan yang lebih besar daripada kota, mulai dari kemiskinan yang lebih tinggi, kesehatan yang rendah, konsumsi masyarakat rendah, SDM rendah, sarana dan prasarana yang lebih sulit.

Sejak 2014, Presiden Jokowi mencanangkan agenda yang dikenal dengan nama *Nawa Cita* (Sembilan Agenda). Agenda tersebut yaitu "membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah desa dalam kerangka negara kesatuan".[6] Adanya citra buruk pedesaan yang diidentikkan dengan kemiskinan ini yang ingin dihapus oleh pemerinta, sehingga mulai tahun 2015, secara bertahap pemerintah menjalankan program sesuai yang tertera UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini menjadi tonggak perubahan dan pembangunan desa, sehingga desa dapat ditempatkan menjadi subyek dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.[7]

Melalui pembangunan berkelanjutan, aspek pembangunan bukan hanya mengarah pada masyarakat masa kini melainkan juga masyarakat di masa depan. Pembangunan berkelanjutan idealnya dapat mencakup berbagai aspek yang ada di masyarakat juga masyarakat desa. Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 78 (1), pembangunan desa, yaitu peningkatan pelayanan dasar, pembangunan dan

6 https://setkab.go.id/membangun-indonesia-dari-pinggiran-desa/, Diakses pada 4 November 2021, 15.00.

7 Ibid.

repo uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan, pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif, pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna, dan peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat desa.

Oleh karena itu, pada tahun 2015 pemerintah mulai menggelontorkan dana desa yaitu sejumlah 20,67 triliun. Kemudian pada 2016, dana desa mencapai Rp 46,98 triliun dan sejumlah Rp 60 triliun pada 2017 dan 2018 serta pada tahun 2019 sekitar 70 triliun.[8] Presiden Jokowi dalam acara "Sosialisasi Prioritas Penggunaan Dana Desa 2019 dan Evaluasi Kebijakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Banten" mengemukakan bahwa desa diberi perhatian yang sangat besar dengan adanya dana desa yang digelontorkaan tiap tahunnya. Presiden juga menyebutkan bahwa banyak infrastruktur yang telah dibangun, namun diharapkan dana desa juga akan digunakan untuk pemberdayaan ekonomi dan inovasi sehingga bukan hanya berkonsentrasi pada infrastuktur saja.[9]

Dalam perkembangannya, UU desa tersebut dianggap cukup berhasil di salah satu sisi seperti pembangunan infrastruktur desa, namun di sisi lain memberi permasalahan tersendiri bagi desa yaitu, *pertama*, kapasitas pemerintahan desa masih terbatas. *Kedua,* pengelolaan dana desa yang

8 https://kemendesa.go.id. Diakses pada 4 November 2021, 15.00.

9 https://www.beritasatu.com/nasional/520481/jokowi-tegaskan-pemerintah-beri-perhatian-besar untuk-desa. Diakses pada 4 November 2021, 15.00.

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

belum optimal dalam menurunkan tingkat kemiskinan. *Ketiga,* pembanguan yang dilakukan belum signifikan dan menyisakan banyak desa dengan status desa tertingal.[10]

Dian Herdiana menyebutkan bahwa UU Desa dalam realitasnya belum mampu mewujudkan tujuan pembangunan yang maksimal. Bahkan dalam pembangunan secara lokal-partisipatif, substansi UU Desa belum memberikan kewenangan sepenuhnya kepada desa. UU desa masih memberikan peluang kepada pemerintah daerah, yang mengakibatkan terjadinya distraksi terhadap kewenangan pembangunan desa yang seharusnya dijalankan penuh oleh pemerintahan desa.[11]

Beberapa pasal dalam UU Desa tersebut dianggap telah mendistorsi kewenangan desa dan kontradiktif terhadap UU tersebut. Hal-hal lainnya yang perlu digaris bawahi yaitu *pertama* pelimpahan wewenang kepada pemerintahan desa untuk melaksanakan pembangunannya sendiri ternyata masih nihil, karena desa masih harus mendapatkan persetujuan dari bupati/walikota dalam penetapan kebijakan pembangunan desa sehingga desa masih disibukkan dengan urusan administratif. *Kedua,* homogenisasi karakteristik dan kapasitas desa, sehingga pembangunan yang seragam akan berdampak pada desa maju dan mandiri tetapi tidak menghasilkan keberhasilan bagi desa yang tertinggal. *Ketiga,*

---

10 Dian Herdiana, "Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perihal Pembangunan Desa", *Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 50 No. 1*, (2020), 252.

11 Ibid, 245.

repo uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

distorsi peran masyarakat sebagai subjek pembangunan desa. Masyarakat desa sebagai subjek pembangunan tidak dilibatkan dalam keseluruhan proses pembangunan desa serta dalam evaluasi pembangunan dan penilaian atas program yang telah dilaksanakan. *Keempat,* pembangunan desa lebih didominasi oleh kepala desa sebagai pemimpin tertinggi di desa sehingga peran pemangku kepentingan lainnya menjadi minim. Hal tersebut bertentangan dengan UU Desa yang harus diselenggarakan secara transparan, akuntabel dan partisipatif.[12]

Karenanya, Kementerian Pedesaan kemudian mencanangkan Pembangunan berkelanjutan di desa saat ini menerapkan prinsip-prinsip SDGs (*Sustainable Development Goals*) Desa. SDGs Desa sendiri merupakan program turunan dari SDGs yang dikeluarkan oleh PBB, yang memiliki 17 tujuan atau *goals*. 17 goals tersebut adalah

> "Eliminate Poverty; Erase Hunger; Establish Good Health and Well-Being; Provide Quality; Education; Enforce Gender Equality; Improve Clean Water and Sanitation; Grow Affordable and Clean Energy; Create Decent Work and Economic Growth; Increase Industry, Innovation, and Infrastructure; Reduce Inequality; Mobilize Sustainable Cities and Communities; Influence Responsible Consumption

12 Ibid, 249.

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

and Production; Organize Climate Action; Develop Life Below Water; Advance Life On Land; Guarantee Peace, Justice, and Strong Institutions; Build Partnerships for the Goals;".[13]

Oleh karena itu pembangunan yang menerapkan SDGs Desa, dapat membantu pencapaian pembangunan nasional berkelanjutan sesuai dengan Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Terdapat pula di sini desa percontohan yang telah memberdayakan ekonomi masyarakat.[14]

Indonesia melakukan pelokalan SDGs yang hal ini sangat mungkin dilakukan, bahkan sejak awal publikasinya, PBB telah membuka peluang ini. Hal ini dimaksudkan justru untuk mempercepat pencapaian target tahun 2030. Indonesia melokalkan SDGs global ke dalam SDGs Nasional. Di Indonesia, hal ini kemudian dituangkan dalam Perpres 59/2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). TPB dilokalkan, kemudian dilokalkan ke level provinsi dan kabupaten. Selanjutnya, pelokalan juga diarahkan pada kelompok-kelompok tertentu, seperti SDGs untuk swasta Sebagaimana tertuang di laman Kemendes,[15] upaya pelokalan meliputi:

---

13 https://www.un.org/sustainabledevelopment/news/communications-material/, Diakses pada 9 November 2021, 08.00.

14 https://www.masterplandesa.com/penataan-desa/pentingnya-pembangunan-desa, Diakses pada 9 November 2021, 08.00.

15 https://sdgsdesa.kemendesa.go.id/dari-tpb-ke-sdgs-desa/, diakses

repo uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

"1) Pelokalan diresmikan dalam suatu kebijakan pemerintah, baik pada level nasional maupun daerah. 2) Pelokalan rumusan tujuan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Ini untuk mendekatkan SDGs dengan perkembangan budaya masyarakat setempat. 3) Penambahan indikator pencapaian, berupa indikator lokal. Pada dasarnya indikator disusun untuk bisa dibandingkan dengan negara lain, sehingga membentuk suatu capaian pembangunan global. 4) Pada kelompok khusus, misalnya swasta, pelokalan bisa mencakup perumusan indikator spesifik yang merangsang swasta untuk turut serta dalam pembangunan, seperti kemitraan swasta dalam pembangunan dengan indikator turut serta membangun infrastruktur yang memiliki perolehan hasil jangka panjang. Hingga kini, lebih banyak ukuran perannya berupa sumbangan swasta dalam *Corporate Social Responsibility* (CSR)."

Tentang SDGs Desa, bagi desa-desa di Indonesia, pelokalan SDGs menjadi SDGs Desa benar-benar dibutuhkan. Bahkan, SDGs Desa menjadi acuan utama pembangunan jangka menengah desa seluruh Indonesia. SDGs yang dicanangkan PBB disebutkan telah teruji memudahkan pengukuran pembangunan. Terdapat

---

tanggal 23 Nopember 2021 pukul 21.36

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

pengakuan bahwa ukuran SDGs telah menyeluruh terhadap aspek kehidupan masyarakat dan lingkungannya. "Karena itu, pelokalan SDGs sebagai SDGs Desa membuat arah pembangunan desa menjadi jelas dan terinci dalam tujuan-tujuan yang holistik."

Berikut adalah Tabel Pelokalan SDGs (Level Internasional) menjadi TBP (level Nasional) ke SDGs Desa[16]

SDGs	TPB	SDGs Desa
1. End poverty in all its form everywhere	1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun.	1. Desa Tanpa Kemiskinan
2. End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture	2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.	2. Desa Tanpa Kelaparan
3. Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages	3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia	3. Desa Sehat dan Sejahtera

16 Ibid

repo uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

4. Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all	4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.	4. Pendidikan Desa Berkualitas
5. Achieve gender equality and empower all women and girls	5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.	5. Keterlibatan Perempuan Desa
6. Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all	6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.	6. Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi
7. Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all	7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.	7. Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan
8. Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all	8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.	8. Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

9. Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation	9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.	9. Infrastruktur dan Inovasi Desa sesuai Kebutuhan
10. Reduce inequality within and among countries	10. Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara.	10. Desa Tanpa Kesenjangan
11. Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient, and sustainable	11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.	11. Kawasan Pemukiman Desa Aman dan Nyaman
12. Ensure sustainable consumption and production patterns	12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.	12. Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan
13. Take urgent action to combat climate change and its impacts	13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.	13. Desa Tanggap Perubahan Iklim

repo uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

14. Conserve and sustainably use the oceans, seas, and marine resources for sustainable development	14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan.	14. Desa Peduli Lingkungan Laut
15. Protect, restore, and promote sustainable use if terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification, and halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss	15. Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghenti-kan kehilangan keanekaragaman hayati.	15. Desa Peduli Lingkungan Darat

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

16. Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all level	16. Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.	16. Desa Damai Berkeadilan
17. Strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership for sustainable development	17. Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.	17. Kemitraan untuk Pembangunan Desa
–	–	18. Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif

Delapan belas tujuan atau *goals* juga dimiliki oleh SDGs desa sebagaimana tertuang di tabel di atas meliputi tujuan Desa Tanpa Kemiskinan, Desa Tanpa Kelaparan, Desa Sehat dan Sejahtera, Pendidikan Desa Berkualitas, Keterlibatan Perempuan Desa, Desa Layak Air Bersih dan

repo uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

Sanitasi. Tujuan selanjutnya adalah Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan, Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata, Infrastruktur dan Inovasi Desa sesuai Kebutuhan, Desa Tanpa Kesenjangan, Kawasan Permukiman Desa Aman dan Nyaman, Konsumsi dan Produksi, Desa Sadar Lingkungan, berikutnya yaitu tujuan Desa Tanggap Perubahan Iklim, Desa Peduli Lingkungan Laut, Desa Peduli Lingkungan Darat, Lalu tujuan Desa Damai Berkeadilan, Kemitraan untuk Pembangunan Desa, Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif. Tujuan pembangunan ini sebagai refleksi menjaga sejarah, budaya dan lembaga asli desa di Indonesia yang akan diturunkan ke dalam konteks mikro desa.

SDGs ini telah diakui produk PBB yang paling komprehensif, ikatan antar negara terus dikembangkan dari 196 indikator pada 2015 menjadi 247 indikator pada 2020. Namun masih disayangkan diantara 116 negara, peringkat Indonesia belum banyak berubah. Indonesia mendapatkan peringkat ke 98 pada 2016 kemudian menurun menjadi peringkat ke 101 pada 2020. Dalam evaluasi SDGs global, Indonesia masih memiliki keunggulan tersendiri yaitu dukungan kebijakan untuk seluruh tujuan pembangunan tetapi masih terdapat kelemahan dalam implementasi dan partisipasi antar pihak. Hal ini dapat diartikan bahwa sumbangsih desa yang mencapai 74 persen dari capaian SDGs nasional sangat berperan dan sangat dominan sebagai tulang punggug pencapaian SDGs, namun sayangnya

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

desa tidak terdaftar dalam rencana aksi maupun ukuran perhitungan SDGs Nasional.[17]

B. Komunitas Samin dan Tengger sebagai Situs Kajian

Konsep 'komunitas' dipahami secara beragam. Mengutip dari Larsen[18], komunitas ada di level messo, dan setidaknya, mencakup dua hal, *pertama s*ebuah komunitas dapat dipahami sebagai kelompok orang, yang meskipun beragam, tinggal di dan berbagi ruang geografis tertentu. *Kedua,* komunitas juga didefinisikan hubungan sekelompok orang yang memiliki kepentingan bersama di mana orang-orang dapat terpisah secara spasial. Dalam konteks komunitas Samin dan Tengger, kedua definisi tersebut relevan karena komunitas mereka tinggal dalam wilayah tertentu dan memiliki kepentingan bersama.

Studi yang disajikan dalam buku ini adalah untuk melihat bagaimana model partisipasi pembangunan dan pemberdayaan di kedua komunitas — Samin dan Tengger - tersebut. Sebagaimana diketahui, Komunitas Tengger dan Samin dibandingkan komunitas masyarakat di pulai Jawa, memiliki corak tradisional yang masih kuat. Menurut Daniel Lerner — pengembang ideologi pembangunan, sebagaimana

17 *https://sdgsdesa.kemendesa.go.id.* Diakses pada 4 November 2021, 15.00 .

18 Larsen, Anne Karin et al. (eds), *Participation in Community Work International Perspectives*, (New York: Routledge, 2014), 2.

repo uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

dikutip Rahmena[19], dengan tegas menyatakan bahwa *traditional society is non-participant, while modern society is*. Sekalipun demikian, pemerintah, akademisi, lembaga donor maupun NGO banyak melakukan pembangunan melalui pemberdayaan yang di dalamnya meniscayakan adanya partisipasi komunitas. Karenanya, urgensi yang terpenting dari buku ini adalah bahwa dalam konteks komunitas masyarakat tradisional seperti Samin dan Tengger, model partisipasi seperti apa yang bisa diajukan, sehingga mereka bisa menjadi bagian dari pembangunan dan pemberdayaan.

Tradisionalitas masyakat Samin telah dikemukakan dalam beragam tulisan. Masyarakat Samin merupakan masyarakat tradisional yang masih melestarikan adat dan budaya yang mereka miliki dan diwarisi secara turun temurun. Dalam hal budaya yang dimilikinya ini, banyak peneliti yang tertarik untuk memperlajari adat istiadat dan kebudayaan Samin dari berbagai sudut pandang. Dalam bidang agama, bentuk proses akulturasi antara adat atau nilai-nilai lokal dan agama (khususnya agama Islam) tidak selalu berjalan mulus. Penolakan masyarakat terhadap ajaran baru kerap terjadi pada awal munculnya Islam di masyarakat Samin karena kecintaannya pada nilai-nilai lama (lokal).[20]

---

19 Rahmena, "Participation", di Wolfgang Sachs (ed), *The Development Dictionary: A Guide to Knowledge as Power*, (London: Zed Books, 2010), 127.

20 Nurhuda Widiana, "Pergumulan Islam Dengan Budaya Lokal:

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

Saat ini penerimaan masyarakat telah berubah sesuai dengan perkembangan zaman, dan hal ini dibuktikan dengan penerimaan dakwah Islam yang terlihat dari diadakannya kegiatan bernuansa Islam seperti Fatayat, Muslimat, TPQ, kelompok Hadrah dan kelompok pengrajin selapanan.[21] Di sisi lain, terdapat penelitian yang menegaskan bahwa agama yang dianut masyarakat Samin adalah Agama Adam. Agama yang dikategorikan pemerintah sebagai aliran kepercayaan ini mensyariatkan kepada penganutnya untuk ibadah dalam bentuk doa (semedi) dan puasa. Agama inilah yang dipegang teguh oleh warga dan di ajarkan secara turun temurun oleh tokoh Samin (botoh) dengan cara oral tradition (bahasa tutur).[22]

Dalam hal budaya, terdapat budaya yang dipertahankan oleh masyarakat Samin, ada pula yang telah menerima modernisasi. Sebagai contoh dalam segi bahasa, penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Samin sebelumnya masih menggunakan ragam *ngono* karena mereka belum megenal adanya tingkatan bahasa seperti yang terdapat dalam bahasa Jawa (*ngoko, madya dan krama*). Namun kemudian setelah mengenal adanya ragam bahasa Jawa, masyarakat Samin

---

Studi Kasus Masyarakat Samin Di Dusun Jepang Bojonegoro", *Teologia*, Vol. 26, No. 2, (Juli-Desember, 2015), 198.

21 Luthfi, "Strategi Dakwah Masyarakat Samin", *Islamic Communication Journal*, Vol. 4, No. 1, (Januari-Juni, 2019), 92.

22 Moh Rasyid, "Memotret Agama Adam: Studi Kasus Pada Komunitas Samin", *Orientasi Baru*, Vol. 23, No. 2, (Oktober, 2014), 190.

repo uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

membedakannya melalui kelompok sosial. Kelompok sosial menengah menggunakan bahasa *ngoko lugu, ngoko alus* dan *madya krama*. Terkait faktor sosial, untuk kelompok sosial atas masyarakat Samin menggunakan ragam *ngoko, madya* dan *krama*. Selain faktor sosial, mereka juga memperhatikan faktor silsilah keturunan Samin yang sangat dihormati masyarakat lainnya.[23]

Sikap masyarakat Samin yang baik dan jujur, tercermin dalam arsitektur rumah yang mereka tinggali. Karena memiliki rasa gotong royong dan persaudaraan yang erat, mereka juga biasa disebut *wong sikep*. Dalam penelitian Murti[24] juga dikemukakan bahwa arsitektur rumah yang berada di Samin relatif tidak mengalami perubahan dari masa ke masa. Mereka masih mempertahankan konsep sedulur sikep yang tercermin dari bangunan rumah tinggal mereka tersebut. Namun bukan hanya nilai *sikep* ini yang mereka jaga, masyarakat Samin juga tetap menjaga nilai Pancasila yang tercermin dari dalam diri dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila ditafsirkan sebagai *papat kiblat limo pancer* yang berarti kehidupan ini terdapat

---

23 Angga Ridhotul Nurdyansya, "Undhak-Usuk Percakapan Kelompok Sosial Dalam Masyarakat Samin, Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro: Kajian Sosiolinguistik", *Skriptorium*, Vol. 2, No.1, 28.

24 Farida Murti et al, "Kajian Arsitektur Rumah Tinggal Suku Samin "Dulu Dan Kini" Di Dusun Jepang, Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro", *Seminar Nasional Call For Paper & Pengabdian Masyarakat*, Vol. 1, No. 01, (2018). 168.

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

empat arah mata angin dan yang bertugas sebagai pelengkap adalah arah yang kelima yaitu sing diarani kiblat limo yaitu ati menungso" hati manusia sebagai penentu arah dan tujuan hidupnya. Jika melihat jangan asal melihat, jika mendengar jangan asal mendengar, jika merasa jangan asal merasakan, namun gunakanlah hati.[25]

Ajaran Samin yang sangat terkenal adalah konsep tentang *jatmika* yang dikenal sebagai pengendalian diri, beribadah, mawas diri dan menyelaraskan, mengbencana merupakan cobaan, yang semuanya mengharuskan manusia memegang budi sejati serta sifat pengendalian diri dengan nafsu.[26] Selain itu, sebagai masyarakat asli (suku) lainnya, masyarakat Samin juga menggunakan obat tradisional dari tanaman, hewan dan bahan lain yang dapat dikembangkan untuk pengobatan modern. Hal ini terbutki dengan pengujian 40 narasumber yang telah diidentifikasi terdapat 19 jenis penyakit yang diobati dengan 21 tumbuhan, 4 jenis hewan dan 4 bahan mineral alam dan hasilnya bahan-bahan tersebuut dapat dikembangkan menjadi bahan baku industri obat tradisional.[27]

---

25 Yan Adi Christanto, "Konstruksi Masyarakat Samin Tentang Nilai-Nilai Pancasila Di Dusun Jepang Kecamatan Margomulyo Bojonegoro", *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*. Vol. 01, No, 03, (2015), 54.

26 Khoirul Huda, "Menjadi Jatmika; Nilai Kejatmikaan Pada Perempuan Samin Di Kabupaten Bojonegoro", *Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama*, Vol. 11, No. 2, (Juli — Desember, 201.

27 Alifia Putri, "Identifikasi Dan Eksplorasi Etnomedisina Pada Suku

repo uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

Begitu pula dengan pemeliharaan tradisi di masyarakat Samin, memiliki integritas yang kuat dalam altruisme. Mereka mengesampingkan tradisi untuk terciptanya kerukunan dengan masyarakat lain maupun dengan pemerintah. Tiga tema yang menjadi dasar tradisi adalah yang menguatamakan kerukunan dalam interaksi, memelihara ajaran adat, dan tidak membeda-bedakan dalam memberi bantuan.[28] Dalam menjaga tradisi ini, masyarakat Samin juga menghadapi modernisasi. Modernisasi tersebut telah masuk dengan cukup pesat dihadapi dengan menyelamatkan mereka dari derasnya arus modernisasi terutama yang berhubungan dengan industrialisme yang menyebabkan terciptanya konflik sosial dengan masyarakat luar.[29]

Berdasarkan pengalaman penulis bertemu dengan tokon Samin, dinyatakan bahwa komunitas Samin tidak meminta apapun dari pemerintah maupun pihak lain. Mereka menerima saja apapun yang diberikan. Karenanya, studi tentang pemberdayaan di Komunitas Samin sangat jarang ditemukan. Dalam studi lapangan, selama ini pendampingan untuk masyarakat Samin, sebagaimana dikemukakan Kepala KUA Margomulyo, Kementerian

---

Samin Di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur", *Jpms*, Vol. 1, No. 2, (2016), 69.

28 Amelilia Fauzia, "Arti Memelihara Tradisi Pada Suku Samin", *Jurnal Empati*, Vol. 8, No. 1, (Januari, 2019), 228.

29 Nur Hadi, "Local Wisdom of Samin Community In Tradition And Modernization Frame". Di *Proceedings of The 2nd International Conference On Sociology Education* (Icse), Vol. 2, (2017), 41.

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

Agama mensosialisasikan UU perkawinan agar masyakat bisa menikah secara legal, dan mensosialisasikan anak-anak untuk menempuh pendidikan formal.

Tulisan tentang pemberdayaan di komunitas Samin ada dalam penelitian Candrawati dkk tentang pemberdayaan keluarga di masjid[30]. Peneliti melakukan pendampingan dalam memanfaatkan potensi masjid al-Huda sebagai tempat kegiatan sosial kemasyarakatan. Tema yang disampaikan dalam kegiatan ceramah seperti tema ketahanan keluarga dalam Islam dan ceramah ini akan dilakukan di masjid secara berkala yang bekerjasama dengan kader PLKB dan Mubaligh di dusun jepang. Sehingga masjid yang ada tersebut tidak hanya dipergunakan sebagai sarana atau fasilitas ibadah tetapi juga sebagai sarana fasilitas sosial. Dalam hal perkawinan, masyarakat Samin cenderung masih mempertahankan adat istiadat yang berlaku seperti yang diajarkan oleh leluhurnya.

Di Komunitas Samin, pernikahan disebut pasuwitan dengan beberapa proses yang dilakukan, yaitu proses *nakokke, mbalesi gunem, ngendek, nyuwito, ngenger, paseksen,* dan *tingkepan.* Tata cara ini berbeda dengan apa yang tertulis dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu dalam segi Tata Cara Perkawinan, Asas Perkawinan, Bahasa *Aqad Ijab Qabul*, Usia Perkawinan,

30 Siti Dalilah Candrawati, "Pemberdayaan Keluarga Berbasis Masjid Pada Masyarakat Samin Dusun Jepang Margomulyo Bojonegoro", *Jurnal "Al-Qalam*, Vol. 24, No. 1, (Juni, 2018), 164.

repo uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

dan Pencatatan dalam Perkawinan.[31] Selain UU perkawinan, terkait waris, Komunitas Samin juga tidak mengenal UU Hukum Waris. Masyarakat Samin tidak mengenal istilah warisan, mereka menyebutnya dengan istilah *tinggalan*. Pembagian warisan adat ini dilakukan secara kekeluargaan dan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. [32]

Adapun tentang politik, tulisan Hasyim[33] menunjukkan adanya perkembangan yang signifikan dalam menyuarakan aspirasinya dalam pemilu. Menjelang pemilihan umum atau pemilu, biasanya masyarakat Samin mengadakan musyawarah antar warga yang dipimpin oleh kepala adat, untuk menentukan arah pilihan atau aspirasi politiknya. Seiring dengan perkembangan jaman, musyawarah tersebut tetap berlaku meskipun dengan hasil yang tidak mengikat sehingga masyarakat Samin diberi kebebasan dalam memilh dan menentukan aspirasi politiknya. Hal ini menunjukkan tingkat

---

31 Mahmud Huda, "Pasuwitan Suku Samin Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Dusun Jepang Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 1, (April, 2019), 30.

32 Resa Eka Nur Fitria Sari, "Sistem Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Adat Samin Dalam Prespektif Hukum Adat Dan Hukum Islam (Studi Di Desa Margomulyo Kec. Margomulyo Kab. Bojonegoro)", *Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 26, No. 3, (Februari, 2020), 268.

33 Muh Fathoni Hasyim, "Literasi Politik Komunitas Samin Di Bojonegoro Dalam Pemilu Perspektif Fiqh Siyasah", *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 14, No. 2, (Desember, 2020), 225.

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

literasi politik masyarakat Samin yang semakin meningkat menuju ke arah yang semakin dinamis dan progresif.

Komunitas kedua yang menjadi kajian dalam buku ini yaitu Tengger juga masuk dalam kategori komunitas yang gigih mempertahankan tradisinya. Komunitas Tengger sesungguhnya adalah masyarakat yang heterogen karena masyarakat suku Tengger tidak hanya memeluk Agama Hindu, namun juga terdapat umat Islam dan Kristen. Meskipun demikian, penduduk setempat dapat menjaga kerukunan komunitas dan persaudaraan yang erat, sehingga menarik kalangan akademisi untuk meneliti suku tersebut. Umat beragama di sana menggunakan simbol-simbol adat untuk berinteraksi secara harmonis dan komunikatif, dan hal ini menjadikan suku Tengger sebagai salah satu miniatur kerukunan agama yang kondusif di Indoensia selain Bali.[34] Dalam bahasa adat Tengger, kerukunan beragama ini juga tercermin dalam tradisi *gentenan* (saling bergantian) untuk membantu hajatan sesame warga, *sayan* (undangan hajatan), *genten cecelukan* atau *gentenan nedha* (bergantian mengundang makan), *nglayat* atau *salawatan* (membantu tetangga yang terkena musibah). [35]

34 Moh. Ali Hisyam, "Harmoni Lintas Agama Masyarakat Tengger", *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 10, No. 1, (September, 2015), 82.

35 Joko Tri Haryanto, "Local Wisdom Supporting Religious Harmony In Tengger Community, Malang, East Java, Indonesia", *Jurnal Analisa*, Vol. 21, No. 02, (Desember, 2014). 201.

repo uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

Hal yang tidak kalah menarik dari Komunitas Tengger adalah sistem pengendalian diri Komunitas Tengger telah terlatih melalui adat istiadat dan budaya yang selama ini mereka jalankan. Hal ini terbukti dengan tidak terjadinya kejahatan yang parah seperti pencurian atau pembunuhan, yang ada hanya kriminalitas biasa yang berkaitan dengan perladangan dan persoalan susila yang menyangkut pemuda dan pemudi belaka.[36] Modal sosial masyarakat adat dalam rangka proses harmonisasi sosial masyarakat Tengger meliputi kepercayaan, kewajiban, harapan, norma dan sanksi.[37]

Terdapat dua kepemimpinan di Komunitas Tengger yang mempunyai peran masing-masing dengan satu tujuan yaitu menciptakan pemerintahan yang baik (*good village governance*) melalui kearifan lokal (*local wisdom*). Kepemimpinan tersebut adalah kepemimpinan Struktural dan kultural. Kepemimpinan structural dipimpin oleh pemerintah desa sedangkan kultural dipimpin oleh dukun adat atau kepala adat. [38] Kepala adat biasa disebut dukun

36 Purnawan Dwikora Negara, "Budaya Malu Pada Masyarakat Tengger Dan Pengaruhnya Terhadap Budaya Hukum Penghindaran Konflik", *Widya Yuridika Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 2 (Desember, 2018), 141.

37 Okta Hadi Nurcahyono, "Harmonization Of Tengger Culture Society (Social Capital Existance Analysis In Harmonization Processes On Culture Society Of Tengger Etnic, Tosari Village, Pasuruan, East Java", *Dialektika Masyarakat: Jurnal Sosiologi Harmonisasi Masyarakat Adat Suku Tengger*, Vol. 2, No.1, (Mei 2018). 1.

38 Dani Harianto, "Pengembangan Laboratorium Budaya Suku

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

pandita yang memiliki peran penting dalam adat dan keagamaan. Dukun pandita bertugas memimpin upacara adat, menentukan hari baik dan menjadi sandaran bagi umat dalam hal keagamaan.[39] Upacara adat yang biasa dilakukan antara lain *karo, pujan kapat, pujan kepitu, pujan kawolu, upacara kasada, upacara unan-unan, entasentas, upacara pujan mubeng, upacara barikan, upacara liliwet*, upacara perkawinan, kelahiran dan kematian.[40]

Budaya lainnya yang melekat pada suku Tengger yaitu adat warisan. Menurut hasil penelitian terdahulu, wanita suku Tengger mendapat bagian yang lebih besar daripada pria. Hal ini dikarenakan pria dianggap lebih kuat dan mampu bekerja sehingga penghasilannya lebih besar sedangkan wanita lebih lemah dan perlu mendapatkan perlindungan yang lebih besar.[41]

Berdasarkan kajian tentang masyarakat Samin di atas, informasi tentang pembangunan komunitas, pemberdayaan komunitas, dan partisipasi komunitas dalam pembangunan

---

Tengger Untuk Mewujudkan Sistem Pemerintahan Desa Yang Baik (Good Village Governance)", *Maksigama Jurnal Hukum*, Vol. 19, No. 1, (Mei, 2016), 58.

39 Syifa Sakinah Hidayat, "Kedudukan, Peran, Dan Fungsi Dukun Pandita Di Suku Tengger", *Umbara Indonesian Journal of Anthropology*, Vol. 4, No. 1, (Juli, 2019), 44.

40 I Wayan Subagiarta, "Vircous Cirle Economic Adat Suku Tengger Di Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur", *Jurnal Isei Jember*, Vol. 5, No. 3, (April, 2015), 1.

41 Ibid.

repo uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

juga minim. Ini berbeda dengan masyarakat tradisional Komunitas Tengger yang bisa dijumpai dalam studi-studi yang menyangkut pemberdayaan. Sebagai contoh tulisan Supanto[42] yang mengembangkan model pengembangan ekonomi kawasan berbasis agro ekowisata sebagai penyangga ekonomi kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dan menerapkannya di desa lainnya dengan menggunakan teknik FGD, pengamatan langsung dan dokumentasi. Selain pengembangan model, ada pula pengoptimalan daya guna pada zona pemanfaatan tradisional, contohnya di desa Enclave Ranu Pane dalam Area Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. [43]

Dalam hal pemberdayaan masyarakat, suku Tengger juga menjalankan Musrenbangdes secara formal. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, bentuk partisipasi masyarakat yang dikemukakan adalah partisipasi penuh. Karena temuan ini jarang diitemukan di desa lain, maka hal ini menjadi bentuk dari kearifan lokal dan karakteristik daerah tersbut.[44] Kemudian pengembangan tanaman obat yang

---

42 Fajar Supanto, "Agro Ekowisata Sebagai Penyangga Ekonomi Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru: Studi Pada Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang", *Prosiding Seminar Nasional*, Gedung Pascasarjana Feb Unej, 17 Desember 2016. 506.

43 Syamsu Budiyanti, "Analisis Deskriptif Aktivitas Dan Potensi Komunitas Desa Enclave Ranu Pane Pada Zona Pemanfaatan Tradisional, Kecamatan Senduro, Kab. Lumajang, Wilayah Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (Tnbts)", Jp Sosiologi dd 2015, 1.

44 Ana Sopanah, "Dibalik Ceremonial Budgeting: "Rembug Desa Tengger" Partisipasi Nyata Dalam Pembangunan", Disertasi

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

berpotensi untuk dikembangkan dan diproduksi dalam jumlah besar sehingga rencana program pendampingan yang akan datang dapat menjadi kewirausahaan masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraannya.[45]

Berdasar studi yang terkait dengan Komunitas Tengger dan Samin di atas, partisipasi keduanya dalam pembangunan sangat penting. Mengutip Bayor,[46] proses pemberdayaan untuk pembangunan komunitas memerlukan partisipasi; keterlibatan, berbagi informasi, ide bersama, minat, pengetahuan, kepemilikan, tanggung jawab dan akuntabilitas. Masyarakat, oleh karenanya, mencapai hasil yang signifikan dalam upaya pengembangan mereka jika mereka diberdayakan untuk dapat menghayati prinsip-prinsip tersebut. Namun, ada beberapa faktor yang bertanggung jawab untuk mempromosikan berbagi informasi, gagasan bersama, minat, tanggung jawab, dan akuntabilitas untuk perkembangan suatu komunitas. Ini termasuk tingkat kepercayaan di antara anggota masyarakat,

---

"Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Penganggaran Daerah Berbasis Kearifan Lokal" Pada *Program Doktor Ilmu Akuntansi (Pdia) Universitas Brawijaya Malang*. 2012, 1.

45 Anik Listiyana, "Emberdayaan Masyarakat Suku Tengger Ngadas Poncokusumo Kabupaten Malang Dalam Mengembangkan Potensi Tumbuhan Obat Dan Hasil Pertanian Berbasis "Etnofarmasi" Menuju Terciptanya Desa Mandiri", *Journal Of Islamic Medicine*, Vol. 1, No. 1, (2017), 2.

46 Isaac Bayor, "Community Participation In Poverty Reduction Interventions: Examining The Factors That Impact On The Community-Based Organisation (CBO) Empowerment Project In Ghana", 20.

repo uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

timbal balik, jaringan, norma dan efektivitas masyarakat, dan mekanisme sanksi informal di masyarakat. Semua faktor yang disatukan ini dapat disebut sebagai modal sosial.

C. Etnografi sebagai Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode campuran (*Mixed Method*). Istilah "metode campuran"" mengacu pada sebuah metodologi penelitian yang mengutamakan integrasi sistematis, atau "pencampuran," data kuantitatif dan kualitatif, dalam penyelidikan tunggal atau program penyelidikan berkelanjutan. Premis dasar dari metodologi campuran ini adalah bahwa integrasi tersebut memungkinkan pemanfaatan data dengan lebih lengkap dan lebih sinergis daripada pengumpulan dan analisis data kuantitatif saja atau kualitatif saja.

Jennifer Wisdom dan John W Creswell mencontohkan bagaimana penggunaan metodologi campuran ini dalam mengevaluasi Patient-Centered Medical Home (PCMH), yang membuka peluang ideal bagi penerapan studi ilmiah dengan metode campuran tersebut, sehingga metode campuran ini dapat berkontribusi lebih jauh dalam pembelajaran tentang praktik terbaik dan cara-cara yang dapat dilakukan oleh PCMH, serta menunjukkan efektivitas PCMH dalam mencapai tiga tujuannya: aspek biaya, kualitas, dan pengalaman perawatan pasien.[47]

---

47 Jennifer Wisdom and John W Creswell, "Mixed Methods:

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

Penelitian metode campuran ini berasal dari ilmu-ilmu sosial. Baru-baru ini, metode campuran berkembang menjadi ilmu kesehatan dan kedokteran, termasuk bidang-bidang seperti keperawatan, kedokteran keluarga, pekerjaan sosial, kesehatan mental, farmasi, kesehatan terkait, dan lain-lain. Dalam dekade terakhir, prosedurnya telah dikembangkan dan disempurnakan agar sesuai dengan berbagai pertanyaan penelitian.[48]

Prosedur ini termasuk untuk memajukan tingkat ketelitian, menawarkan desain metode campuran alternatif, menentukan sistem notasi singkatan untuk menggambarkan desain untuk meningkatkan komunikasi lintas bidang, memvisualisasikan prosedur melalui diagram, mencatat pertanyaan penelitian yang secara khusus dapat mengambil manfaat dari integrasi, dan mengembangkan alasan untuk melakukan berbagai bentuk studi metode campuran.

Karakteristik inti dari studi metode campuran yang dirancang dengan baik meliputi: pengumpulan dan analisis data kuantitatif (tertutup) dan kualitatif (terbuka); penggunaan prosedur yang ketat dalam mengumpulkan dan menganalisis data yang sesuai dengan tradisi masing-masing metode, seperti memastikan ukuran sampel yang sesuai untuk analisis

---

Integrating Quantitative and Qualitative Data Collection and Analysis While Studying Patient-Centered Medical Home Models," *AHRQ Publication,* No.: 13-0028-EF, (2013).

48 Creswell JW, Plano Clark VL. Designing and conducting mixed methods research. 2nd ed. ThousandOaks, CA: Sage; 2011.

repo uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

kuantitatif dan kualitatif; integrasi data selama pengumpulan data, analisis, atau diskusi; penggunaan prosedur yang menerapkan komponen kualitatif dan kuantitatif baik secara bersamaan atau berurutan, dengan sampel yang sama atau dengan sampel yang berbeda; membingkai prosedur dalam model penelitian filosofis / teoretis, seperti dalam model konstruksionis sosial yang berusaha memahami berbagai perspektif tentang satu masalah.[49]

Evaluator dapat memilih dari lima desain metode campuran utama tergantung pada pertanyaan penelitian yang ingin mereka jawab dan sumber daya yang tersedia untuk evaluasi. Validasi temuan menggunakan sumber data kuantitatif dan kualitatif. Evaluator dapat menggunakan desain konvergen untuk membandingkan temuan dari sumber data kualitatif dan kuantitatif. Ini melibatkan pengumpulan kedua jenis data pada waktu yang hampir bersamaan; menilai informasi menggunakan konstruksi paralel untuk kedua jenis data; menganalisis kedua jenis data secara terpisah; dan membandingkan hasil melalui prosedur seperti perbandingan berdampingan dalam diskusi, mengubah kumpulan data kualitatif menjadi skor kuantitatif, atau secara bersama-sama menampilkan kedua bentuk data. Misalnya, peneliti dapat mengumpulkan data kualitatif untuk menilai pengalaman pribadi pasien sambil mengumpulkan data dari instrumen

49 Homer CJ, Klatka K, Romm D, et al. A review of the evidence for the medical home for children with special health care needs. Pediatrics 2008;122:e922—e937.

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

survei yang mengukur kualitas perawatan. Kedua jenis data tersebut dapat memberikan validasi satu sama lain dan juga menciptakan landasan yang kokoh untuk menarik kesimpulan tentang intervensi.[50]

Metode campuran juga menggunakan data kualitatif untuk mengeksplorasi temuan kuantitatif. Desain sekuensial penjelasan ini biasanya melibatkan dua fase: (1) fase instrumen kuantitatif awal, diikuti oleh (2) fase pengumpulan data kualitatif, di mana fase kualitatif dibangun secara langsung berdasarkan hasil dari fase kuantitatif. Dengan cara ini, hasil kuantitatif dijelaskan secara lebih rinci melalui data kualitatif. Temuan dari data instrumen dapat dieksplorasi lebih lanjut dengan kelompok fokus kualitatif untuk lebih memahami bagaimana pengalaman pribadi individu cocok dengan hasil instrumen. Jenis penelitian ini menggambarkan penggunaan metode campuran untuk menjelaskan secara kualitatif bagaimana mekanisme kuantitatif dapat bekerja.

Berikutnya adalah mengembangkan instrumen survei. Namun desain studi metode campuran lain dapat mendukung pengembangan instrumen kuantitatif yang tepat yang memberikan ukuran akurat dalam konteks penelitian. Desain sekuensial eksplorasi ini melibatkan pengumpulan data eksplorasi kualitatif terlebih dahulu, menganalisis informasi, dan menggunakan temuan untuk

50 Nutting PA, Miller WL, Crabtree BF, et al. Initial lessons from the first national demonstration project on practice transformation to a patient-centered medical home. Ann Fam Med 2009;7(3):254—60.

repo uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

mengembangkan instrumen psikometrik yang disesuaikan dengan sampel yang diteliti. Instrumen ini kemudian, pada gilirannya, diberikan kepada sampel populasi. Misalnya, studi penelitian dapat dimulai dengan eksplorasi kualitatif melalui wawancara dengan informan primer untuk menilai konstruksi apa yang harus diukur untuk memahami peningkatan kualitas partisipasi informan. Dari eksplorasi ini, instrumen dapat dikembangkan menggunakan prosedur pengembangan skala yang ketat yang kemudian diuji dengan sampel.[51] Dengan cara ini, peneliti dapat menggunakan pendekatan metode campuran untuk mengembangkan dan menguji instrumen partisipasi yang ada.

Penggunaan data kualitatif untuk menambah hasil studi kuantitatif. Sebuah studi hasil, misalnya uji coba terkontrol secara acak, dengan pengumpulan dan analisis data kualitatif ditambahkan, disebut desain tertanam. Dalam jenis studi hasil ini, peneliti mengumpulkan dan menganalisis data kuantitatif dan kualitatif. Data kualitatif dapat dimasukkan ke dalam penelitian di awal (misalnya, untuk membantu merancang intervensi); selama intervensi (misalnya, untuk mengeksplorasi bagaimana peserta berpartisipasi dalam pembangunan pemerintah); dan setelah intervensi (misalnya, untuk membantu menjelaskan hasil). Dengan cara ini, data kualitatif menambah hasil studi,

51 DeVellis RF. Scale development: Theory and application. Newbury Park, CA: Sage; 1991.

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

yang merupakan pendekatan populer dalam penelitian implementasi dan diseminasi.[52]

Metode campuran ini pun pada akhirnya akan melibatkan pemangku kepentingan berbasis masyarakat. Pendekatan partisipatif berbasis komunitas adalah contoh desain multifase. Pendekatan metode campuran tingkat lanjut ini melibatkan partisipan masyarakat dalam banyak fase penelitian kuantitatif dan kualitatif untuk membawa perubahan.[53] Beberapa fase semua membahas tujuan umum menilai dan menyempurnakan model dalam penelitian. Desain ini akan melibatkan individu dalam masyarakat maupun individu dalam pemerintahan sepanjang proses penelitian. Pemangku kepentingan utama berpartisipasi sebagai peneliti bersama dalam sebuah proyek, memberikan masukan tentang kebutuhan mereka, cara untuk mengatasinya, dan cara untuk menerapkan perubahan.

Desain penelitian ini menerapkan pendekatan metode campuran untuk evaluasi model penelitian. Literatur yang tersedia dapat merinci prosedur tersebut, menggambarkan aliran kegiatan melalui penggunaan notasi steno, dan mencerminkan kekuatan dan keterbatasan.

Menggunakan studi metode campuran memiliki

52 Palinkas LA, Aarons GA, Horwitz S, et al. Mixed methods designs in implementation research. Adm Policy Ment Health 2011;38(1):44—53.

53 Mertens DM. Transformative research and evaluation. New York: Guilford; 2009.

repo uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

beberapa keuntungan, yang akan kita bahas di bawah ini. Pertama, dapat membandingkan data kuantitatif dan kualitatif. Metode campuran sangat berguna dalam memahami kontradiksi antara hasil kuantitatif dan temuan kualitatif. Kedua, mencerminkan sudut pandang peserta. Metode campuran memberikan suara kepada peserta penelitian dan memastikan bahwa temuan penelitian didasarkan pada pengalaman peserta. Ketiga, menumbuhkan interaksi ilmiah. Studi semacam itu menambah luasnya penelitian tim multidisiplin dengan mendorong interaksi para sarjana metode kuantitatif, kualitatif, dan campuran. Keempat, memberikan fleksibilitas metodologis. Metode campuran memiliki fleksibilitas yang besar dan dapat disesuaikan dengan banyak desain studi, seperti studi observasional dan uji coba acak, untuk menjelaskan lebih banyak informasi daripada yang dapat diperoleh hanya dalam penelitian kuantitatif. Kelima, mengumpulkan data yang kaya dan komprehensif.

Metode campuran juga mencerminkan cara individu mengumpulkan informasi secara alami—dengan mengintegrasikan data kuantitatif dan kualitatif. Misalnya, cerita olahraga sering mengintegrasikan data kuantitatif (skor atau jumlah kesalahan) dengan data kualitatif (deskripsi dan gambar sorotan) untuk memberikan cerita yang lebih lengkap daripada yang dilakukan oleh salah satu metode saja. Keenam, studi metode campuran menantang untuk diterapkan, terutama ketika digunakan untuk

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

mengevaluasi intervensi komplekitas partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Selain keuntungan, berikut ini juga membahas beberapa tantangan metode campuran. Pertama, dapat meningkatkan kompleksitas evaluasi. Studi metode campuran rumit untuk direncanakan dan dilakukan. Studi ini membutuhkan perencanaan yang cermat untuk menggambarkan semua aspek penelitian, termasuk sampel studi untuk bagian kualitatif dan kuantitatif (identik, tertanam, atau paralel); waktu (urutan bagian kualitatif dan kuantitatif); dan rencana untuk mengintegrasikan data. Mengintegrasikan data kualitatif dan kuantitatif selama analisis seringkali merupakan fase yang menantang bagi banyak peneliti.

Kedua, bergantung pada tim peneliti multidisiplin. Melakukan studi metode campuran berkualitas tinggi membutuhkan tim peneliti multidisiplin yang, dalam melayani studi yang lebih besar, harus terbuka terhadap metode yang mungkin bukan bidang keahlian mereka. Menemukan pakar kualitatif yang juga nyaman mendiskusikan analisis kuantitatif dan sebaliknya dapat menjadi tantangan di banyak lingkungan. Mengingat bahwa setiap metode harus mematuhi standar ketelitiannya sendiri, memastikan kualitas yang tepat dari setiap komponen penelitian metode campuran bisa jadi sulit.[54] Sebagai

54 Wisdom JP, Cavaleri MC, Onwuegbuzie AT, et al. Methodological reporting in qualitative, quantitative, and mixed methods health services research articles. Health Serv Res 2011:47(2):721—45.

repo uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

contoh, analisis kuantitatif memerlukan ukuran sampel yang jauh lebih besar untuk mendapatkan signifikansi statistik daripada analisis kualitatif, yang membutuhkan pencapaian tujuan kejenuhan (tidak mengungkap informasi baru dari melakukan lebih banyak wawancara) dan relevansi. Sampel tertanam, di mana subsampel kualitatif dimasukkan ke dalam sampel kuantitatif yang lebih besar, dapat berguna dalam kasus kekuatan statistik yang tidak memadai.

Ketiga, membutuhkan sumber daya yang meningkat. Akhirnya, studi metode campuran adalah padat karya dan membutuhkan sumber daya dan waktu yang lebih besar daripada yang dibutuhkan untuk melakukan studi metode tunggal. Keempat, mengintegrasi data kuantitatif dan kualitatif dalam bentuk studi metode campuran memiliki potensi besar untuk memperkuat ketelitian dan memperkaya analisis dan temuan dari setiap evaluasi topik partisipasi masyarakat ini. Dengan hati-hati memilih desain metode campuran yang paling sesuai dengan pertanyaan evaluasi dan memenuhi kendala sumber dayanya, evaluator dapat memfasilitasi pembelajaran yang lebih dalam dan lebih bermakna mengenai efektivitas dan implementasi model ini.[55]

---

55 Peikes D, Zutshi A, Genevro J, et al. Early Evidence on the Patient-Centered Medical Home, FinalReport (Prepared by Mathematica Policy Research, under Contract Nos. HHSA290200900019I/HHSA29032002T and HHSA290200900019I/HHSA29032005T). Rockville, MD: Agency for Healthcare Research and Quality. AHRQ Publication No. 12-0020-EF.

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

Untuk lebih jelasnya kaitan dengan proses penelitian ini, lihatlah bagan sebagaimana berikut ini:

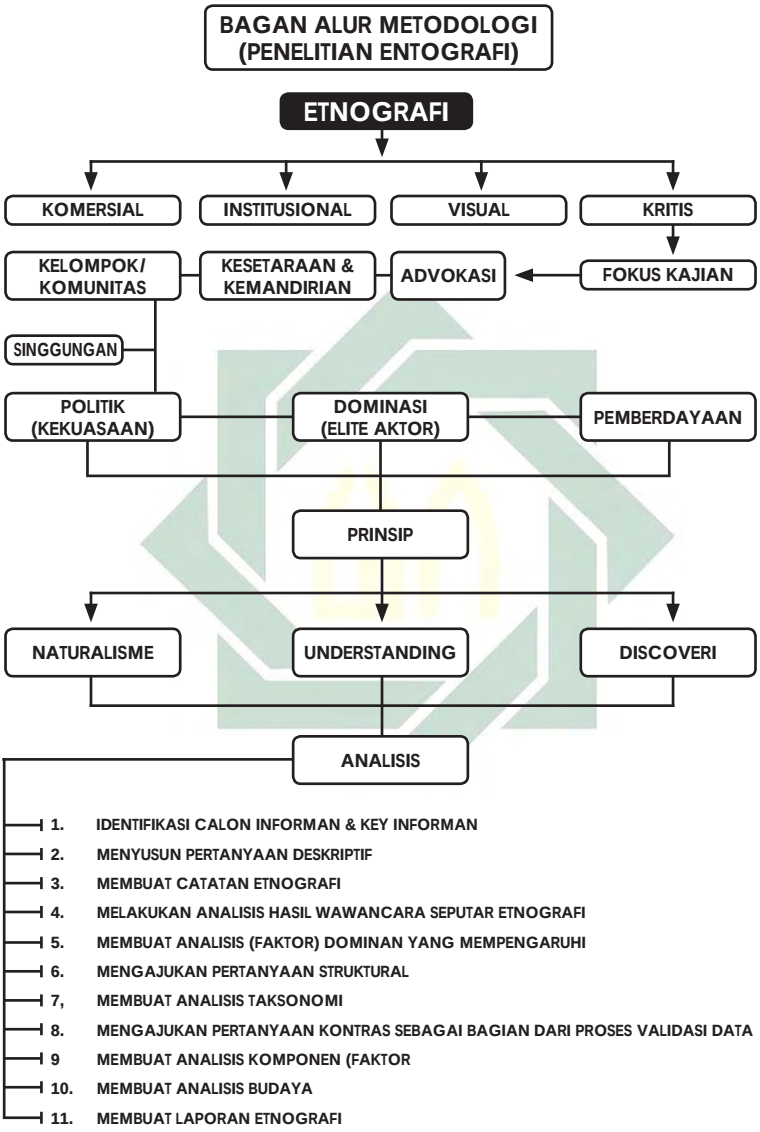

repo uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

D. Peran Perguruan Tinggi dalam Pemberdayaan Masyarakat

Sepanjang sejarah, institusi pendidikan tinggi telah memainkan peran penting dalam masyarakat dengan mencerdaskan masyarakat dan menghasilkan banyak sumbangan dalam ilmu pengetahuan. Perguruan tinggi dapat bekerjasama dengan pemerintahan untuk menawarkan kreatifitas ilmu pengetahuan dan potensi yang kuat untuk berkontribusi pada pembangunan.[56] Peran penting perguruan tinggi dalam pemberdayaan masyarakat dapat dirasakan terutama di negara berkembang. Terdapat slogan yang sering disebutkan di beberapa institusi yaitu"*take the college out to the community and bring the community into the college*" (bawalah perguruan tinggi ke masyarakat dan bawalah masyarakat ke perguruan tinggi) sebagai filosofi kerja mereka. Dalam hasil penelitian Falairiva,[57] dikemukakan bahwa Universitas dan perguruan tinggi mempunyai potensi untuk menjadi pemeran utama dalam proses pembangunan pedesaan di negara-negara berkembang. Perguruan tinggi dinilai mempuyai gabungan kekuatan, yaitu kreatifitas penelitian-penelitian

56 Maia Chankseliani et al, "Higher Education Contributing To Local, National, And Global Development: New Empirical And Conceptual Insights", *Higher Education* (2021), 110.

57 Taafaki Falairiva, "The University and Its Role in Rural Development in The Developing Countries", *Doctoral Dissertations* University Of Massachusetts Amherst, (February, 2014), 203.

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

yang berguna bagi pemberdayaan masyarakat. Karakter sumber daya yang diperlihatkan oleh staf dan mahasiswa menjadikan universitas menjadi sarana yang ideal untuk menangani pembangunan.

Di Indonesia, pentingnya hal tersebut telah diatur dalam Undang- undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 45 yang tercatat bahwa penelitian di perguruan tinggi ditujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat menjadi daya saing bangsa.[58] Pengamalan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat terangkum dalam tri dharma perguruan tinggi poin ketiga yaitu perguruan tinggi dituntut untuk senantiasa mengabdikan diri pada masyarakat dalam berbagai bentuk kegiatan seperti pengabdian, pemberdayaan pendampingan dan lain sebagainya.

Perguruan Tinggi pada hakikatnya harus menjadi agen perubahan (*agent of social change*) dalam semua aspek kehidupan walaupun usaha tersebut harus berhadapan dengan tantangan yang tidak mudah. Tantangan yang dihadapi di lapangan seperti ketidaksamaan antara desain kurikulum dengan kebutuhan masyarakat, tradisi ilmiah yang lebih kuat, adat istiadat yang sudah berakar, paradigma berpikir masyarakat yang masih sempit.

58 Almasdi Syahza, "Dampak Nyata Pengabdian Perguruan Tinggi Dalam Membangun Negeri", *Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pekanbaru*, Vol. 1, (2019), 2.

repo uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

BAB II

PEMBANGUNAN DESA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

A. Pembangunan, Pemberdayaan dan Partisipasi

Pembangunan merupakan kata kunci bagi semua bangsa untuk menggerakkan kondisi kesejahteraan warga negara ke arah yang lebih baik. Ini artinya pembangunan meniscayakan adanya perubahan, yaitu proses peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Konseptualisasi pembangunan merupakan proses perbaikan yang berkesinambungan pada suatu masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik atau lebih sejahtera sehingga terdapat beberapa cara untuk menentukan tingkat kesejahteraan pada suatu negara.

Pembangunan[1] adalah tentang orang-orang yang

1 Nicholas Stern, *Growth And Empowerment: Making Development Happen*, (London: The Mit Press, 2005), 4.

pos uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

mengubah hidup mereka menjadi lebih baik, tentang bagaimana manusia memperluas kemampuan mereka untuk membuat pilihan tentang hal-hal yang penting bagi mereka. Konsep pembangunan komunitas telah diperluas dari fokus sempit pada pendapatan dan pengeluaran yang kemudian memasukkan pendidikan, kesehatan, dan partisipasi sosial dan politik. Karena pembangunan adalah persoalan kesejahteraan, maka kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk mencapai standar; orang miskin tidak memiliki kebebasan mendasar untuk menjalani kehidupan. Mereka sering tidak memiliki cukup makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan perawatan kesehatan. Mereka sangat rentan terhadap penyakit, kekerasan, dislokasi ekonomi, dan bencana alam. Mereka juga kurang terlayani oleh lembaga-lembaga negara dan masyarakat, mereka sering didapati tidak berdaya untuk mempengaruhi keputusan-keputusan penting mempengaruhi kehidupan mereka.

Dalam persoalan kesejahteraan tersebut, peran negara sangat dibutuhkan. Namun kenyataannya globalisasi dan regionalisasi seringkali menyalip unit standar pembangunan bangsa. Dunia menyaksikan institusi internasional dan kekuatan pasar mengambil alih peran negara yang selama ini menjadi agen pembangunan konvensional, yang mengejar tujuan klasik pembangunan, yaitu modernisasi dan mengejar ketertinggalan. Ini semua kemudian dipertanyakan karena modernisasi tidak lagi memiliki ambisi yang jelas. Modernitas tampaknya tidak lagi begitu menarik dilihat dari

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

segi masalah ekologis, dengan konsekuensi dari perubahan teknologi dan banyak masalah lainnya. Westernisasi juga tidak lagi menarik pada saat budaya lokal dan keragaman budaya mendapat nilai kembali. Mengingat banyaknya gagasan modernitas, pertanyaannya adalah modernisasi tersebut menuju modernitas yang mana?.

Beberapa dekade pembangunan belum memenuhi harapan, terutama di Afrika dan sebagian Amerika Latin dan Asia Selatan. Universalitas klaim ekonomi neo klasik dan kebijakan penyesuaian struktural telah menggerogoti fondasi studi pembangunan. Ini berujung pada pertanyaan ekstrem yang kemudian diajukan, bahwa bukankah semua ini berarti akhir dari pembangunan. Segala sesuatu yang digunakan untuk mewakili pembangunan tampaknya dipertanyakan dan dalam krisis.[2]

Di sisi lain, White[3] menyatakan bahwa pemerintah memahami pentingnya keberhasilan ekonomi, yang seringkali untuk memperkuat legitimasi politik mereka sendiri. Mereka juga menginginkan sumber daya untuk menangani masalah seperti kemiskinan atau kerusakan lingkungan. Pemerintah di banyak negara juga tidak memahami bagaimana sebenarnya

2 Jan Nederveen Pieterse, *Development Theory Deconstruction/ Reconstructions*, (Nottingham Trent University: Sage Publication, 2010), 1-2.

3 Colin White, *Understanding Economic Development: A Global Transition From Poverty To Prosperity*, (USA: Edward Elgar, 2009), 4-5.

repo uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

cara untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi melalui langkah-langkah kebijakan, bahkan apakah itu mungkin. Terkadang perkembangan ekonomi modern mungkin terlepas dari tindakan pemerintah.

Pertumbuhan kemudian menjadi ukuran utama, liberalisme ekonomi kemudian menjadi ideologi yang kemudian berkembang sebagai yang sering disebut developmentalisme. Developmentalisme yang berkembang ditujukan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi dan liberalisasi dalam beragam sektor kehidupan masyarakat menjadi pisau bermata ganda, karena di sisi lain, banyak yang melihat ujung dari developmentalisme adalah kesenjangan, kemiskinan, masalah lingkungan, dan banyaknya problem terkait hak asasi manusia.[4]

---

4 Develomentalisme – Atau Gagasan 'Negara Pembangunan' – adalah Salah Satu Ideologi Paling Sukses Di Abad Ke-20. Developmentalisme Berhasil Dilakukan Di Seluruh Poros Politik, Dari Fasisme Melalui Sosial Demokrasi Hingga Komunisme. Dalam Penekanan Mereka Pada Pertumbuhan Ekonomi Yang Dibangun Di Atas Produksi Massal Industri – Pada Gagasan Bahwa Hanya Tipe Tertentu Dari Struktur Ekonomi Nasional Yang Kondusif Untuk Peningkatan Kekayaan. Dengan Pertumbuhan Dan Dominasi Ekonomi Neo-Klasik Dan Neoliberalisme Ekonomi, Developmentalisme Secara Bertahap Menghilang Di Sepanjang Poros Politik, Dengan Pengecualian Asia Dan Sampai Batas Tertentu Brasil. Gagasan Developmentalisme – Dan Negara Pembangunan – Sering Disebut Sebagai Fenomena Pasca Perang Dunia Ii. Terlepas Dari Kebaruan Istilah 'Negara Berkembang' Itu Sendiri – Istilah Ini Mulai Digunakan Secara Umum Pada Tahun 1980-An – Terdapat Tingkat Kontinuitas Yang Tinggi Baik Dalam Teori Maupun Dalam Perangkat Kebijakan. Erik S. Reinert,

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

Saat ini, proses pembangunan negara melihat dan mengakui adanya dimensi lokal dengan keragaman dan heterogenitas nilai, banyaknya kepentingan, ide tentang kebijakan dan wacana tentang infrastruktur sosial-ekonomi. Dalam keadaan ini, sinergi antara pembangunan lokal dan pembangunan berkelanjutan akan menjadi lebih menonjol dari sebelumnya. Dalam kondisi tertentu, pembangunan teritorial dan lokal memiliki sifat intrinsik dan instrumental dalam proses pembangunan yang berkelanjutan.

Penguatan lokal untuk tata kelola memberikan kesempatan untuk mengandalkan dialog dan interaksi antara otoritas lokal, warga dan pemangku kepentingan lainnya dalam masyarakat dalam rangka mengidentifikasi solusi strategis untuk Agenda 2030 bagi pembangunan berkelanjutan. Sehubungan dengan itu, diperlukan kesadaran pemerintah untuk konsep yang terfokus pada kapasitas untuk pembangunan yang bersifat lokal dan kemampuan untuk mengatur konsensus di antara aktor lokal yang beragam. Kesadaran pemerintah melibatkan bentuk kerjasama - atau partisipasi - mengarah pada inovasi kelembagaan di level lokal.[5]

"The Other Canon Foundation, Norway & Tallinn University of Technology", *Estonia Working Papers in Technology Governance And Economic Dynamics*, No. 34. Download Dari Http://Hum.Ttu.Ee/Wp/Paper34.Pdf

5 David Alexander Clark et al, *The Capability Approach, Empowerment And Participation: Concepts, Methods And Applications*, (United Kingdom: Palgrave Macmillan, 2019), 391.

repo uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

Karenanya, Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai badan dunia yang mempersatukan semua bangsa, mendeskripsikan bahwa pembangunan meliputi banyak aspek dan mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Berikut adalah konsep pembangunan dari PBB sebagaimana tertera dalam laman UN Documentation Research Guide.[6]

> "Development is one of the main priorities of the United Nations. Development is a multidimensional undertaking to achieve a higher quality of life for all people. Economic development, social development and environmental protection are interdependent and mutually reinforcing components of sustainable development.
>
> "Sustained economic growth is essential to the economic and social development of all countries, in particular developing countries. Through such growth, which should be broadly based so as to benefit all people, countries will be able to improve the standards of living of their people through the eradication of poverty, hunger, disease and illiteracy, the provision of adequate shelter and secure employment for all and the preservation of the integrity of the environment.

6 Https://Research.Un.Org/En/Docs/Dev, Diakses pada 4 November 2021, 16.00.

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

> "Democracy, respect for all human rights and fundamental freedoms, including the right to development, transparent and accountable governance and administration in all sectors of society, and effective participation by civil society are also an essential part of the necessary foundations for the realization of social and people-centred sustainable development.
>
> "The empowerment of women and their full participation on a basis of equality in all spheres of society is fundamental for development."

Dalam definisi konseptual pembangunan yang dikemukakan PBB tersebut, terkandung pemberdayaan (empowerment), yang terlihat dari beberapa kata kunci yang ada di dalamnya, seperti *undertaking to achieve a higher quality of life for all people, improve the standards of living of their people,* maupun *respect for all human rights and fundamental freedoms.* Ini artinya, telah ada pengakuan dari PBB bahwa di dalam pembangunan terkandung pemberdayaan.

Strategi Bank Dunia untuk memerangi kemiskinan, dengan menekankan pemberdayaan, mengartikulasikan hubungan antara pemberdayaan dan hasil pembangunan, dan khususnya pengentasan kemiskinan. Ini adalah rangkaian analisis yang sebelumnya tidak dikaitkan dengan

repo uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

Bank Dunia. Tetapi apakah pemberdayaan berperan dalam mengurangi kemiskinan pendapatan? Banyak akademisi berpendapat bahwa pemberdayaan adalah pendorong pertumbuhan. Ada perluasan kemampuan menghasilkan produktivitas ekonomi dan perubahan social. Namun, sebelum itu dapat menjadi wacana kuat dalam pembangunan, terutama pada tingkat kebijakan, hipotesis bahwa pemberdayaan adalah sarana menuju pemerintahan progresif dan pengentasan kemiskinan harus dibuktikan secara empiris. Ada bukti yang berkembang bahwa pemberdayaan berperan penting dalam mengurangi kemiskinan pendapatan dan konsumsi. Tetapi bukti empiris terkuat yang mengaitkan pemberdayaan dengan hasil pembangunan yang positif, ada di bidang politik.[7]

Istilah pemberdayaan memiliki arti yang berbeda dalam konteks sosial budaya dan politik yang berbeda, dan tidak mudah diterjemahkan ke dalam semua bahasa. Eksplorasi istilah lokal yang terkait dengan pemberdayaan di seluruh dunia selalu mengarah pada diskusi yang hidup. Istilah-istilah ini meliputi kekuatan diri, kontrol, kemandirian, pilihan sendiri, kehidupan bermartabat sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini, kapasitas untuk memperjuangkan hak seseorang, kemerdekaan, pengambilan keputusan sendiri, kebebasan, maupun kebangkitan budaya lokal. Definisi ini tertanam dalam

7 Ruth Alsop et al, *Empowerment in Practice from Analysis to Implementation*, (USA: The World Bank, 2006), 22.

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

nilai lokal dan sistem kepercayaan. Pemberdayaan memiliki nilai intrinsik; juga memiliki nilai instrumental. Pemberdayaan relevan pada tingkat individu dan kolektif, dan dapat menjadi kekuatan ekonomi, sosial, atau politik.[8]

Lebih lanjut, Narayan[9] menjelaskan ada banyak kemungkinan definisi pemberdayaan, termasuk definisi berbasis hak. Dalam arti luas, pemberdayaan adalah perluasan kebebasan pilihan dan tindakan. Itu berarti meningkatkan otoritas dan kendali seseorang atas sumber daya dan keputusan yang mempengaruhi kehidupan seseorang. Pilihan orang miskin sangat terbatas, baik karena kurangnya aset maupun karena tidak adanya kekuatan untuk merundingkan persyaratan yang lebih baik bagi diri mereka sendiri dengan berbagai lembaga, baik formal maupun informal. Karena ketidakberdayaan tertanam dalam sifat hubungan kelembagaan, dalam konteks pengentasan kemiskinan, definisi kelembagaan pemberdayaan adalah tepat. Dalam konteks ini, pemberdayaan adalah perluasan aset dan kemampuan masyarakat miskin untuk berpartisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi, mengontrol, dan meminta pertanggungjawaban lembaga yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Karenanya, pembangunan (*development*) dan pemberdayaan (*empowerment*) kemudian beriringan, baik secara teoritis dan praksis. Dalam konteks *community*

---

8 Deepa Narayan, (ed). *Empowerment and Poverty Reduction: A Source Book*, (Washington Dc: The World Bank, 2002), 2-3.

9 Ibid, 4.

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

development, terkandung di dalamnya *community empowerment*. Dalam proses keduanya, kata kunci yang sering dikumandangkan adalah partisipasi. Pendekatan partisipatif[10] bersifat pluralistik dan memiliki konten yang kritis-radikal. Peningkatan kesadaran tentang kekuatan komunitas dan mobilisasi kemampuan diri mereka untuk perubahan melalui dukungan, pendidikan dan organisasi, dapat meningkatkan tingkat harga diri dan pemberdayaan baik pada tingkat individu maupun komunitas.

Dalam konteks pemerintah, partisipasi harus ekstensif, membawa sebanyak mungkin warga negara dalam proses partisipasi tersebut. Hal lainnya yang penting adalah adanya akuntabilitas yang harus dipastikan dengan mekanisme yang ada. Namun, kondisi ideal ini jarang terpenuhi. Akibatnya, proses pengambilan keputusan seringkali didominasi oleh kombinasi elit lokal dan fungsionaris pemerintah. Dalam tinjauan pengalaman negara-negara Afrika, sebuah studi partisipasi pembangunan yang dilakukan di Tanzania, mencatat bahwa masalah utama dengan upaya desentralisasi saat ini di benua itu, berasal dari fakta bahwa pemerintah terlalu 'asyik' dengan isu-isu teknis dan asumsi bahwa kepentingan masyarakat adalah seragam.

Hal ini mengakibatkan tiadanya fokus yang cukup pada heterogenitas sosial-ekonomi dan budaya pada masyarakat.

---

10 Anne Karin Larsen et al. (eds), *Participation in Community Work International Perspectives*, (New York: Routledge, 2014), 4.

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

Perbedaan akses terhadap tanah, tenaga kerja dan kredit yang dihasilkan dari kekuatan desa, jenis kelamin, usia dan kelas sosial cenderung diabaikan. Hal ini mengakibatkan adanya dominasi pada masayarakat oleh elit lokal dan dikucilkannya kelompok tertentu.[11]

Pendekatan pembangunan kontemporer memandang partisipasi masyarakat sebagai salah satu bahan utama untuk pengurangan kemiskinan.[12] Upaya untuk merangsang pembangunan masyarakat melalui partisipasi adalah untuk mengatasi meningkatnya kemiskinan dan ketidakberdayaan yang mengiringi wacana pembangunan modern. Maksud dari partisipasi masyarakat dalam kebijakan dan praktik pembangunan adalah untuk mendorong keterlibatan aktif individu-individu yang bekerja secara kolektif untuk mengubah kondisi bermasalah serta mempengaruhi kebijakan dan program yang mempengaruhi kualitas hidup.

Partisipasi masyarakat diasumsikan dalam lingkaran kebijakan sebagai saluran utama bagi keterlibatan aktif anggota masyarakat dalam membentuk hasil proyek pembangunan. Partisipasi masyarakat yang efektif dapat mengarah pada

---

11 S.R. Osmani, "Participatory Governance and Poverty Reduction", Di *Choices for The Poor. Lessons from National Poverty Strategies*. Alf Morten Jerve et al. (eds.), (Bergen/New York: Cmi/Undp, 2001), 131-132.

12 Patrick Osei-Kufuor et al, "Reducing Poverty Through Community Participation: The Case Of The National Poverty Reduction Program In The Dangme-West District Of Ghana", *International Journal of Development and Sustainability,* Vol. 3, No. 8 (2014), 1611.

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

pemberdayaan sosial dan pribadi, pembangunan ekonomi, dan transformasi sosial-politik. Potensi partisipasi masyarakat dalam membalikkan hubungan kekuasaan dan menyediakan hak dan suara bagi kaum miskin dicatat dengan baik dalam literatur pembangunan

Partisipasi masyarakat dalam praktik pembangunan menekankan pada keterlibatan anggota masyarakat dalam keseluruhan proses perencanaan, inisiasi proyek hingga evaluasi. Struktur partisipasi masyarakat menciptakan modal sosial untuk keterlibatan masyarakat serta memotivasi orang untuk terlibat dalam urusan komunitas mereka. Peran anggota masyarakat dalam membentuk hasil proyek pembangunan sangat penting untuk keberhasilan intervensi pembangunan dan kemungkinan untuk pengurangan kemiskinan.[13]

Partisipasi masyarakat yang sangat menonjol dalam pembangunan adalah pengentasan kemiskinan dan pembangunan pedesaan. Konsep partisipasi dan pengurangan kemiskinan membawa daya pikat optimisme tentang tujuan dan telah membentuk wacana untuk kebijakan pembangunan untuk beberapa tahun terakhir. Semakin banyak bukti bahwa partisipasi masyarakat dalam proyek-proyek pembangunan mengarah pada pengurangan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan. Secara khusus, partisipasi masyarakat memberdayakan masyarakat miskin dengan membangun kapasitas mereka

13 Ibid.

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

melalui pelatihan keterampilan untuk secara aktif terlibat dalam proses pembangunan. Pemberdayaan aktif dalam kegiatan masyarakat sering mengarah pada pemberdayaan komunitas masyarakat lokal.

Ending dari partisipasi adalah pemberdayaan.[14] Partisipasi memiliki instrumen nilai untuk pembangunan manusia yang berkelanjutan dan untuk reklamasi ruang kebijakan bagi orang miskin dan tidak berdaya agar terlibat secara aktif – diberi kesempatan – dalam membentuk diri mereka sendiri, bukan hanya sebagai penerima pasif dari buah program pembangunan. Partisipasi juga memiliki nilai intrinsik untuk kualitas hidup dan mampu melakukan sesuatu tidak hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk orang lain dari anggota masyarakat. Pendekatan kapabilitas dalam pemberdayaan masyarakat menyatakan bahwa masyarakat adalah pelaku aktif pembangunan mereka sendiri.

Hal ini menimbulkan kemungkinan memikirkan kembali modus operandi pembangunan kebijakan dan strategi, yang harus didasarkan pada serangkaian asumsi yang menerapkan etika dan keadilan. Di samping itu juga bergema kuat pada Agenda Pembangunan Berkelanjutan

14 David Alexander Clark et al, "Participation, Empowermen And Capabilities: Key Lessons And Future Challenges", Di David Alexander Clark et al. (eds), *The Capability Approach, Empowerment And Participation: Concepts, Methods And Applications*, (United Kingdom: Palgrave Macmillan, 2019), 386.

repo uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

2030. Partisipasi menggerakkan kemampuan seseorang untuk bertindak dan membawa perubahan dalam mengejar tujuan yang bernilai bagi para individu. Ini adalah kebebasan individu untuk mencapai tujuan sebagai agen yang bertanggung jawab, memutuskan dia harus mencapai dan menilai apa, yang dapat dilakukan dengan diatur oleh kelembagaan lokal dan struktur pemerintahan.

Partisipasi dan pemberdayaan saling memperkuat, karena pemberdayaan adalah proses di mana orang mendapatkan kendali atas faktor dan keputusan yang membentuk kehidupan mereka. Efek pemberdayaan dari partisipasi masyarakat dalam pengentasan kemiskinan terwujud di tingkat individu dan kolektif. Di tingkat individu, orang memberi pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan diri untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan mengadvokasi atas nama mereka sendiri dan meningkatkan kapasitas mereka secara kolektif.

Partisipasi dalam aksi kolektif memberi individu sumber daya untuk menjalankan agensi melalui suara. Pemberdayakan masyarakat melalui peningkatan kapasitas meningkatkan kemungkinan partisipasi mereka dalam kegiatan masyarakat. Peningkatan tpemberdayaan memungkinkan masyarakat untuk memiliki pengaruh atas hal-hal yang penting dan memperoleh kekuasaan atas keputusan, memungkinkan mereka untuk beralih dari non-peserta yang tidak berdaya ke peserta yang menjadi berdaya.

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

Dalam studi tentang partisipasi yang dikemukakan Bayor,[15] banyak studi menyebut bahwa partisipasi masyarakat tidak menjamin keberhasilan dan ada tidak ada metodologi yang jelas untuk partisipasi masyarakat yang berarti. Ada pengamatan bahwa bahwa dalam beberapa kasus, partisipasi tidak memiliki tujuan yang jelas dan dan pendekatannya tidak sistematis. Terdapat catatan pula bahwa partisipasi masyarakat dapat memakan waktu untuk memastikan bahwa semua pemangku kepentingan yang relevan terlibat secara memadai. Yang lain pendapat bahwa partisipasi masyarakat membutuhkan spesialisasi keterampilan dan banyak sumber daya, seperti uang tunai untuk mengatur dan menyediakan ruang bagi berlangsungnya proses partisipatif.

Untuk alasan ini, komunitas partisipasi dapat menunda dimulainya proyek, karena personel yang dibutuhkan, yang akan memfasilitasi proses, perlu direkrut, sumber daya perlu dikumpulkan dan banyak perencanaan perlu dilakukan. Bisa juga terjadi bahwa partisipan mengomunikasikan interpretasi yang salah, karena keragaman bahasa dalam suatu masyarakat. Ini bisa menjadi masalah, karena temuan dapat diinterpretasikan secara salah. Komunitas

15 Isaac Bayor, "Community Participation In Poverty Reduction Interventions: Examining The Factors That Impact On The Community-Based Organisation (CBO) Empowerment Project In Ghana", *A Mini-Thesis of Master In Public Administration In The School of Government, Faculty of Economics And Management Science, University of The Western Cape, Bellville – Cape Town, South Africa*, (June, 2010), 9.

repo uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

yang otentik dan memberdayakan partisipasi dapat memperlambat perencanaan dan pelaksanaan suatu proyek. Di saat ini terjadi, otoritas lokal bisa menjadi tidak sabar, sehingga mengabaikan proses yang mendasari partisipasi. Sebagaicontoh, buta huruf adalah faktor penghambat partisipasi masyarakat. Ini karena orang yang buta huruf mungkin terpinggirkan oleh komunikasi profesional dan teknis selama proses partisipasi komunitas.

Ada pula realitas yang dapat mengganggu partisipasi, yaitu dalam komunitas di mana orang-orang hidup dalam ketakutan mutlak terhadap pemimpin mereka. Komunitas anggota mungkin masih takut untuk berbicara secara terbuka, mengungkapkan pendapat yang berbeda, karena merugikan konsekuensi setelahnya. Realitas seperti ini harus diperhitungkan setiap kali pembangunan proyek yang akan dilaksanakan di komunitas tertentu. Ini dapat berkontribusi pada keberlanjutan proyek, terutama tidak adanya informasi yang dapat membantu orang-orang untuk menemukan cara dalam memperbaiki kehidupan mereka di masa depan.

Bagaimana paradoks partisipasi ini jika terjadi, Cleaver[16] menyebutkan 4 poin yang harus dilakukan: 1) Analisis sumber daya yang dibutuhkan orang untuk dapat berpartisipasi dalam upaya pembangunan, dan khususnya

16 Frances Cleaver, "Paradoxes of Participation: Questioning Participatory Approaches to Development, Journal of International Development", J. Int. Dev. 11, (1999), 608-609.

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

analisis yang partisipatif, pendekatan berbiaya rendah dan bermanfaat tinggi bagi orang miskin; 2) Analisis apakah dan bagaimana struktur proyek partisipatif mencakup/ melindungi/mengamankan kepentingan orang miskin; 3) Lebih banyak data tentang `kemitraan' partisipatif yang diklaim berhasil. Bagaimana dan apa peran birokrasi yang lebih baik dan lebih responsif dalam kemitraan semacam itu; 4) Analisis komunitas 'kompeten' dan proyek partisipatif yang berhasil, yang fokus pada proses, pada dinamika kekuasaan, pada pola inklusi dan eksklusi. Ini akan melibatkan lebih banyak proses dokumentasi dan analisis konflik, konsensus pembangunan dan pengambilan keputusan dalam masyarakat, bukan hanya aktivitas yang terkait untuk proyek pembangunan tertentu.

Lalu bagaimana hubungan partisipasi komunitas (*community participation*), pemberdayaan (*empowerment*) dan pembangunan komunitas (*community* development), dijelaskan oleh Bayor[17] bahwa ketiganya memiliki keterkaitan yang jelas. Praktisi pembangunan menyadari hubungan antara pembangunan komunitas dan pengembangan kapasitas masyarakat sebagai sarana praktis untuk memastikan keberlanjutan proyek pembangunan. Pemberdayaan adalah membangun kapasitas orang dengan

17 Isaac Bayor, "Community Participation In Poverty Reduction Interventions: Examining The Factors That Impact On The Community-Based Organisation (CBO) Empowerment Project In Ghana", 19.

repo uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

memanfaatkan keterampilan, pengetahuan, kemampuan, membuat mereka berkomitmen dan memberi mereka kesempatan untuk mengakses sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan apa yang harus dilakukan.

Ketika orang-orang diberdayakan, ada dampak signifikan pada banyak aspek kehidupan mereka. Pemberdayaan juga memastikan bahwa masyarakat menjadi aktif dan tertarik untuk berpartisipasi dengan apa yang sedang terjadi. Mereka mungkin juga bertanya, menantang, dan berdebat – mereka akan memperdebatkan apa yang harus dilakukan atau seharusnya dilakukan, dengan cara apa dan bagaimana, daripada mengeluh bahwa tidak ada yang akan pernah berubah. Komunitas akan lebih banyak sadar tentang hak dan tanggung jawab mereka, serta kebijakan dan program pemerintah.

Penting juga untuk dicatat bahwa pemberdayaan mendorong partisipasi masyarakat, yang merupakan syarat mutlak bagi pembangunan komunitas. Pemberdayaan membangun kapasitas orang dan meningkatkan kesadaran mereka untuk menyadari pentingnya berpartisipasi dalam isu-isu tentang pembangunan untuk mereka. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela dan demokratis dari orang-orang dalam pengambilan keputusan berkenaan dengan penetapan tujuan dan sasaran, perumusan kebijakan, melaksanakan dan mengevaluasi program-program sosial dan ekonomi, serta berkontribusi pada upaya pembangunan dan berbagi manfaat pembangunan. Pemberdayaan juga

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

mendorong mobilisasi yang efisien dari masyarakat untuk melakukan proyek pembangunan.[18]

B. Partisipasi dan Desentralisasi

Kata partisipasi berasal dari bahasa Ingris, *participation,* yang artinya *the fact that you take part or become involved in something*. Fakta tertentu dimana seseorang ambil bagian atau terlibat di dalam suatu peristiwa tertentu.[19] Apabila ada seseorang yang terlibat dalam satu tindakan tertentu, apalagi tindakan tersebut bersifat kolektif, maka ia dapat dikatakan telah berpartisipasi di dalamnya. Tindakan ini bisa berupa program pemberdayaan masyarakat, yang digalang oleh pemerintah maupun yang diinisiasi oleh masyarakat secara swadaya. Terlibat di dalam program pemberdayaan tersebut sudah bisa disebut berpartisipasi.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata partisipasi ini diartikan sebagai perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan; keikutsertaan; peran serta. Sedangkan berpartisipasi berarti melakukan partisipasi; berperan serta (dalam suatu kegiatan); ikut serta.[20] Dengan begitu, penggunaan kata partisipasi bisa sajajar dengan arti-arti yang sepadan, seperti berperan serta, ikut serta, keterlibatan,

18 Ibid.

19 Cambridge, "Participation," dalam https://dictionary.cambridge.org/, akses 17 November 2021.

20 KBBI, "Partisipasi," dalam https://kbbi.web.id/, akses 17 November 2021.

repo uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

atau proses belajar bersama untuk saling mengerti satu sama lain, menganalisis, merencanakan dan melaksanakan tindakan bersama yang akan dilakukan oleh beberapa anggota masyarakat.

Mengingat partisipasi menyangkut keterlibatan seseorang maka partisipasi bisa menjadi objek/target penggalangan. Yaitu, tindakan mengajak individu-individu maupun kelompok untuk berpartisipasi dalam kegiatan bersama, dengan dilandasi adanya pengertian bersama, tujuan dan visi yang sama, dan setiap orang dapat saling berkomunikasi, saling berinteraksi antar sesamanya, sepanjang proses mewujudkan kepentingan bersama mereka. Partisipasi dan penggalangan menjadi tidak terpisahkan satu sama lain.[21]

Begitu upaya penggalangan partisipasi dari semua pihak dilakukan maka ada banyak aspek lain yang harus diperhatikan, antara terwujudnya nuansa yang bebas atau demokratis. Penggalangan tidak dapat dilakukan dengan kekerasan, manipulasi, atau ketidakjujuran yang merugikan setiap anggota. Selain itu, partisipasi meniscayakan adanya keterpaduan suara untuk membangun nilai-nilai kebersamaan.[22] Partisipasi masyarakat dalam kegiatan tertentu, program pembangunan

21 Inge Horton, *Citizen Participation in a Voluntary Community Organization: A Case Study of Motives of Middle-class Participants*, (Berkeley: University of California, 1979), 43.

22 Victor H. Vroom, *Some Personality Determinants of the Effects of Participation,* (London: Routledge, 2019), 1-10.

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

atau pemberdayaan tertentu, harus dilakukan atas nama demokrasi. Keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan, misalnya, adalah keikutsertaan mereka dalam kegiatan-kegiatan pembangunan secara sukarela, tanpa paksanaan, dan karenanya, mereka pun berhak untuk ikut memanfaatkan atau menikmati hasil-hasil pembangunan yang dikerjakan.[23] Ini berkaitan erat dengan prinsip politik kesetaraan.

Ada tiga tradisi konsep partisipasi yang terutama dan menonjol. Terbentuknya tiga kategori tersebut bila dikaitkan dengan pembangunan masyarakat yang demokratis itu sendiri. Pertama, partisipasi politik (*political participation*), kedua, partisipasi sosial (*social participation*), dan ketiga, partisipasi warga (*citizen participation/citizenship*).[24] Partisipasi politik yang dimaksud di sini adalah sebuah partisipasi dari seseorang atau kelompok dalam tindakan-tindakan yang lebih berorientasi politis, yaitu kecenderungan untuk mempengaruhi dan mendudukan wakil-wakil rakyat yang mereka pilih untuk duduk di jajaran dewan pemerintahan dalam membuat kebijakan politik.

---

23 Sidney Verba, Norman H. Nie and Jae-on Kim, *Participation and Political Equality: A Seven-Nation Comparison*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1978), 46 dan 157.

24 Tom van der Meer, Manfred te Grotenhuis and Peer Scheepers, "Modes of citizens' participation: associations between and determinants of social, civic, and political participation in cross-national perspective," dalam Beckers T., Birkelbach K., Hagenah J., Rosar U. (eds), *Komparative empirische Sozialforschung*, (VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2010), 259-283

repo uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

Sementara partisipasi sosial adalah dimensi lain yang jauh dari ranah kekuasaan dan politik, melainkan condong sebagai kubu di luar proses kekuasaan. Misalnya, partisipasi seseorang program pembangunan dan pemberdayaan, ia tidak harus menjadi bagian dari pemerintahan, tidak harus menjadi wakil rakyat, tetapi cukup berperan serta atau terlibat aktif dalam diskusi-diskusi publik, yang melahirkan pemikiran dengan dampak besar, misalnya mulai dari proses penetapan keputusan rencana pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah, memberikan pertimbangan akan kebutuhan yang harus dipenuhi pemerintah, sampai urusan memberikan penilaian, implementasi, peninjauan dan evaluasi.

Dengan begitu, partisipasi sosial dilaksanakan untuk mempererat proses pembelajaran dan aktivasi sosial. Partisipasi sosial tidak terletak pada pembuatan kebijakan publik itu sendiri, tetapi implikasi dari sebuah komunitas atau indivitu tertentu terhadap proses pembuatan kebijakan publik. Partisipasi sosial tidak harus berada di jajaran pemerintahan, tetapi cukup menjadi wahana pembelajaran dan mobilisasi massa.

Terakhir, partisipasi warga (citizen participation / citizenship). Pengertian partisipasi warga ini lebih menitikberatkan pada sisi keikutsertaan langsung seorang warga dalam proses penetapan keputusan atau kebijakan pemerintah yang diformulasikan di lembaga dewan atau proses-proses pemerintahan lainnya. Namun, seorang warga di sini tidak harus menjadi politisi yang memang

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

mendapat mandat untuk merumuskan berbagai kebijakan politik. Seorang warga tetap menjaga identitasnya sebagai warga biasa, tetapi sangat penting kehadirannya bagi para pembuat kebijakan politik, bahkan kehadirannya yang diharapkan itu adalah kehadiran sebagai seorang warga, bukan politisi.[25]

Untuk mempermudah pemahaman tentang teori partisipasi ini, perhatikan gambar berikut

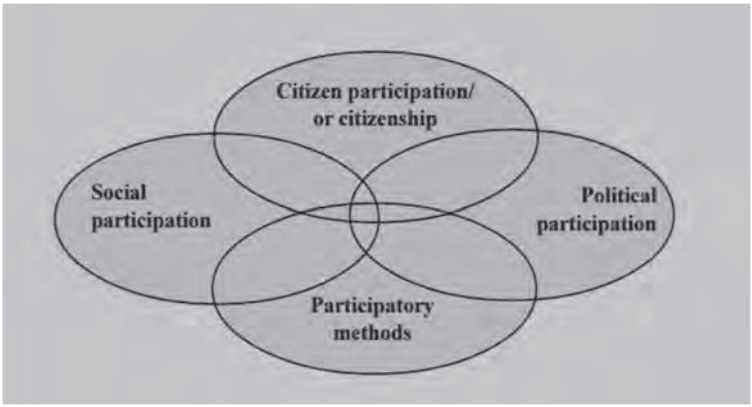

Gambar 1. Diagram Teori Partisipasi
Sumber : Gaventa dan Valderrama, 1999

Dengan begitu, konsep Partisipasi Warga ini telah mengubah konsep partisipasi yang selama ini hanya fokus pada penerima derma atau 'kaum tersisih'. Lebih dari

25 Richard Worthington, Mikko Rask dan Lammi Minna, *Citizen Participation in Global Environmental Governance,* (New York: Earthscan, 2013), 17-25.

repo uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

itu, bermacam macam pola keikutsertaan warga dalam penyusunan kebijakan dan penetapan keputusan, di berbagai medan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan mereka, menjadi perhatian utamanya. Jadi, partisipasi warga tidak saja dengan partisipasi politik, karena aktor-aktornya tidak harus terjun ke pemerintahan langsung, namun juga tidak sama dengan partisipasi sosial yang dimensinya berada di luar kekuasaan. Partisipasi Warga memang lebih mengarah pada rencana penetapan kebijakan umum oleh warga sendiri, dibandingkan menjadikan gelanggang kebijakan publik sebagai wahana pembelajaran. Artinya, peran dan fungsi warga sangat besar.

Kecondongan untuk meningkatkan peran dan fungsi warga itu tidak lepas dari situasi besar berupa upaya desentralisasi kekuasaan. Selama tahun 1990-an telah terjadi perubahan besar di dunia, yaitu adanya dorongan besar menuju desentralisasi demokratis. Upaya desentralisasi ini dirancang untuk meningkatkan partisipasi rakyat dalam pemerintahan lokal. Sebagian besar negara berkembang telah melakukannya. Hal ini merupakan sebuah permulaan yang begitu aktual, dan potensi yang sangat besar, untuk membuka pintu peluang baru dalam rangka meningkatkan partisipasi warga. Undang-undang desentralisasi demokratis memang bervariasi dari satu negara ke negara lain, tetapi sebagian besar mengarah pada mekanisme baru dimana partisipasi warga di negara tersebut sangat besar. Warga diberi kesempatan melalui payung hukum untuk berhubungan langsung dengan negara melalui bentuk

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

konsultasi dan keterlibatan. Bentuk partisipasi dan mekanisme baru ini sangat berbeda dari bentuk pemungutan suara dan pengaruh tradisional terhadap pemerintah daerah melalui partai politik.[26]

Pertanyaan yang paling penting hari ini di mata para pengamat adalah tentang apakah undang-undang baru ini betul-betul berhasil menciptakan peluang dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan, jika demikian, melalui sarana apa. Dalam semua literatur tentang desentralisasi demokratis, setidaknya ada dua hal yang menonjol. Yang pertama adalah ketidakhadiran pada setiap diskusi nyata tentang partisipasi, dan yang kedua adalah persoalan partisipasi dibahas dalam bingkai keprihatinan terhadap hambatan luar biasa yang akan mencegahnya menjadi kenyataan. Artinya, partisipasi warga yang gagal ditandai dari tidak terealisasinya harapan mereka karena kendala-kendala tertentu.[27]

Para pengamat partisipasi rakyat dalam politik desentralisasi memang tampak lebih memperhatikan kegagalan janji politik daripada kemungkina keberhasilannnya. Hal itu dilatarbelaknagi oleh sejumlah alasan, antara lain:

a) Hubungan kekuasaan. Lembaga pemerintah cenderung

26 Nancy C. Roberts, *The Age of Direct Citizen Participation*,(London: Routledge, 2015), 3-18.

27 John H. Strange, "Citizen Participation in Community Action and Model Cities Programs," dalam Nancy C. Roberts, *The Age of Direct Citizen Participation*,(London: Routledge, 2015), 124.

repo uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

menghalangi partisipasi warga negara saat mereka menjalankan fungsi kontrol atas sifat dan struktur partisipasi warga, baik di tingkat pusat maupun daerah;

b) Organisasi warga. Kurangnya lembaga milik masyarakat yang terorganisir dengan baik, dan masyarakat sipil yang dinamis sering menghambat partisipasi warga yang berkelanjutan dan efektif; terjadi pergesekan terus-menerus yang menghambat keterlibatan semua warga;

c) Keterampilan partisipatif. Terlalu banyak keterampilan, pengetahuan, pengalaman, kepemimpinan dan kapasitas manajerial di berbagai tingkatan yang kurang maksimal, sehingga membatasi partisipasi warga negara;

d) Tingkat partisipasi. Sebagian besar kerangka hukum untuk meningkatkan partisipasi rakyat di banyak negara lebih bersifat konsultatif, dan ruang formal untuk meningkatkan partisipasi masyarakat tidak banyak digunakan;

e) Sumber daya keuangan tingkat lokal yang tidak mencukupi. Hambatan ini berasal dari kontrol sumber daya keuangan yang sebagian besar dimiliki oleh lembaga pemerintah pusat, diperparah oleh ketidakmampuan lembaga lokal memaksimalkan tindakan mobilisasi sumber daya lokal, karena alasan teknis dan politik.[28]

---

28 John Gaventa, "Strengthening participation in local governance: workshop overview," dalam Camilo Valderrama and Kate Hamilton, *Report of the Workshop*, (Institute of Development Studies Sussex, 21-24 June 1999), 3-5.

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

Banyaknya hambatan di atas tergantung dari semakin luas dinamika partisipasi di dalam pemerintahan. Walaupun sudah dianggap sebagai masalah, tetapi kenyataannya sering kali semua masalah itu tidak ditangani secara sistematis atau mendalam. Namun begitu, ada kenyataan lain, yaitu banyak orang yang bekerja dengan cara yang sangat menarik untuk mengatasi segala hambatan yang disebutkan di atas. Banyak praktik baru bermunculan di seluruh dunia. Praktik-prakti baru di belahan dunia ini memungkinkan untuk melihat bagaimana partisipasi warga dan bentuk kewarganegaraan dapat diperkuat.[29]

Dari penjelasan di atas, kita tahu bahwa ada tiga ragam partisipasi masyarakat: pertama, Partisipasi Politik yang melibatkan individu dan kelompok untuk mempengaruhi kebijakan pembangunan. Dalam konteks daerah, partisipasi jenis ini bisa berupa institusi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Posisi Institusional adalah sebuah jabatan yang efektif dalam mempengaruhi kebijakan, berada dalam lingkaran kekuasaan, tetapi bukan sebagai pelaksana kebijakan. Posisi ini biasanya diperankan oleh wakil rakyat dalam lembaga perwakilan. Posisi institusional ini bukan posisi individu atau kelompok yang menyuarakan aspirasi rakyat dari luar lingkaran kekuasaan.

Kedua, Partisipasi Sosial, yang lebih didominasi oleh individu dan/atau kelompok yang menyuarakan aspirasi

29 Ibid.

repo uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

rakyat dari luar lingkaran kekuasaan, di luar struktur pemerintahan. Bentuk-bentuknya bisa berupa lini konsultasi publik, seminar, FGD, pendampingan, demonstrasi. Paparan hasil penelitian atau monev juga bisa dikategorikan masuk partisipasi sosial. Tujuan utama partisipasi sosial adalah membangun opini publik, memberikan koreksi, evaluasi, penyeimbang, atas wacana dari lingkungan pemerintah. Partisipasi sosial juga bisa menjadi support pendukung bagi kebijakan pemerintah. Bagi masyarakat, partisipasi sosial ini berfungsi edukasi tentang kebijakan dan program pembangunan pemerintah. Dengan begitu, dampak merugikan kebijakan pemerintah dapat diminimalisir melalui partisipasi sosial ini.

Ketiga, Partisipasi Warga, yang berbeda dari dua jenis partisipasi sebelumnya, partisipasi warga lebih menekankan pada voluntarisme atau kesukarelawanan, yaitu partisipasi warga yang secara sukarela membantu masyarakat maupun warga dalam proses pembangunan. Ini menjadi keunggulan, karena kata kuncinya ada pada panggilan jiwa masing-masing individu atau kelompok untuk berbuat dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Partisipasi Warga juga berbeda dari partisipasi politik, karena sejak awal tidak punya orientasi politik.

Namun, dalam praktiknya, partisipasi warga ini harus bernuansa politik, karena terlibat dan tidak dapat menghindari kepentingan politik. Karena politik bukan orientasi utamanya, melainkan efek samping, maka

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

independensi warga adalah ciri dari jenis partisipasi ini. Partisipasi Warga adalah pilar masyarakat madani (*civil society*) yang independen. Keberhasilan membangun masyarakat yang independen, kadang pemerintah memberikan apresiasi dan reward. Dalam konteks pemberdayaan, aktor-aktor yang terlibat dalam partisipasi warga ini disebut sebagai pemimpin lokal (*local leader*).

Ini adalah beberapa tema konseptual yang luas, hambatan yang telah diidentifikasi, dan pekerjaan baru yang mulai bermunculan. Ini juga beberapa pertanyaan yang muncul dari kesenjangan dalam literatur yang telah kami amati. Kami tidak tahu jawaban untuk banyak dari ini pertanyaan karena pekerjaan di bidang ini sangat baru dan kami perlu mengembangkannya lebih lanjut. Harapannya adalah dua hari ke depan dan kerja sama berikutnya akan membantu kami mulai mengatasi beberapa masalah besar ini dan pertanyaan kompleks.

C. Lingkup, Level dan Indikator Partisipasi

Berikutnya adalah penting membahas partisipasi masyarakat ini dalam tiga kategori: Lingkup, level dan Indikator Partisipasi. Bahasan ini akan menjalan jalan untuk memotret partisipasi masyarakat Samin dan Tengger. Setidaknya, ada empat hal yang penting dalam pemetaan tahapan partisipasi; perencanaan, pengerjaan, pemerintaan, dan aksi. Secara garis besar, ruang lingkup partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa setidaknya meliputi

repo uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

empat hal utama, yaitu PDCA. Untuk lebih jelasnya lihat bagan di bawah ini

Gambar 2. Ruang Lingkup Partisipasi dalam Pembangunan Desa
Sumber : Penulis, 2021

1. Lingkup Partisipasi

Yang dimaksud dengan lingkup partisiapasi adalah proses demi proses yang bisa ditempuh untuk melakukan partisipasi itu sendiri, atau mewujudkan partisipasi warga dalam kegiatan politik pembangunan. Setidaknya, ada empat hal yang penting dalam pemetaan tahapan partisipasi; perencanaan, pengerjaan, pemerintaan, dan aksi.

a) Perencanaan (*Planning*)

Pembangunan melalui keikutsertaan masyarakat melambangkan salah satu usaha bersama, khususnya pemerintah, untuk mengembangkan potensi masyarakat dalam mempersiapkan pembangunan. Lazimnya,

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

pembangunan ini berhubungan dengan kapasitas sumber daya lokal, yang dilakukan berlandaskan hasil musyawarah, yakni keinginan dan kebutuhan riil yang ada dalam masyarakat. Dukungan dan peran-serta kelompok masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan adalah inti dari partisipasi, dan karenanya, kita harus merencanakan kemajuan rasa-memiliki pada diri kelompok masyarakat tersebut, yaitu perasaan betul-betul bertanggung jawab terhadap program kegiatan yang telah disusun bersama, disepakati bersama, demi tujuan bersama.[30]

Prinsip kerja pembangunan melalui partisipasi masyarakat adalah sebagai berikut: pertama, kegiatan kerja diinfokan secara transparan kepada masyarakat dengan melakukan interaksi partisipatif hingga memperoleh dukungan masyarakat. Kedua, kegiatan kerja dilakukan lewat kerjasama dan kerja bersama kelompok antara masyarakat, pejabat desa dan seantero warga dalam rangka mempersempit kendala dalam kegiatan. Ketiga, kegiatan kerja tidak condong pada kubu tertentu di masyarakat atau kelompok hingga tidak memancing perpecahan. Keempat, selama kegiatan berlangsung, sinkronisasi selalu dilaksanakan secara vertikal maupun horizontal. Kelima, tidak bersikap superior atau merasa paling tahu dalam setiap kesempatan pelaksanaan program kerja. Keenam,

30 Henry Sanoff, *Community Participation Methods in Design and Planning*, (New Jersey: Wiley, 1999), 13.

repo uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

tidak memberikan janji kepada siapapun namun keseriusan kerja dalam konteks program kerja yang sudah ditentukan.

Upaya membangun komunitas (*Community Development*) tidak dianjurkan menggunakan metode kerja *doing for the community,* yang lebih menekankan pada loyalitas semua pihak kepada satu pihak dalam segala kegiatan pembangunan. Sebaliknya, upaya membangun komunitas ini dianjurkan mengadaptasi metode kerja *doing with the community,* yaitu kerja bersama, gotong royong, bahu-membahu. Metode kerja *doing for* akan merubah masyarakat menjadi pasif, kurang produktif, tidak kreatif dan tidak berdaya, bahkan mengajarkan masyarakat untuk selalu terikat pada bantuan pemerintah atau organisasi-organisasi sukarela pemberi bantuan. Sementara cara kerja *doing with* sangat selaras dengan ide besar KI Hajar Dewantara tentang kepemimpinan pendidikan di Indonesia, *ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, dan tut wuri handayani* yang berfokus akan perlunya kemandirian yang partisipatif di dalam proses pembangunan.[31]

Dalam membuat perencanaan, sebuah strategi tetap dibutuhkan, agar perencanaan yang melibatkan partisipasi masyarakat berjalan lancar Beberapa metode penguatan partisipasi masyarakat mulai dikembangkan, misalnya di India, Filipina, Bangladesh dan Nepal. Dari pengalaman negara-negara berkembang ini, ada sejumlah strategi yang

31 Husaini Usman, *Kepemipinan Efektif: Teori, Kepemimpinan, dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2019), 92

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

sering dipakai untuk mengatasi hambatan yang mencegah partisipasi masyarakat dalam pemerintahan, antara lain: Perencanaan Partisipatif; Pendidikan Warga dan Pembangunan Kesadaran; Pelatihan dan Kepekaan Pejabat; Advokasi, Aliansi dan Kolaborasi; Penganggaran Partisipatif; dan Mempromosikan Akuntabilitas Pejabat Terpilih kepada Warga Negara. Strategi-strategi ini sebagian besar tidak ada dalam literatur formal, terutama dalam praktik. Satu dari harapan kami adalah untuk mulai membagikannya secara lebih luas.[32]

Menurut John Gaventa, kita semua penting untuk melihat dinamika partisipasi maupun pendekatannya, untuk mewujudkannya menjadi tindakan nyata yang membawa manfaat. Di dalam kaitannya dengan dinamika partisipasi, beberapa pertanyaan penting yang harus dijawab:

a) Akankah desentralisasi demokratis benar-benar memberikan ruang bagi suara dan pengaruh yang lebih kuat? Atau apakah itu akan menjadi jendela peluang yang akan ditutup dengan sangat cepat?
b) Bagaimana kita benar-benar memahami konsep partisipasi kewarganegaraan ini? Apakah itu mewakili cara baru untuk menghubungkan ranah sipil dan politik secara konseptual?
c) Apa saja hambatan dan kondisi yang memungkinkan

32 John Gaventa, "Strengthening participation in local governance: workshop overview," 3-5.

repo uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

untuk memperkuat partisipasi rakyat? Siapa adalah aktor kunci dan apakah mereka termasuk yang lebih rentan dan terpinggirkan?

d) Apakah kewarganegaraan menjadi hak dan tanggung jawab di semua tingkatan atau hanya sedikit?

e) Apa konsekuensi dari peningkatan partisipasi? Apakah itu benar-benar membuat perbedaan? Melakukan itu mengubah kebijakan atau pemberian layanan? Apakah itu menangani masalah korupsi dan efisiensi?[33]

Proses pelaksanaan dan penyelenggaran pemerintah mengamanatkan bagaimana membangun untuk kepentingan masyarakat, sehingga akan tercipta keadilan dan kesejahteraan sebagai upaya pemerintah mendapatkan legitimasi dan kepercayaan dari masyarakat. Legitimasi pemerintah akan membawa kemajuan bagi masyarakat dalam segi pemanfaatan hasil pembangunan untuk kehidupannya sesuai dengan perkembangan jaman.[34] Dengan kata lain, apabila masyarakat atau rakyat percaya pada pemerintah, terlibat aktif dalam program pembangunan, dan berpartisipasi di berbagai dimensi, maka saat itulah negara akan kuat-legitimit.

Untuk mendapatkan ligitimasi dan kepercayaan masyarakat ada 2 (dua) hal yang perlu dilakukan oleh

33 Ibid.

34 Winantuning Tyastiti Swasanany, "Mengembalikan Kepercayaan Publik terhadap Parlemen: Pengalaman Indonesia," dalam https://www.dpr.go.id/, akses 18 November 2021.

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

pemerintah, yaitu sebagai berikut: pertama, mampu menyerap aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat, dan sangat peduli pada kebutuhan masyarakat. Kedua, mampu melibatkan kemampuan dan motivasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan sesuai ketersediaan sumberdaya lokal. Hal ini diartikan bahwa pemerintah perlu memposisikan rakyat sebagai pelaku pembangunan, bukan sekedar sebagai objek pembangunan. Dua langkah di atas pada dasarnya adalah untuk membangun kepercayaan politik, sebagai tali pengikat antara rakyat dan institusi pemerintah yang mewakili aspirasi mereka. Jika partisipasi dan aspirasi itu tertampung dengan baik, dan melahirkan program pembangunan yang pro rakyat, maka otomatis akan meningkatkan legitimasi dan keefektifan dari pemerintah yang demokratis."[35]

Pembangunan masyarakat akan berhasil, jika peran partisipatif masyarakat dan pemerintah sangat jelas sebagai subyek dan obyek dari pembangunan. Pembangunan pada teknologi menjelaskan peran pemerintah semakin berkurang dengan hadirnya teknologi yang dapat diakses secara cepat dan tepat oleh masyarakat tentang hasil-hasil pembangunan, sehingga hal ini menjadi model yang perlu dikembangkan oleh pemerintah dalam mereduksi kepentingannya dalam pembangunan masyarakat. Pelibatan masyarakat dalam

35 M. Hetherington, "The Political Relevance of Trust," *American Political Science Review*, Vol. 92, No. 4 (1998), 791-808.

repo uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

pembangunan nasional akan menghasilkan masyarakat yang mandiri dan teruji kapasitasnya sebagai pengguna dan perencana pembangunan. Pada proses pembangunan nasional sesuai teknologi 4.0 dengan hadirnya pemerintah dan masyarakat dalam berkerjasama akan dapat mencapai hasil pembangunan secara optimal, karena perencanaan dan pengendalian serta evaluasi akan berjalan seiring sesuai dengan tahapan pembangunan.

Sebaliknya, legitimasi dari pemerintah bisa berada dalam bahaya jika sebagian besar rakyat tidak mempercayai pemerintahnya untuk jangka waktu yang lama, tidak terlibat dalam program pembangunan apapun, sehingga negara mengarah pada bentuk yang otoriter. Hal ini akan memicu ketidakpuasan rakyat, yang mengarah pada pelanggaran hukum dan dukungan terhadap pihak radikal (anti demokrasi).[36] Pembangunan masyarakat yang tidak memposisikan masyarakat sebagai subyek hanya akan melahirkan produk-produk pembangunan baru yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapai masyarakat sehingga akan kurang berarti bagi masyarakatnya. Demikian pula sebaliknya, tanpa adanya peran dan pengendalian serta evaluasi yang optimal dari pemerintah, pembangunan tidak akan berjalan secara teratur dan tidak terarah, yang akhirnya akan menimbulkan permasalahan baru.

36 R. Erber and Lau R., "Political Cynicism Revisited", *American Journal of Political Science*, Vol. 34, No. 1 (1990), 263-53.

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan sangat membutuhkan metode dan strategi yang baik agar hasil pembangunan akan lebih efektif dan efisien. Penyusunan dan penggunaan metode serta strategi pembangunan akan menentukan peran dari masingmasing stakeholder apakah peran masyarakatmaupun peran pemerintah dalam merencanakan dan mengimplementasikan hasil pembangunan, sehingga kedua pihak mampu berperan secara optimal dan sinergis.

Amanat Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang perencanaan pembangunan nasional dan pelaksanaannya harus berorientasi secara button up melalui pelibatan masyarakat secara luas. Pemberian wewenang kepada masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat daerah seyogyanya akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat, sehingga akan mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi.[37]

Melalui pelibatan masyarakat, maka pemerintah akan mampu menyerap aspirasi masyarakat secara holistik sesuai dengan perencanaan yang sudah dilaksanakan. Metode pembangunan nasional melalui pemberdayaan masyarakat adalah menjadikan masyarakat sebagai subyek dalam pelaksanaan pembangunan, karena hal ini sesuai dengan kemajuan teknologi yang menghendaki adanya

37 Kemenkeu, "UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah," dalam http://www.djpk.kemenkeu.go.id/, akses 18 November 2021.

repo uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

partisipasi masyarakat melalui penggunaan media sosial secara arif dan bijaksana untuk membantu pemerintah dalam menggerakkan pembangunan nasional. Metode perencanaan partisipatif dalam pembangunan masyarakat dipengaruhi oleh potensi masyarakat dalam merencanakan pembangunan, potensi tersebut antara lain; karakteristik, motivasi, kompetensi dan kemandirian masyarakat.

Potensi individu masyarakat ini berperan penting dalam menentukan arah dan strategi pembangunan, sehingga pemerintah akan menilai sejauhmana hasil implementasi pembangunan sesuai dengan kinerja masyarakat dalam perencanaan secara partisipatif.

b) Pengerjaan (*Participation by Doing*)

Setelah melakukan perencanaan dengan baik, untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam sebuah program pembangunan pemerintah, tahap berikutnya adalah pengerjaan (*participation by doing*). Partisipasi dengan mengerjakan sesuatu itu adalah bentuk dari interaksi sosial dalam kegiatan sehari-hari, dan itu mencakup segaa dimensi kehidupan manusia. Sebuah penelitian mengangkat topik penyandang penyakit Skizofrenia. Menurut penelitian ini, penyakit tersebut berdampak pada fungsi sosial dan partisipasi semua elemen dalam kehidupan sehari-hari.

Namun, ada penelitian terbatas yang menggambarkan bagaimana orang dengan skizofrenia berinteraksi dengan orang lain saat melakukan aktivitas sehari-hari. Ternyata,

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

orang-orang dengan skizofrenia berinteraksi dengan orang lain saat melakukan aktivitas sehari-hari dalam konteks yang berbeda, baik faktor yang memfasilitasi maupun yang menghambat. Penelitian ini menarik kesimpulannya, bahwa jika faktor kontekstual yang memfasilitasi dapat dipertimbangkan dengan baik, tepatnya ketika individu merencanakan dan melakukan kegiatan sehari-hari bersama dengan orang lain, maka ada kemungkinan meningkatkan keterampilan interaksi sosial mereka, dan dengan demikian, setiap individu akan partisipasi aktif.[38]

Sebuah penelitian lain yang masih seputar *participation by doing* dilakukan oleh Nathalis G Wamba. Ia mencontohkan proyek Kwithu yang dimulai ketika ada seorang sukarelawan mau bergabung dengan Kwithu, yaitu sebuah organisasi berbasis komunitas di Mzuzu, Malawi (Afrika). Tujuan organisasi ini adalah untuk mengajar bahasa Inggris, memberikan tes diagnostik, kepada kelompok secara acak yang terdiri dari empat puluh siswa kelas 7 dan 8 (20 laki-laki dan 20 perempuan). Organisasi menemukan bahwa kebanyakan dari mereka hampir tidak bisa membaca atau menulis dalam bahasa Inggris.

Hasil tes mendorong Maureen, direktur dan salah satu pendiri Kwithu, dan para guru bertemu dengan kepala sekolah dari tiga sekolah yang sebagian besar dihadiri oleh

38 Maria Yilmaz, etc., "Participation by doing: social interaction in everyday activities among persons with schizophrenia," *Scand J Occup Ther,* Vol. 15, No. 3 (2008), 162-72.

repo uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

anak-anak Kwithu. Kepala sekolah menghargai keprihatinan tentang kemampuan bahasa Inggris anak-anak, tetapi mereka menyarankan untuk fokus pada hal-hal yang lebih mendesak, jika benar-benar ingin membantu, misalnya, kurangnya bahan pengajaran dan pembelajaran, kurangnya air mengalir di sekolah, kelaparan, kualifikasi guru, dan lain-lain yang lebih kontekstual. Saran ini mengubah tujuan awal dari semua ingin memberikan pengajaran bahasa Inggris menjadi proyek aksi partisipatif berbasis masyarakat, yang dirancang untuk mengatasi kondisi sekolah di Luwinga. Tindakan partisipatif berbasis masyarakat ini adalah contoh proses partisipasi *by doing*.[39]

Ini artinya, partisipasi harus mempertimbangkan konteks, situasi dan kondisi, dengan baik. Begitu pun pemerintah yang ingin melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, mereka harus melihat konteks yang berkembang, baik itu berupa potensi lokal yang ada, kualitas sumber daya manusia yang tersedia, serta kebutuhan-kebutuhan mendesak yang dihadapi. Bila semua konteks ini dipertimbangkan dengan baik, maka partisipasi masyarakat dapat digalang dengan mudah.

c) Pemeriksaan (*Checking*)

Tahapan ketiga adalah proses pemeriksaan (*checking*). Tahapan ketika ini sejatinya tentang pengukuran. Mengukur

39 Nathalis G Wamba, "The challenges of participation in doing community-based participatory action research: Lessons from the Kwithu Project," *Action Research,* Vol. 15, No. 2 (2017), 198-213.

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

tingkat partisipasi adalah satu tahapan penting yang juga menentukan perencanaan partisipasi. Partisipasi idelanya memang suatu pemberdayaan masyarakat, yang dilibatkan secara langsung mulai dari tahap perencanaan sampai pada evaluasi. Akan tetapi, kebanyakan yang sekarang ditemui, partisipasi tidak melibatkan masyarakat. Seringkali masyarakat hanya dilibatkan sebagai objek, bukan sebagai subjek. Artinya, masyarakat ikut serta dalam suatu program, akan tetapi hanya menjalankan dan mengikuti program yang sudah diperintahkan, tanpa memikirkan apa yang telah mereka lakukan. Masyarakat seolah-olah hanyalah sebagai aktor yang lemah, sehingga hanya perlu menunggu intruksi yang dibuat. Partisipasi juga seringkali hanya sebagai formalitas demi terwujudnya suatu program kebijakan.[40]

Ayu Ningtyas Larasati dalam sebuah hasil penelitiannya membincang tingkatan partisipasi sebagai suatu yang penting, berbanding lurus dengan adanya program-program kebijakan pemerintah, terutama Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan. Dalam program tersebut sangat menekankan partisipasi masyarakat. Masyarakat diharapkan mampu berpartisipasi secara aktif. Akan tetapi, bentuk partisipasi seperti apa yang kemudian menjadi indikator keberhasilan dari suatu program, atau jangan-jangan partisipasi hanya suatu kata-kata pelengkap yang indah, sehingga seolah-olah kebijakan

40 Tatang M. Amirin, "Membedah Konsep dan Teori Partisipasi serta Implikasi Operasionalnya dalam Penelitian Pendidikan," *Dinamika Pendidikan*, Vol. 12, No. 01, (2003), 78-96.

repo uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan kebijakan yang dikeluarkan pun seolah-olah memang pro terhadap masyarakat. Semua itu perlu ada pengukuran yang jelas.[41]

Dengan demikian, pada tahapan checking atau pemeriksaan ini, wacana partisipasi masyarakat tidak boleh sekedar formalitas, untuk memenuhi kewajiban moril atau administratif tertentu, melainkan harus betul-betul menyentuh jantung substansi peran masyarakat dalam pembangunan. Partisipasi yang sekedar lipstik atau pemanis saja tidak akan menghasilkan output yang maksimal, bahkan tidak mencerminkan spirit demokratis dan desentralisasi kekuasaan.

d) Aksi (*Actuating*)

Tahapan terakhir adalah aksi (*actuating*). Sebuah penelitian dilakukan oleh Muhammad Febrianza da Sutinah tentang dimensi pengemudi dalam pelaksanaan program rumah tidak layak huni di Kota Palembang. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa berdasarkan dimensi perencanaan, terbatasnya anggaran yang dimiliki pemerintah jika dibandingkan dengan Mobilisasi,

41 AYU NINGTYAS LARASATI, "Mengukur Tingkat Partisipasi di Desa Patalan (Studi mengenai Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di LKM Karya Buana Desa Patalan, Jetis, Bantul, Yogyakarta)," *Skripsi*--ILmu Pemerintahan Universitas Gajah Mada, 2014.

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

sosialisasi yang dilakukan belum maksimal, masyarakat cukup antusias mengikuti program rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kota Palembang. Masyarakat berpartisipasi aktif dalam membangun rumah mereka sendiri. Namun, pembangunan dilakukan cukup lambat, karena kurangnya keahlian dan karena kesibukan masyarakat mencari nafkah. Untuk mengatasi hal tersebut perlu adanya motivasi kepada masyarakat untuk melaksanakan pembangunan rumahnya, termasuk pemberian upah.[42]

Artinya, implementasi program yang sudah diikuti oleh masyarakat sendiri belum boleh sepenuhnya dilepaskan dari peran pemerintah. Dalam mengaktualisasikan program pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat, pemerintah tetap harus terus hadir. Sebab, kondisi lapangan belum bisa dipastikan sejalan dengan perencanaan di atas kertas. Pandangan lain yang senada juga mengatakan bahwa peran pemerintah untuk meningkatkan partispasi masyarakat dalam pembangunan sangat penting.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa pemerintah harus melakukan upaya dan perannya, seperti mengajak masyarakat untuk ikut dalam berbagai kegiatan dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sesuai dengan isi, tujuan, dan maksud dari setiap program-program pembangunan yang

42 Muhammad Febrianza dan Sutinah, "Analysis of The Actuating of The Rehabilitation Program House is not Unitable in Palembang City," *Journal of Public Administration Studies*, Vol. 5, No. 2 (2021), 56-61

repo uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

ingin dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawabnya dan masyarakat sebagai faktor pendukungnya dinyatakan kurang baik bila dilihat dari rendahnya partisipasi masyarakat. Tidak saja itu, pemerintah dalam melaksanakan fungsinya harus didasrkan tingkat kepuasan masyarakat, yaitu puas karena ikut terlibat dalam program pembangunan pemerintah.[43]

Setelah tentang tahap demi tahap partisipasi, mulai dari perencanaan, pengerjaan, pemeriksaan, sampai pendampingan akhir maka berikutnya penting dibicarakan juga tentang Level-Level Partisipasi. Setidaknya, hal ini membantu menganalisa bagaimana atau sejauh mana partisipasi masyarakat dalam program pembangunan yang diselenggarakan pemerintah. Setidaknya ada tiga level yang bisa disebutkan: Level Mikro yang bersifat individual, Level Mezo yang bersifat komunitas/kelompok, dan Level Makro yang bersifat kombinatif antara individu dan kelompok.[44]

Secara politik, pembagian level ini berguna untuk menumbuhkan kesadaran bahwa pemerintah tidak boleh terlalu bangga menyebut dirinya telah melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap programnya, sementara yang dilibatkan masih di tingkat mikro. Sebab, partisipasi tingkat mikro terlalu

43 Husnul Imtihan, Wahyunadi dan Firmansyah, "Peran Pemerintah Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah," *Neo-Bis*, Vol. 11, No. 1,(2017), 1-10

44 Cherrya Damara, Dewangga Nikmatullah dan Indah Nurmayasari, "Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) Di Kota Bandar Lampung," *JIIA*, VOL. 3 No. 3, (2015), 315-321.

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

potensial untuk memarginalisasi keterlibatan masyarakat secara lebih massif. Karenanya, penting disadari oleh semua elemen, baik pemerintah maupun rakyat sendiri, level mezo dan makro adalah level partisipasi yang paling ideal, sehingga bukan hanya partisipasi yang terbatas, melainkan partisipasi yang makro juga dikerjakan. Semakin massif kuantitas atau volumen partisipasi masyarakat maka semakin ideal bentuk partisipasi tersebut. Dampaknya, juga semakin legitimit apa yang sedang dan akan dikerjakan oleh pemerintah. Sebab, semakin besar kuantitas partisipasi maka semakin mengarah pada spirit desentralisasi, yang sejatinya merupakan ruh utama bagi lahirnya teori partisipasi itu sendiri.

Dari penjelasan itu, jika dibagankan sebagai berikut:

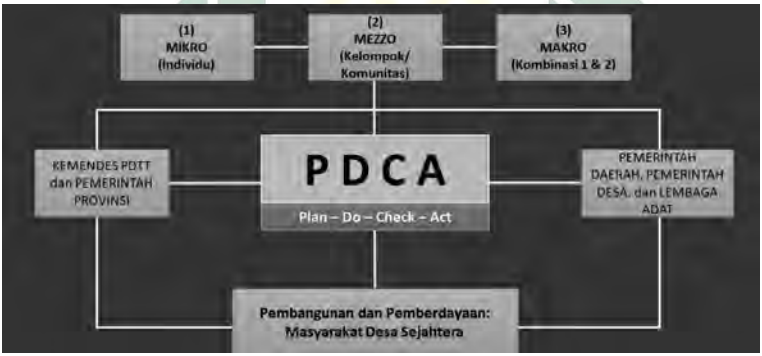

Gambar 3. Level Partisipasi
Sumber : David Camphell, 1999.

2. Faktor Pendorong Partisipasi

Agar pemerintah melibatkan partisipasi masyarakat tidak sebatas di level mikro, tetapi sampai menyentuh level mezo

repo uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

dan makro, maka ada beberapa faktor pendorong yang harus diupayakan. Faktor-faktor pendorong ini penting disadari oleh pemerintah, agar partisipasi masyarakat semakin besar secara kuantitas. Pertama, kebijakan yang berorientasi menjawab kebutuhan publik. Ini adalah prinsip dasar bahwa kebutuhan publik harus dipenuhi, terutama oleh pemerintah. Semakin tepat sasaran dalam menentukan kebutuhkan publik, maka semakin mudah bagi pemerintah untuk mengajak partisipasi masyarakat dalam program-programnya.

Kedua, perencanaan pembangunan yang matang dan komprehensif. Suharyanto & Arif Sofianto menyebut pembangunan yang komprehensif ini dengan istilah pembangunan yang terpadu dan inovatif. Dalam penelitiannya mereka mengatakan, model pembangunan desa yang terpadu inovatif merupakan proses yang mengutamakan sinkronisasi antarsektor dan antarpelaku serta mengedepankan inovasi dalam berbagai bidang sebagai tekniknya.

Prasyarat pembangunan desa terpadu inovatif adalah: teridentifikasinya potensi sumberdaya dan arah pembangunan serta menumbuhkan inovasi sebagai teknik pembangunan. Mereka juga mengatakan bahwa peranan yang perlu dilakukan oleh masing-masing pihak terkait dalam pembangunan desa adalah: pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten harus konsisten dan terarah dalam merumuskan arah kebijakan; pemerintah desa melakukan identifikasi potensi dan menentukan arah

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

kebijakan; Masyarakat desa dan lembaga kemasyarakatan desa berpartisipasi dan melakukan pengawasan; akademisi memberikan masukan iptek dan pendampingan; dan pelaku usaha melakukan investasi dan kerjasama.[45]

Selain itu, ada juga syarat-syarat penting yang bisa digunakan untuk mendorong partisipasi masyarakat, seperti kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan; asas kebermanfaatan yang diterima masyarakat; kepemimpinan yang memberikan ruang terwujudnya konsultasi publik; keterbukaan dalam pengelolaan anggaran; komunikasi yang efektif dan asertif; dan keterlibatan elemen masyarakat secara fungsional dan proporsional. Semua komponen ini harus dipenuhi dalam kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, sehingga partisipasi masyarakat optimal dan hasil yang dingin dicapai dapat berjalan maksimal.

3. Indikator Partisipasi dan Keberhasilannya

Ketika masyarakat betul-betul sudah berpartisipasi dengan optimal dan maksimal, begitu pun pemerintah telah all-out untuk mewujudkan program-program pembangunannya yang melibatkan masyarakat di tingkat mikro, mezo dan makro, maka perkara penting berikutnya adalah membahas indikator-indikator partisipasi tersebut, termasuk indikator keberhasilan partisipasi masyarakat tersebut.

---

45 Suharyanto dan Arif Sofianto, "Model Pembangunan Desa Terpadu Inovatif Di Jawa Tengah," *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance,* Vol. 4, No. 4 (2015), 251-260.

repo uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

Setidaknya ada tiga indikator partisipasi masyarakat yang ideal. Pertama, adanya forum untuk menampung aspirasi dan partisipasi, seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), Rembug Warga, pertemuan warga secara swadaya.

Alfian mencontohkan kasus kecil Musrembang Desa yang dilaksanakan di Desa Bola Bulu Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang, yang merupakan tingkat terendah atau tahapan awal dari musrembang yaitu bermula dari musrembang desa yang merupakan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa, sehingga didapatkan ataupun dihasilkan dokumen perencanaan pembangunan yang baik. Namun, dalam pelaksanaannya hasil musrembang desa belum mempunyai landasan perencanaan yang baik. Berdasarkan hasil penelitian ini, Alfian mengatakan bahwa efektivitas pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan sudah cukup baik 65%. Faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah pendidikan peserta musrembang desa yang kurang baik 47,25%. Pengalaman peserta Musrembang Desa sudah berpengalaman 64,50% dan kurangnya sarana dan prasarana sangat menghambat dalam musrembang desa 88,25%.[46]

Kedua, kemampuan masyarakat terlibat dalam proses

46 Alfian, "Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Bolabulu Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang," *PRAJA,* Vol. 5, No. 1, (2017), 1-7

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, yang dilakukan oleh para aktivis desa, seperti karang taruna maupun organisasi di luar struktur pemerintahan desa seperti remaja masjid.

Sahrul Habibi Nasution mengatakan dari hasil penelitian diperoleh ditemukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi Badan Komukasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) dalam musrenbang, yaitu pendidikan, pekerjaan, pemahaman, dan peraturan secara simultan berpengaruh signifikan. Secara parsial variabel pendidikan dan pemahaman berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi BKPRMI, sedangkan variabel pekerjaan dan peraturan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap partisipasi BKPRMI. Variabel partisipasi BKPRMI yang meliputi pengambilan keputusan, pelaksanaan, menerima manfaat, dan menilai hasil program secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap musrenbang desa. Secara parsial variabel pengambilan keputusan dan menerima manfaat berpengaruh positif dan signifikan terhadap musrenbang desa, sedangkan variabel pelaksanaan dan menilai hasil program berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap musrenbang desa.[47]

---

47 Sahrul Habibi Nasution, "Analisis Partisipasi Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa di kec. Lubuk Pakam kab. Deli Serdang," *Tesis*, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2017.

repo uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

Ketiga, adanya akses bagi masyarakat menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, antara lain seperti adanya perwakilan dalam pemerintah atau utusan masyarakat yang diberi kepercayaan mengawal semua proses. Kajian mengenai kedudukan masyarakat sebagai aktor dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan mulai muncul setelah sebelumnya lahir model Triple Helix, yaitu koordinasi dan kerja sama antar tiga aktor pemerintah, industri dan universitas (Etzkowitz & Leydesdorff, 1995). Kemudian dikembangkan bahwa masyarakat sipil juga penting dalam berpartisipasi, berkoordinasi dan berinteraksi dengan pemerintah, universitas dan industri yang kemudian disebut dengan Quadruple Helix (Carayannis & Campbell, 2009). Berkaitan dengan hal tersebut, alasan utama mengapa partisipasi masyarakat sangat penting menurut Conyers (1994) ialah pertama, karena masyarakat merupakan sumber informasi utama mengenai kebutuhan dan kondisi yang mereka hadapi. Kedua, masyarakat akan lebih mempercayai program kegiatan pembangunan apabila dilibatkan langsung karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk program kegiatan dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap program kegiatan tersebut. Ketiga, mendorong partisipasi akan menimbulkan anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan.

Berbagai negara di dunia juga sudah mencoba membuka partisipasi masyarakat dalam pembangunan

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

maupun penyelenggaraan pemerintahannya. Seperti Open Government Partnership (OGP), kerja sama multilateral yang didirikan oleh Pemerintah Indonesia, Amerika Serikat, Inggris, Norwegia, Meksiko, Brasil, Afrika Selatan dan Filipina. Dimana OGP melibatkan pemerintah dan masyarakat sipil diantaranya dalam mengembangkan rencana aksi keterbukaan pemerintah sebagai usaha mewujudkan pemerintahan yang terbuka, akuntabel dan partisipatif. Di lingkup Indonesia dikenal dengan Open Government Indonesia (OGI) yang saat ini sudah masuk pada pelaksanaan rencana aksi edisi ke VI.

Sejalan dengan agenda tersebut, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terkait yaitu pada bagian konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerinthan Daerah menyatakan bahwa diperlukan partisipasi masyarakat untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut dalam pasal 354 mengamanatkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat dengan cara: keterbukaan informasi yang dapat dilakukan melalui sistem informasi, media cetak/elektronik, papan pengumuman, ataupun permintaan secara secara langsung kepada pemerintah daerah terkait; mendorong peran aktif kelompok dan organisasi masyarakat; pelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan yang memungkinkan kelompok dan organisasi kemasyarakatan dapat terlibat secara efektif; pengambilan keputusan dengan melibatkan

repo uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

masyarakat; dan kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan inovasi daerah.

Untuk mengatur lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat tersebut, juga telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam PP tersebut telah diatur bahwa partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui konsultasi publik, penyampaian aspirasi, rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi hingga seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

Kemudian beberapa cakupan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu dipelajari dan dipahami oleh masyarakat itu sendiri ialah meliputi partisipasi masyarakat dalam penyusunan Peraturan Daerah dan kebijakan daerah, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemonitoran, dan pengevaluasian pembangunan daerah, pengelolaan aset dan/atau sumber daya alam daerah, dan penyelenggaraan pelayanan publik.[48]

Berikutnya, ketika indikator partisipasi telah terpenuhi dengan maksimal, maka indikator keberhasilan dari partisipasi tersebut juga penting diukur. Setidaknya ada beberapa indikator keberhasilan partisipasi; pertama,

48 Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, "Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah," dalam https://bangda.kemendagri.go.id/, akses 18 November 2021.

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

kualitas SDM, berupa tingkat pendidikan warga dan keahliannya; ketersediaan fasilitas umum yang memadai, seperti ruang pertemuan warga, sarana olahaga, tempat ibadah; akses informasi, seperti forum rembug warga, atau kegiatan keagamaan yang dimanfaatkan berbagai informasi; pendapatan rata-rata penduduk; infrastruktur desa yang baik; dan perlindungan terhadap eksistensi lembaga adat. Jika semua indikator ini tercapai dan terpenuhi, maka partisipasi masyarakat dapat dikatakan sangat baik.

Indikator partisipasi tersebut dapat digambarkan dalam bagan berikut ini.

Gambar 4. Indikator Partisipasi

Sumber : Danish International Development Agency, 2005

repo uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

BAB III

TATA KEHIDUPAN MASYARAKAT PEDESAAN

A. KOMUNITAS SAMIN

1. Asal Usul Komunitas Samin

Keberadaan komunitas Samin di wilayah Margomulyo Bojonegoro tidak terlepas dari sejarah panjang masyarakat tanah Jawa dalam perjuangan melawan penjajah. Istilah "Samin" mengandung makna *tiyang sami-sami* atau *sami-sami amin* yang berarti bahwa semua orang adalah sama atau sedulur (bersaudara).[1] Komitmen persaudaraan pada komunitas Samin menjadi kekuatan besar dalam sebuah perjuangan. Di sisi lain, istilah Samin juga merujuk pada nama Ki Samin

1 Alamsyah, "Eksistensi Dan Nilai-Nilai Kearifan Komunitas Samin Di Kudus Dan Pati," HUMANIKA 21, 1 (2015), 63-74.

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

Surosentiko, pencetus gerakan perlawanan tanpa kekerasan melawan kolonialisme Belanda, dengan mengusung ajaran yang mengedepankan nilai kebersamaan, kesetaraan, dan gotong royong.

Samin Surosentiko atau Raden Kohar, adalah putra dari Raden Surowidjojo (disebut juga Samin Sepuh) yang dikenal sebagai *bromocorah*, sering merampok orang-orang kaya yang menjadi kaki tangan kolonial Belanda. Raden Surowidjojo merupakan salah satu putra dari Raden Mas Brotodiningrat, Bupati Sumoroto ke-IV. Berbeda dengan kakaknya, bernama Raden Ronggowirjodiningrat, yang melanjutnya trah kekuasaan di kapubaten Sumoroto[2] (tahun 1826-1844), Raden Surowidjojo lebih memilih meninggalkan kadipaten untuk hidup berbaur dan membantu rakyat kecil.

Sepak terjang Samin Sepuh dalam melakukan penjarahan serta membantu rakyat kecil semakin meluas ke berbagai daerah, mendapat simpati berbagai kelompok masyarakat sehingga semakin banyak pengikutnya. Samin Sepuh mengajarkan

2 Kabupaten Sumoroto dahulu merupakan salah satu wilayah kekuasaan di Jawa Timur, sebelum akhirnya masuk menjadi bagian dari kabupaten Ponorogo, sumber lain menyebut masuk di wilayah Tulungangung. Beberapa penguasa yang pernah memerintah di Kabupaten Sumoroto antara lain: Raden Tumenggung Prawirodirdjo (Bupati ke-I), Raden Tumenggung Somonegoro (Bupati ke-II), Raden Adipati Brotodirdjo (Bupati ke-III), Raden Adipati Brotodiningrat (Bupati ke-IV), Raden Ronggowirjodiningrat (Bupati ke-V).

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

kepada para pengikutnya tentang ilmu kanuragan, olah budi, cara berperang, serta nilai-nilai semangat kebersamaan yang ditulis dalam huruf Jawa. Misalnya bait-bait sekar macapat dalam tembang Pucung berikut ini:

"Golong manggung, ora srambah ora suwung.
Kiate nang glanggang, lelatu sedah mijeni.
Ora tanggung, yen lena kumerut pega.
Naleng kadang, kadhi paran salang sandhung.
Tetege mrng ingwang, jumeneng kalawan rajas.
Lamun ginggang sireku umajing probo".[3]

Sekar macapat tersebut jika diterjemahkan artinya: salah satunya yang utuh, tidak dijarah dan tidak sepi, tetapi kuat dalam perang seperti kobaran api yang mengundang datangnya badan, tidak tahu apabila nantinya kejayaan tersebut akan hilang bersama asap. Hati tidak luntur seperti apa kira-kira datangnya kesulitan, meski begitu terus kepada aku juga larinya. Oleh sebab itu kamu dan aku tidak dapat

3 Catatan "Sejarah Perjuangan Masyarakat Samin" (Januari 1996), merupakan saduran dari buku asli milik Ki Samin Surosentiko yang berjudul "Pameling Kalimosodo" serta pesan terakhir dari Surokarto Kamidin yang merupakan generasi ketiga dari Ki Samin Surosentiko kepada Hardjo Kardi generasi keempat. Hardjo Kardi saat ini bertindak sebagai sesepuh warga Samin di Dusun Jepang, Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro. Buku Asli Pameling Kalimosodo adalah buku pedoman Ki Samin Surosentiko yang bertuliskan Bahasa Jawa Dwipa, disimpan dengan baik oleh pemangkunya yaitu Hardjo Kardi.

repo uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

berpisah, karena kamu dan aku akan menjadi satu dalam kebenaran.

Perjuangan Raden Surowidjojo dilanjutkan putranya Raden Kohar alias Samin Surosentiko (Samin Anom) yang lahir tahun 1859 di Ploso Kedhiren, Randublatung, Blora, Jawa Tengah. Samin Anom hidup dalam keprihatinan, serta tumbuh dan berkembang dalam lingkungan penuh perjuangan. Di usia 30 tahun, tepatnya tanggal 7 Februari 1889, Samin Surosentiko mulai berbicara kepada para pengikutnya di sebuah lapangan di daerah Blora. Menurutnya bahwa tanah ini milik rakyat karena sudah diwariskan oleh para raja di tanah Jawa. Belanda tak punya seujung kuku pun hak atas tanah milih rakyat.

Gambar 3.1.
Samin Surosentiko/ Raden Kohar/ Samin Anom

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

Samin Surosentiko bersama pengikutnya getol melakukan bentuk perlawanan tanpa kekerasan melawan kolonialisme Belanda. Mereka membantah terhadap peraturan Pemerintah Hindia Belanda, menolak membayar pajak, tidak mau sekolah, tidak mau bekerja untuk kolonial, tidak mau diberi atau memberi pemerintah Belanda. Samin Surosentiko bercita-cita mewujudkan suatu pemerintahan dan kekuasaan negara yang dipimpin oleh bangsanya sendiri. Selain perjuangan melawan kolonialisasi, ia juga membawa ajaran luhur bagi para pengikutnya, yakni tentang nilai-nilai kebenaran, kejujuran, dan kerukunan.

Sikap membangkang yang ditunjukkan Samin Surosentiko bersama pengikutnya membuat Belanda cemas dan was-was. Pemerintahan Belanda mulai menyiapkan langkah untuk menghabisi komunitas Samin yang waktu itu telah tersebar di Bloro, Bojonegoro, Pati dan Kudus. Di wilayah Bojonegoro, Komunitas Samin paling banyak berada di Desa Tapelan Kecamatan Ngraho. Berbagai cara telah dilakukan petinggi Belanda untuk membunuh Samin Surosentiko, mulai dari membronjong tubuhnya kemudian dibuang ke laut, ditembak di halaman rumah *Ndoro Siten* (Tuan Asisten) Belanda, serta diberi minuman beracun. Namun semua usaha tersebut sia-sia, Samin Surosentiko masih tetap hidup dan melanjutkan perjuangan serta ajarannya.

Akhinya Samin Surosentiko ditangkap pemerintah Hindia Belanda tahun 1907 dan diasingkan di Sawahlunto. Selain ditahan, di sana ia dipekerjakan secara paksa pada

repo uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

tambang batu bara bersama ribuan orang lainnya. Di lokasi pengasingan, Samin Surosentiko pun memiliki pengaruh cukup besar bagi orang-orang di sekitarnya. Ia menjadi sosok pejuang bagi kaum buruh paksa dalam membela hak agar bisa hidup layak dengan upah memadai. Oleh para rekan-rekan buruh di Sawahlunto, ia dikenal dengan nama Mbah Suro. Hingga akhir hayatnya, Samin Surosentiko meninggal di tahanan Sawahlunto Sumatera Barat tahun 1914. Di Sawahlunto, Samin Surosentiko tetap dikenang hingga kini, terbukti namanya diabadikan menjadi obyek wisata sejarah pada sebuah lubang galian peninggalan Belanda yang disebut dengan "Lubang Mbah Suro".

Ajaran "sedulur sikep" Samin kemudian dilanjutkan oleh Suro Kidin (meninggal tahun 1942), menantu dari Samin Surosentiko. Salah satu pesan dari Samin Sepuh yang terus dipegang teguh oleh Suro Kidin adalah mempertahankan negara dan mengikuti arus air, dalam arti beradaptasi dengan situasi saat sekarang. Sikap menolak membayar pajak juga tetap dipertahankan oleh Suro Kidin bersama para pejuang Samin. Suro Kidin dan Saniyah istrinya, memiliki 8 anak dan satu anak angkat bernama Surokarto Kamidin yang selanjutnya menjadi penerus ajaran Samin di wilayah Bojonegoro.

Surokarto Kamidin merupakan generasi ke-3 penerus perjuangan dan nilai-nilai yang ditanamkan Samin Surosentiko. Salah satu pesan luhur yang tetap diajarkan Surokarto Kamidin kepada anak cucunya adalah agar tidak

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

drengki, srei, dahwen, kemeren, serta jangan semena-mena kepada orang lain. Ajaran tersebut harus terus dilanjutkan meskipun sesepuhnya sudah meninggal, termasuk menolak membayar pajak kepada Pemerintah Belanda. Hingga bangsa Indonesia sudah merdeka, mereka masih tetap menolak membayar pajak karena belum mengetahui kabar kemerdekaan, mengingat kebanyakan bertempat tinggal di tengah hutan.

Gambar 3.2.
Surokarto Kamidin, Generasi Ke-3 Samin Bojonegoro

Mendengar negara sudah merdeka, Surokarto Kamidin pergi ke Jakarta menghadap Presiden Soekarno untuk

repo uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

bertanya kebenaran peraturan yang sedang dijalankan. Sepulangnya dari Jakarta, ia langsung memberitahukan kepada anak cucu dan para pengikutnya supaya taat kepada pemerintah Indonesia, karena yang memimpin sudah dari bangsa sendiri. Sebagaimana pitutur yang disampaikan Bambang Sutrisno[4] bahwa "*Yen wus tukule Kanjeng Jowo tinggi Jowo tunggu rakyat, manggon mburi manut ombak'e banyu*". (Jika sudah datang pemimpin dari orang Jawa (bangsa sendiri), maka ikuti dan patuhilah peraturan yang ada).

Sepeninggal Surokarto Kamidin tahun 1986, pemangku ajaran Samin dilanjutkan oleh anak laki-lakinya yang bernama Hadjo Kardi, merupakan generasi ke-4 dari silsilah Ki Samin Surosentiko. Hadjo Kardi lahir pada tahun 1934, dan sekarang tinggal di Dusun Jepang, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro bersama putranya. Hal inilah yang membuat ajaran Samin di Dusun Jepang masih tetap terjaga hingga kini. Sesepuh Samin Bojonegoro yang memiliki keahlian membuat perangkat gamelan ini dikaruniai 8 orang anak, antara lain: Karsi, Rumini, Marsun, Watini, Surati, Sri Purnami, dan Bambang Sutrisno.

4 Hasil wawancara dengan Bambang Sutrisno pada tanggal 13 Oktober 2021. Bambang Sutrisno adalah generasi ke-5 dari Samin Surosentiko yang tinggal di Dusun Jepang, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro.

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

Gambar 3.3.
Hardjo Kardi, Generasi Ke-4 Samin Bojonegoro

Sebagai sesepuh komunitas Samin di Bojonegoro, Hardjo Kardi telah membawa perubahan signifikan pada masyarakat Samin sebagaimana masyarakat di desa-desa lainnya, bahkan mempunyai kelebihan dalam hal kejujuran, kebenaran, kerukunan dan ketaatan kepada aparatur pemerintah. Meski pada zaman dulu orang-orang samin dikenal menolak sekolah, namun Hardjo Kardi termasuk orang yang memelopori lahirnya lembaga pendidikan (sekolah) di daerah Jepang Margomulyo.

repo uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

Gambar 3.4.
Silsiah Samin Surosentiko di Bojonegoro

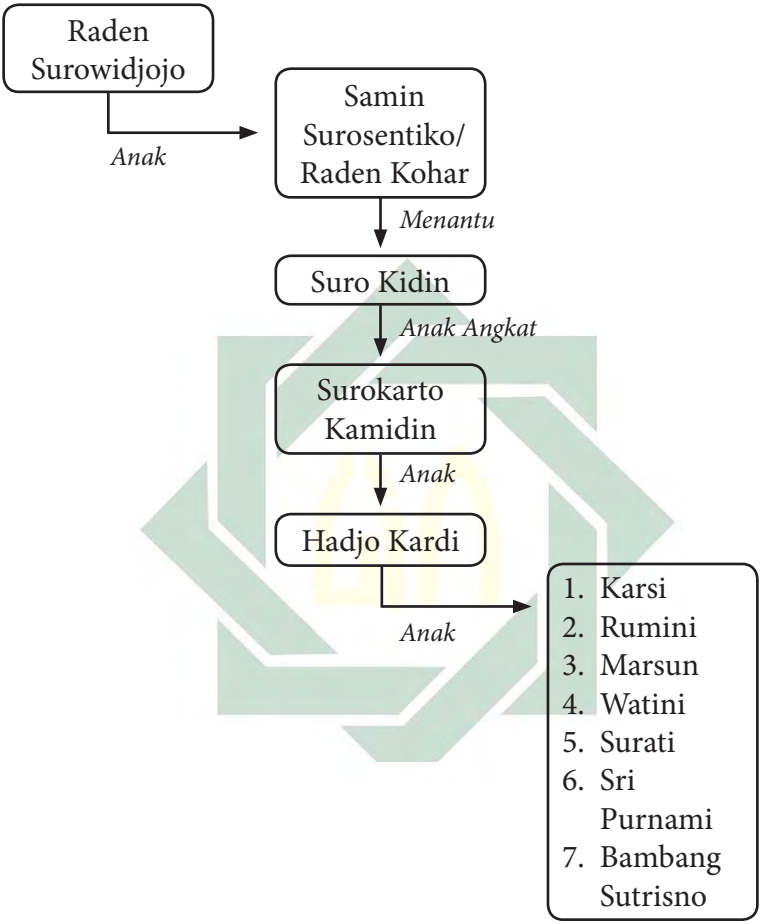

Perjalanan kehidupan komunitas Samin di Dusun Jepang Bojonegoro saat ini sudah memasuki era generasi ke-5, yakni jalur kuturunan mbah Hardjo Kardi yang berjumlah

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

8 orang. Dari 8 orang anak, ia dikaruniai 12 orang cucu, 9 orang di antaranya berjenis kelamin laki-laki, dan 3 orang cucu perempuan. Anak pertama memiliki 3 orang anak, anak ke dua memiliki 2 orang anak, anak ke tiga memliki 1 orang anak, anak ke empat memiliki 2 anak, anak ke lima memiliki 2 orang anak, serta anak ke enam dank e tujuh masing-masing memiliki 1 orang anak. Dari keturunan Hardjo Kardi, masih belum diketahui siapa yang nanatinya akan memangku ajaran Samin. Seiring berjalannya waktu, tentu kelak akan muncul juga penerus silsilah ajaran Ki Samin Surosentiko di masa mendatang.

Di era global ini, karakteristik sistem kehidupan komunitas Samin di Dusun Jepang sudah mengalami perubahan signifikan. Selain sudah semakin banyak di antara mereka mengenyam pendidikan formal, masyarakat Samin Bojonegoro sudah terbuka dan melek tentang teknologi. Bahkan di antara keturunan Hardjo Kardi, yakni Bambang Sutrisno, menjadi abdi negara yang bertugas di Kantor Kecamatan Margomulyo. Ada juga masyarakat asli Dusun Jepang, bernama Miran QR, saat ini menjabat sebagai Kepala KUA Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro.

Saat ditemuai di KUA Kecamatan Kasiman, Miran QR mengakui memang sudah cukup banyak perubahan yang terjadi pada masyarakat Samin di Dusun Jepang. Bukan hanya mempertahankan ajaran leluhur, masyarakat Dusun Jepang sangat menerima perubahan di masyarakat. Mereka bahkan sudah banyak yang mengenyam dunia pendidikan,

repo uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

cukup adaptif dengan perkembangan teknologi informasi, serta penerimaan warga masyarakat Dusun Jepang pada ajaran Islam. Termasuk bagi Miran QR sendiri, yang mengaku dirinya turut merasakan perhatian pemerintah dalam memberikan kesempatan pendidikan pada anak-anak Dusun Jepang sejak tahun 80-an.[5] Hal tersebut menjadi bukti bahwa masyarakat Samin di Bojonegoro sudah sangat terbuka terhadap berubahan dan kemajuan, dengan tetap menjaga nilai-nilai serta ajaran leluhur.

2. **Sistem Keyakinan/Kepercayaan Komunitas Samin**

Dari sejarah perjalanan Samin Surosentiko dalam menghimpun dan menggerakkan rakyat selama kurun waktu dua dasawarsa sebelum ia ditangkap dan diasingkan, terbukti telah mampu menanamkan dan menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan serta perjuangan melawan penindasan. Bukan hanya ajaran tentang kemanusiaan, Samin Surosentiko juga mewariskan ilmu tentang kejatmikaan, yakni ilmu untuk membangun kekuatan jiwa dan raga, serta jasmani dan rohani.

Dalam catatan dokumen Sejarah Perjuangan Masyarakat Samin, pada tanggal 11 Juli 1901, malam Senin Pahing di lapangan Pangonan Desa Kasiman, Samin Surosentiko berbicara di hadapan pengikutnya tentang

5 Hasil wawancara tanggal 13 Oktober 2021 dengan Miran QR, Warga Dusun Jepang yang saat ini menjadi Kepala KUA Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro.

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

kejatmikaan. Dengan diterangi ratusan obor, Samin Anom memberi pesan untuk memperkuat sifat menang, *madep*, *mantep* yang dihubungkan dengan kekuatan badan dan mengingatkan masalah pikiran dan hati yang tenang. Pesan tersebut disampaikan dengan bahasa Jawa Kuno dicampur dengan sedikit bahasa Kawi seperti halnya wejangan, agar masyarakat senang menanggapinya. Isi pesannya kurang lebih sebagai berikut:

> *"Lan lakuniro seputat-seputat nastyasih kukuluwng. Lagangan harah kadyatmikan cawul haneng pambudi malatkung. Sing dingin, hakarso adyatmiko tanpo lih. Dwinyo maneges tapi hakarep tumiyang. Katri nempuh gendholan batin, ngarah arah. Catur mangeran ayun luwih dening tatasnyo ngadil myang pencang mangkin, sumarah renggep hatikel patuh".* [6]

Ajaran Samin Surosentiko mengenai kejatmikaan tersebut mengandung lima wejangan, antara lain:

1. Jatmika kehendak yang didasari usaha pengendalian diri;
2. Jatmika dalam beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menghormati sesama makhluk Tuhan;
3. Jatmika dalam mawas diri, melihat batin sendiri setiap saat, dapat menyelaraskan dengan lingkungan;

6 Catatan "Sejarah Perjuangan Masyarakat Samin" (Januari 1996).

repo uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

4. Jatmika dalam menghadapi bencana/bahaya yang merupakan cobaan dari Tuhan Yang Maha Esa;
5. Jatmika untuk pegangan budi sejati.

Nilai-nilai dan ajaran yang dibawa oleh Samin Surosentiko terus diwariskan secara turun-temurun di wilayah Bojonegoro, Blora, Pati dan sekitarnya. Termasuk komunitas Samin di Dusun Jepang Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro masih cukup kuat memegang ajaran luhur tentang nilai kehidupan dan kemanusiaan ini. Ada lima nilai ajaran Samin yang terus dilestarikan, bahkan dijadikan ikon Tugu Samin di pinggiran hutan Dusun Jepang Kecamatan Margomulyo Bojonegoro. Kelima inti ajaran luhur tersebut antara lain:

1. *Laku jujur, sabar, trokal lan nrimo* (berperilaku jujur, sabar, berusaha dan menerima secara ihlas).

   Bekerja adalah kodrat manusia untuk bisa bertahan dan menjalankan kehidupan, untuk itu dalam bekerja harus dilakukan dengan penuh kejujuran, sabar, berusaha secara sungguh-sungguh, dan apaupun hasilnya harus diterima dengan ihlas.
2. *Ojo drengki, srei, dahwen, kemeren, pek pinek barange liyan* (jangan dengki, iri, mencela, mengambil milik orang lain tanpa izin).

   Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa dilepaskan dari interaksi dengan masyarakat. Untuk membina hubungan baik antar sesama manusia, ada beberapa hal yang harus dihindari, yaitu: sifat dengki, iri, suka

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

mencela, serta mengambil hak milik orang lain tanpa izin pemiliknya.

3. *Ojo mbedo mbedane sepodo padang urip, kabeh iku sedulure dewe* (jangan membeda-bedakan sesama manusia, kita semua saudara).

   Untuk bisa membina hubungan baik antar sesama manusia, kita jangan sampai membeda-bedakan satu sama lain, seperti dalam hal agama, suku, ras, pangkat/jabatan, serta kekayaan. Hidup rukun dan penuh rasa persaudaraan adalah hal yang paling utama.

4. *Ojo waton omong, omong sing nganggo waton* (jangan asal bicara, bicaralah yang benar dan bernilai.

   Dalam hal berbicara, kita harus berhati-hati dan menjaga lisan dengan baik agar tidak menyakiti orang lain. Jangan sampai asal bicara tanpa nilai kebenaran dan kejujuran, tetapi berbicara yang penuh makna dan bermanfaat bagi orang lain.

5. *Biso roso rumongso* (bisa merasakan perasaan orang lain).[7]

   Kepekaan untuk bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain adalah salah satu hal penting bagi manusia. Sikap inilah yang bisa melahirkan simpati dan empati atas kondisi sesama. Jika manusia bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain, maka ia akan bisa bersikap

7 Dikutip dari Pitutur Luhur pada "Tugu Sedulur Sikep Samin" di Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro.

repo uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

teposliro (menempatkan diri dengan baik) agar tidak menyakiti orang lain, atau justru bisa membantu menyelesaikan masalah orang lain.

Gambar 3.5.
Tugu "Sedulur Sikep Samin" di Margomulyo Bojonegoro

Pasca kemerdekaan Indonesia, masyarakat Samin pun telah menjadi bagian dari rakyat dan bangsa Indonesia, sehingga stigma sebagai 'pembangkang' di masa lalu tidak berlaku lagi. Sama seperti warga negara lainnya, masyarakat Samin juga mengikuti hak dan kewajiban sebagai warga negara Indoensia. Keunikan dari masyarakat Samin dimana pun mereka berada adalah kuatnya mentaati ajaran leluhur hingga kini, dengan berpegang kepada Kitab Kalimusada.[8]

8 Siti Munawaroh dkk, Etnografi Masyarakat Samin di Bojonegoro:

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

Kekuatan memegang ajaran lelulur Samin Surosentiko di satu sisi, juga dibarengi dengan sikap terbuka dan adaptif terhadap perubahan pada sisi lainnya.

Di tengah perubahan zaman dan tata kehidupan sosial di era global, komunitas Samin tetap berkomitmen menjaga nilai dan ajaran dari para leluhur tentang makna kehidupan dan persaudaraan. Meskipun sudah berbaur dan tidak bisa dibedakan lagi secara identitas penampilan dengan warga desa lain, komunitas Samin Dusun Jepang, Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Bojonegoro masih mempertahankan filosofi *sedulur sikep* dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat terlihat dari kuatnya sikap kebersamaan dan kegotong-royongan antar warga, kejujuran serta mencintai kelestarian alam.

Hardjo Kardi, sesepuh komunitas Samin di Dusun Jepang Margomulyo Bojonegoro selalu menyampaikan pesan leluhurnya kepada anak cucu dan masyarakat. Ia mengingatkan agar manusia jangan memiliki sifat *drengi, srei, dahwen kemeren, ojo mbedo sepodo, merang sepodo* (dengki, iri, membeda-bedakan antar sesama, bertengkar antar sesama). Itulah pesan turun-temurun dari nenek moyang hingga sampai kepada kita, dan ini harus kita sampaikan juga kepada anak cucu kita. Karena itu, selaku sesepuh komunitas Samin, Hardjo Kardi selalu berpesan

---

Potret Masyarakat Samin dalam Memaknai Hidup (Yogyakarta: Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB), 2015), 69.

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

kepada siapapun untuk bisa memahami wejangan leluhur, terutama hidup kekeluargaan dengan sesama, saling membantu, serta mau bekerja keras. Karena kita butuh makan dan minum untuk keberlangsungan hidup, maka manusia harus bekerja keras dengan didasari sikap sabar, jujur, *trokal* (berusaha dengan sungguh-sungguh) dan *nrimo* (menerima secara ihlas).[9]

Dalam menjalani kehidupan, Hardjo Kardi juga menuturkan perlunya empat hal yang harus dijadikan pedoman, yaitu: merah, hitam, kuning, putih. Merah mengandung makna sandang pangan atau *angkoro murko,* dan hitam adalah kesenangan. Selain itu, kuning untuk pedoman tingkah laku, serta putih adalah dasar. Keempat unsur ini senantiasa muncul dan bisa mempengaruhi diri manusia, tergantung setiap individu apakah bisa mengendalikan atau terbawa arus perilaku tercela. Segala sesuatu ada baik dan buruknya, tergantung pilihan manusia masing-masing. Tentu manusia selalu diajari untuk bisa memilih dan berbuat kebaikan.

Hal baik buruk ini menurut Hardjo Kardi bisa terjadi pada empat indera manusia, yakni *pangganda* (pembau), *pangrasa* (perasaaan), *pangrungon* (pendengaran), *pangawas* (penglihatan). Maka dari itu, sesepuh komunitas Samin pada

9 Hasil wawancara dengan Hardjo Kardi pada tanggal 12 Oktober 2021. Hardjo Kardi adalah generasi ke-4 dari Samin Surosentiko yang tinggal di Dusun Jepang, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro.

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

generasi ke-4 ini menegaskan pentingnya manusia untuk selalu waspada. Kalau senang jangan asal senang, karena senang bisa dua macam, yaitu senang kepada hal-hal yang baik dan senang kepada yang jelek. Jika senang kepada kebaikan perlu terus lakukan, tetapi untuk senang kepada kejelakan harus segera ditinggalkan. Ketika seseorang mendapat rezeki atau kesenangan lainnya, jangan diambil sendiri, ingatlah untuk berbagi dengan orang lain yang membutuhkan.

Dalam berbicara, masyarakat Samin sangat memegang kejujuran, tidak berbohong dan harus menepati janji. Jika pinjam maka harus mengembalikan, jika hutang harus dibayar, dan jika minta harus seihlasnya serta tidak boleh memaksa. Jangan sampai membohongi dan mengingkari janji, karena akan membuat orang lain sakit hati. Masyarakat Samin juga sangat kuat memegang prinsip saling membantu satu sama lain. Ketika ada tetangga punya hajat, seperti mau membangun rumah, maka warga lain berbondong-bondong dengan senang hati memberikan bantuan tanpa dibayar. Tidak ada istilah buruh majikan dalam kamus kehidupan masyarakat Samin, karena semua manusia adalah sama untuk saling membantu.

Dalam hal kepercayaan dan agama, kamunitas Samin mayoritas tercatat pada data kependudukan sebagai pemeluk agama Islam. Namun sebagian mereka juga memiliki kepercayaan sendiri tentang hakikat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang dikenal dengan agama Adam. Bagi masyarakat Samin, Agama Adam diakui sebagai ajaran

repo uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

yang dibawa oleh makhluk Tuhan yang dilahirkan pertama di dunia, dimana keberadaannya untuk menghidupkan dunia serta diwujudkan dalam perilaku bijaksana.[10] Sejalan dengan ini, Hardjo Kardi selaku sesepuh masyarakat Samin di Dusun Jepang sangat meyakini pentingnya kesimbangan antara rohami dan jasmani, *manunggaling kawulo-gusti* atau kesatuan antara Tuhan dan hamba-Nya. Menurutnya, hakikat Tuhan dan manusia adalah satu, tidak bisa dipisah-pisahkan satu sama lain. Itulah yang menjadi dasar tuntunan perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Ajaran Islam pun secara alamiah berkembang di Dusun Jepang, seiring adanya guru ngaji yang mengajarkan baca tulis al-Quran secara non formal sekira tahun 1980an. Perhatian Kementerian Agama setempat untuk memberikan beasiswa pendidikan bagi anak-anak Dusun Jepang agar bisa belajar ke pesantren dan lembaga pendidikan Islam formal turut berkontribusi dalam memperluas ajaran Islam. Masjid berukuran sedang, berdinding papan kayu jati, menjadi bukti keterbukaan masyarakat Samin untuk menerima ajaran Islam secara baik. Aktifitas ibadah dan belajar mengaji untuk anak-anak berjalan secara rutin. Perbedaan keyakinan atau kepercayaan bukan menjadi masalah berarti bagi masyarakat Samin, yang terpenting saling menghormati dan menjunjung tinggi nilai persaudaraan.

10 Moh Rosyid, "Agama Adam dan Peribadatan dalam Ajaran Samin," Jurnal Sosiolgi Agama Indonesia 1, 2 (2020), 121-131.

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

Gambar 3.6.
Bangunan Masjid di Dusun Jepang

Ajaran "Sedulur Sikep" Samin yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan merupakan kekayaan bangsa yang tak ternilai harganya. Atas kekayaan nilai-nilai luhur pada diri komunitas Samin ini, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2019 telah menetapkan "Ajaran Samin Surosentiko Bojonegoro" sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia (WTBI).[11] Hal ini menunjukkan bahwa ajaran Samin merupakan salah satu nilai luhur bangsa yang patut dijaga, dilestarikan dan ditransformasikan kepada generasi penerus. Di tengah dinamika arus globalisai saat ini, tentu ajaran Samin akan dihadapkan dengan berbagai tantangan. Pada satu sisi nilai luhur Saminisme harus terus

11 Piagam penetapan "Ajaran Samin Surosentiko Bojonegoro" sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Prpf. Dr. Muhadjir Effendy, pada tanggal 8 Oktober 2019.

repo uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

dijaga dan ditanamkan pada generasi penerus, di sisi berbeda genarasi masa kini juga disuguhi dengan pengaruh nilai-nalai modern melalui pergaulan maupuan dari sajian media informasi dan teknologi.

Guna menjaga ajaran dan keyakinan Samin kepada di tengah gempuran pengaruh global, pemerintah dan masyarakat Desa Margomulyo bersama berbagai stakeholders menggelar acara bertajuk Festival Samin. Seperti pada tahun 2019 sebelum pandemi Covid-19, gelaran Festival Samin dengan mengusung tema "Cinta Samin, Cinta Alam Hijau, Cinta Tanah Air" berjalan dengan lancar dan meriah, serta berhasil menyedot perhatian masyarakat baik lokal, nasional maupuan macanegara. Festival ini sebagai penanda bahwa komunitas Samin Bojonegoro masih ada dan akan terus ada dengan berbagai kekhasannya serta karya ciptanya.

Festival Samin adalah acara tahunan yang diselenggarakan oleh Masyarakat Samin Bojonegoro selama beberapa hari di bulan Suro. Masyarakat Samin bersama penyelenggara festival mencoba mengangkat kebudayaan lokal untuk ditampilkan di acara tersebut. Berbagai rangkaian acara dikemas secara apik, mulai dari orasi budaya, senam tradisi, penanaman pohon, pertunjukan seni, pelatihan batik udeng, diskusi budaya Samin, pernikahan adat Samin, serta pagelaran wayang kulit dan thengul.[12] Melalui gelaran festival Samin, publik akan lebih mengenal tentang apa dan

12 Danang Rudy Purnomo, Buku Dokumentasi Festival Samin 2019.

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

bagaimana sebenarnya ajaran Samin, serta terdorong untuk terus menjaga nilai-nilai luhur yang ada.

Gambar 3.7.
Festival Samin Bojonegoro

Sumber foto: Buku Dokumentasi Festival Samin 2019

repo uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

Menyelami ajaran dan nilai-nilai Saminisme, tak cukup hanya melihat dari penampilan masyarakat Samin dalam tindak laku kesaharian, perlu melisik secara mendalam akar perilaku dan budaya yang mendasari terbentuknya komunitas ini. Para pemerhati dapat melakukan telaah bukan hanya melalui karya akademik hasil riset atau jurnal ilmiah, tapi perlu lebih jauh menyelaminya secara langsung dari interkasi sosial di kehidupan komunitas Samin Dusun Jepang Margomulyo Bojonegoro. Semakin jauh nilai-nilai dan ajaran Samin digali, semakin besar pula wawarisan budaya bangsa dengan berbagai pesan luhur bisa ditemukan.

3. Sistem Sosial dan Ekonomi Komunitas Samin

Samin bukanlah etnis atau suku tersendiri, mereka pada dasarnya termasuk etnis dan suku Jawa yang memiliki karakteristik tertentu dalam hal perilaku. Identitas sikap dan perilaku komunitas Samin terbentuk dalam kurun waktu cukup lama, sebagai pengaruh dari gerakan perjuangan Samin Surosentiko bersama pengikutnya ketika melawan kolonialisme Belanda. Kohesi sosial komunitas Samin yang menyatu selama bertahun-tahun, kemudian dibingkai dalam satu kepentingan dan tujuan yang sama, pada perkembangannya melahirkan identitas baru tentang sistem ajaran dan nilai-nilai sosial. Komunitas Samin saat ini telah menyebar di beberapa tempat, terutama di wilayah perbatasan antara Jawa Timur dan Jawa Tengah, seperti Blora, Pati, Kudus dan Bojonegoro. Komunitas Samin Bojonegoro yang masih

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

eksis berada di Dusun Jepang, salah satu dusun di kawasan hutan Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo.

Gambar 3.8.
Peta Penyebaran Komunitas Samin Bojonegoro

Komunitas Samin Bojonegoro yang masih eksis berada di Dusun Jepang, salah satu dusun di kawasan hutan Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo. Dusun Jepang berjarak sekitar 4,5 km dari Kecamatan Margomulyo, 69 km di sisi Barat Daya Kabupaten Bojonegoro, dan 185 km dari ibukota Provinasi Jawa Timur. Lokasinya di sebelah Barat Laut dari lanskap Desa Margomulyo, terletak di daerah dataran rendah, dengan kontur alam

repo uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

sedikit berbukit, serta kondisi tanah tergolong gersang karena mengandung kapur dan bebatuan. Meski demikian, suasana asri dengan panorama hutan jati di sepanjang jalan dapat kita temukan ketika singgah di kampung Komunitas Samin Dusun Jepang Margomulyo Bojonegoro.

Gambar 3.8.
Akses Jalan di Tepian Hutan Menuju Dusun Jepang

Untuk menuju Dusun Jepang, kita bisa masuk dari pertigaan Palang Wesi Desa Margomulyo yang berada di sebelah barat jalan raya Bojonegoro-Ngawi. Di pintu gerbang pertigaan Palang Wesi, ditandai sebuah patung dengan identitas seorang berpakaian komunitas Samin, di bawahnya dilengkapi tulisan jawa berbunyi *"Sugeng*

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

Rawuh Dateng Kampung Sedulur Sikep Samin Margomulyo Bojonegoro" (selamat datang di kampung Sedulur Sikep Samin Margomulyo Bojonegoro). Dari sana kita bisa melanjutkan perjalanan melalui jalan poros desa melawati hutan jati milik Perhutani sejauh 4,5 km. Tidak sulit untuk mencapai lokasi, mengingat struktur jalan yang dulu sulit dijangkau karena terjal dan berlumpur saat turun hujan, kini sudah diperbaiki dengan *paving block* (bata beton).

Bentang wilayah Dusun Jepang memiliki luas 74,73 ha, atau 5,8% dari total luas Desa Margomulyo yang mencapai 1.280 ha. Berdasarkan Data Statis Monografi Desa Margomulyo, tata guna lahan di Desa Margomulyo terbagi dalam beberapa peruntukan, antara lain: tanah sawah (304 ha), tanah kering (434 ha), tanah hutan (716 ha), tanah perkebunan (55 ha), tanah untuk keperluan fasilitas umum (1,8 ha), tanah untuk keperluan fasilitas sosial (2,8 ha), serta sekitar 0,5 ha berupa tanah pasir atau tanah tandus. Sementara ketinggian wilayah Dusun Jepang berada pada 151 meter di atas permukaan laut (mdpl), dengan suhu rata-rata antara 29°C sampai 31°C.[13]

Dusun Jepang merupakan salah satu dari delapan dusun yang ada di Desa Margomulyo, berada di wilayah Rukun Warga (RW) 05 yang terbagi dalam 2 Rukun Tetaangga (RT). Tujuh dusun lainnya di Desa Margomulyo adalah:

13 Data Monografi Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Bojonegoro tahun 2020.

repo uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

Dusun Jatiroto, Dusun Kalimojo, Dusun Tepus, Dusun Jerukgulung, Dusun Kaligede, Dusun Batang, dan Dusun Ngasem. Batas wilayah Dusun Jepang berada di antara 3 dusun dan 1 desa lain, yakni berbatasan dengan Dusun Batang di sebelah utara, sebelah timur berbatasan dengan Dusun Kaligede, sebelah selatan berbatasan dengan Dusun Jatiroto, serta di sisi barat berbatasan dengan Desa Kalangan Kecamatan Margomulyo.

Gambar 3.9.
Jalan Masuk Kampung Samin Samin Bojonegoro

Dusun Jepang memiliki jumlah penduduk sebanyak 879 orang, dari total 6123 warga Desa Margomulyo. Dari 879 warga Dusun Jepang yang tersebar di 281 kepala keluarga,

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

klasifikasi penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 437 orang (49,7%), sedangkan warga berjenis kelamin perempuan sebanyak 442 orang (50,3%). Mereka mayoritas bekerja sebagai petani, yang mengandalkan pertanian jagung, cabai, kacang tanah, dan sebagian persawahan padi. Selain bertani, mata pencaharian masyarakat di Dusun Jepang di antaranya: buruh, peternak, pedagang, pengrajin, wiraswasta, PNS, ABRI/Polri. Komposisi mata pencaharian masyarakat Dusun Jepang sebagimana tabel berikut:

Tabel 3.1.
Mata Pencaharian Masyarakat Dusun Jepang Tahun 2020

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase
1	Petani	367	54,45%
2	Pedagang	8	1,18%
3	Peternak	182	27,00%
4	Pengrajin	26	3,85%
5	Buruh	73	10,83%
6	Wiraswasta	12	1,79%
7	PNS/ABRI/Polri	6	0,90%
JUMLAH		674	100%

Sumber: Data Monografi Desa Margomulyo dan Hasil Interview

Dalam aspek jenjang pendidikan, masyarakat Dusun Jepang rata-rata menamatkan pendidikan di tingkat SD/ sederajat, sebagian yang lain tidak sekolah, serta sebagian kecil melanjutkan hingga pendidikan menengah dan perguruan tinggi. Dari 879 warga Dusun Jepang, tercatat

repo uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

ada 396 orang (39%) yang tidak atau belum sekolah. Persentase tingkat pendidikan masyarakat ini tentu masih dipengaruhi oleh faktor jumlah generasi tua yang kebanyakan memang belum mengenyam pendidikan. Kendala paling mendasar adalah ketebatasan dana untuk pembiayaan pendidikan, mengingat mayoritas warga Dusun Jepang berpenghasilan sebagai petani atau buruh tani. Faktor lain karena jarak untuk mengakses pendidikan pada jenjang menengah dan pendidikan tinggi cukup jauh, sehingga memerlukan kesiapan finansial dan fasilitas transportasi yang memadai.

Masyarakat Samin Dusun Jepang hidup berkelompok dan berbaur dengan masyarakat lain dalam satu lingkup Rukun Warga (RW). Jika kita lihat dari tepi jalan poros desa, tampak rumah warga model semi permanen berdiri berjajar di tengah hutan jati. Kebanyakan rumah masyarakat Samin berdinding kayu dengan atap genting terbuat dari tanah liat. Rumah sederhana masyarakat Samin umumnya berbentuk Limasan dan rumah Mujur, di samping beberapa rumah warga lainnya sudah permanen dari bahan batu bata. Rumah berbentuk Limasan memiliki atap berbentuk segitiga tumpul yang menutupi bagian atas rumah pada empat sisinya. Sementara rumah Mujur merupakan rumah berbentuk memanjang dari depan ke belakang, dengan model atap segitiga menyerupai piramida.

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

Gambar 3.10.
Bentuk Rumah Komunitas Samin Bojonegoro

Sikap dan perilaku sebuah kelompok masyarakat yang terjadi secara massif dalam kurun waktu lama akan menghasilkan sistem dan pranata sosial tertentu. Begitu juga dengan sistem sosial dan tradisi masyarakat komunitas Samin di Dusun Jepang juga memiliki nilai kehasan. Ada beberapa upacara tradisional untuk memeringati momen-momen tertentu dalam kehidupan, seperti: kelahiran, pernikahan, hingga upacara kematian. Mereka selalu saling membantu satu sama lain untuk meringankan beban sesama ketika salah satu warga ada hajatan atau terkena musibah.

1. Tradisi Kelahiran

Upacara kelahiran di masyarakat Samin umumnya dilakukan secara sederhana, sebagai penanda bahwa seseorang sudah ditanamkan roh dalam jasad, dan sudah memiliki tempat *ngenger* (mengabdi) dalam kehidupan. Setelah bayi lahir,

repo uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

keluarga menggelar *selametan* (acara syukuran) yang disebut *brokohan* dengan mengundang kerabat dan tetangga. Acara *brokohan* (mengharapkan berkah) merupakan perwujudan rasa syukur orang tua dan memohon keselamatan agar bayi yang dilahirkan terhindar dari segala mara bahaya.

Selain *brokohan*, juga dikenal tradisi *sepasaran* (bayi berusia 5 hari), *pupak puser* (terlepasnya tali pusar), *selapanan* (bayi berusia 35 hari), dan juga *tudun* (bayi mulai menginjak tanah). Dalam hal *mendhem ari-ari* (mengubur plasenta), masyarakat Samin membedakan untuk bayi laki-laki dan perempuan. Untuk *ari-ari* dari bayi laki-laki dikubur di dalam rumah dengan harapan kelak si anak mudah mendapat pekerjaan dan bisa membina rumah tangga dengan baik. Sementara *ari-ari* untuk bayi perempuan dikubur di luar rumah dengan harapan kelak mudah mendapatkankan jodoh.

2. Upaca Perkawinan

Pernikahan merupakan momen sakral bagi masyarakat Samin di Dusun Jepang, karena menikah diyakini sebagai sarana untuk mengikat hubungan kasih sayang antar lawan jenis, membina rumah tangga, menciptakan keturuan dan mendekatkan diri pada Yang Maha kuasa. Dalam tradisi masyarakat Samin, prosesi lamaran diserahkan sepenuhnya kepada orang tua calon pengantin pria. Disetujui atau tidaknya keinginan menikah seorang pemuda tergantung restu orang tuanya, begitu juga diterima atau tidaknya hajat lamaran tergantung restu orang tua sang gadis. Hal ini sebagai

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

gambaran bahwa komunitas Samin sangat menghormati dan mengedepankan doa restu dari kedua orang tua.

Dalam prosesi nikah, diawali syahadat nikah menggunakan tradisi masyarakat Samin, dan bagi mempelai yang beragama Islam dilanjutkan dengan akad nikah secara Islam oleh petugas dari KUA. Syahadat nikah tradisi Samin dilakukan oleh orang tua mempelai putri menggunakan bahasa Jawa. Setelah orang tua mempelai putri merestui pernikahan mereka, selanjutnya mempelai putra mengatakan:

> *"Syahadat kulo wit kanjeng nabi, jeneng lanang damel kulo rabi, noto jeneng wedok pengaran "X', kukuh demen janji buk nikah mpun kulo lampahi"*[14] (Saya bersaksi sejak zaman nabi, dengan nama laki-laki untuk saya menikah, pada perempuan bernama "X", memegang janji nikah yang sudah saya jalani)."

Setelah nikah dinyatakan sah oleh para saksi, dilanjutkan wejangan dari sesepuh, serta ditutup dengan bacaan doa untuk kelanggengan hubungan rumah tangga kedua mempelai. Pada waktu yang sama, biasanya prosesi akad nikah secara Islam dan pencatatan nikah dilakukan oleh penghulu dari KUA setempat.

---

14 Channel Youtube Mas Danang, judul: "Upacara Pernikahan Adat Samin Bojonegoro".

repo uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

Gambar 3.11.
Prosesi Pernikahan Komunitas Samin

Sumber foto: YT Channel Mas Danang

Achand Maqin, Kepala KUA Kecamatan Margomulyo mengatakan bahwa mayoritas masyarakat Samin di Dusun Jepang dalam proses akad nikah melibatkan pihak KUA. Di samping mereka memang beragama Islam juga untuk membantu proses administasi pencatatan nikah oleh negara. Meski begitu, alumni UIN Sunan Ampel Surabaya imi tidak menampik jika masih ada pelaksanaan tata cara nikah sesuai tradisi masyarakat Samin di beberapa warga Dusun Jepang, sebelum prosesi akan nikah oleh penghulu dari KUA Margomulyo.[15]

15 Hasil wawancara dengan Achmad Maqin, Kepala KUA Kecamatan Margomulyo pada tanggal 12 Oktober 2021.

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

3. Upacara Kematian

Kematian bagi masyarakat Samin sebagai proses *salin sandangan* (ganti baju) yang dialami olah setiap manusia, yakni pergantian alam kehidupan manusia dari alam dunia ke alam lain milik Tuhan. Dalam upacara kematian, awalnya ada perbedaan tata cara merawat jenazah, seperti dalam hal memandikan, mengafani, atau mendoakan. Tidak ada kawajiban memandikan jenazah, terutama untuk jenazah yang di masa hidupanya diyakini sebagai orang baik. Memandikan jenazah dikhususnkan bagi mereka yang semasa hidup masih memiliki kesalahan dalam perilaku dan tindakan, sehingga dengan dimandikan akan membersihkan dosa-dosanya. Pemakaian kain kafan juga tidak harus berwarna putih, bisa juga dengan kain jarik maupun lainnya. Dalam hal doa untuk jenazah dilakukan dengan adat jawa yang dikenal juga istilah *brokohan* (mengharap berkah). Setelah kedatangan ajaran Islam, masyarakat Samin di Dusun Jepang pun mengikuti tata cara Islam dalam merawat jenazah, mulai dari proses memandikan, mengafani, menyolatkan, mengubur sampai mendoakan.

Tradisi komunitas Samin dalam beberapa ritus kehidupan merupakan gambaran perilaku sosial yang terjadi secara alamiah, hal ini sebagai cerminan bagaimana karakteristik pada masayarakat lokal bersangkutan. Sikap sederhana, saling membantu, dan jujur yang melekat pada komunitas Samin Dusun Jepang, akan turut berkontribusi dalam upaya pembangunan sistem sosial di wilayah setempat. Nuryanto, Kepala Desa Margomulyo, menilai bahwa masyarakat di Dusun

repo uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

Jepang dengan identitas Samin yang melekat, memiliki sikap dan perilaku positif, terutama mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan kegotongroyongan. Hal ini bisa menjadi modal penting dalam upaya pembangunan desa dengan melaibatkan warga masyarakat secara partisipatif.[16]

Cara komunitas Samin Dusun Jepang Margomulyo Bojonegoro dalam memaknai hidup ketika berinteraksi dengan sesama manusia atau dengan alam semesta menunjukkan kedalaman nilai kesederhanaan dan kesetaraan. Saat mereka berduyun-duyun membantu tetangga membangun rumah, atau ketika acara *sambatan* di rumah warga yang sedang memiliki hajatan, terpancar rasa keihlasan untuk saling berbagi. Begitu juga wejangan dari sesepuh mereka untuk meninggalkan sifat *drengki, srei, kemeren,* menggambarkan keluhuran budi yang bisa terus diteladani oleh generasi masa kini. Atas ajaran luhur komunitas Samin di Bojonegoro, wajar jika pemerintah mengapresiasi ajaran warisan mbah Samin Surosentiko ini sebagai salah satu Kekayaan Budaya Takbenda Indonesia.

4. Dinamika Sosial Komunitas Samin

Perubahan cara pandang dan perilaku komunitas Samin Dusun Jepang Bojonegoro terhadap dinamika sosial berawal sejak Indonesia merdeka. Ketika mendengar Indonesia merdeka, Surokarto Kamidin selaku generasi ke-3 Samin Surosentiko,

16 Hasil wawancara Nuryanto, Kepala Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 13 Oktober 2021.

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

pada tahun 1963 pergi ke Jakarta menemui Presiden Soekarno guna memastikan bahwa negara sudah benar-benar dipimpin oleh bangsa sendiri. Mendengar penjelasan Presiden Soekarno, Surokarto Kamidin segera kembali ke Dusun Jepang untuk menyampaikan kepada para pengikut komunitas Samin agar menaati semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia. Para pengikut komunitas Samin sejak saat itu mulai bersedia membayar pajak, bersedia sekolah, serta bersedia bersama-sama pemerintah dalam proses pembangunan.

Seiring perubahan zaman dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sistem sosial komunitas Samin di Dusun Jepang Margomulyo Bojonegoro juga tak pelak dari arus perubahan. Ada beberapa aspek kehidupan komunitas Samin yang mengalami dinamika, antara lain: aspek pendidikan, aspek ekonomi, aspek teologi dan aspek teknologi. Beberapa fenomana perubahan sosial yang terjadi pada komunitas Samin Dusun Jepang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

a. Perubahan Aspek Pendidikan

Meski sudah mau sekolah serta mengikuti perubahan di masyarakat sejak awal kemerdekaan, namun rintisan berdirinya sekolah baru dimulai sejak tahun 1967. Hardjo Kardi, generasi ke-4 Samin Surosentiko, merupakan salah satu tokoh pelopor dalam mendirikan lembaga pendidikan. Bersama masyarakat Dusun Jepang, Hardjo Kardi menghimpun berbagai sumber daya untuk mewujudkan keinginan warga masyarakat agar bisa mengenyam dunia pendidikan. Proses belajar mengajar

repo uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

dilakukan di rumah-rumah warga, dengan sumber daya manusia dan fasilitas seadanya.[17] Hal ini menggambarkan bagaimana komunitas Samin Dusun Jepang Margomulyo Bojonegoro begitu terbuka atas perubahan, memiliki semangat untuk terus belajar, meskipun faktor ekonomi dan akses publik menjadi kendala yang masih dihadapi.

Saat ini tercatat ada 7 lembaga pendidikan formal mulai dari tingkat pendidikan dasar hingga menengah di Desa Margomulyo, dan 2 di antaranya berada di Dusun Jepang. Bentuk lembaga yang ada antara lain PAUD/TK, Sekolah Dasar Negeri, SMP Negeri, SMK Negeri. Berikut ini bentuk dan lokasi lembaga pendidikan formal yang terdapat di wilayah Desa Margomulyo:

Tabel 3.2.
Lembaga Pendidikan Formal di Desa Margomulyo

NO	NAMA LEMBAGA	JUMLAH	LOKASI
1	PAUD/TK	1	Dusun Jepang
2	Sekolah Dasar Negeri	4	Dusun Jepang, Dusun Kalimojo, Dusun Sumberjo, Dusun Batang
3	SMP Negeri	1	Dusun Kalimojo
4	SMK Negeri	1	Dusun Jerukgulung

17 Hasil wawancara dengan Bambang Sutrisno pada tanggal 13 Oktober 2021.

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

b. Perubahan Aspek Ekonomi

Sejak awal munculnya gerakan sosial pada komunitas Samin, mereka rata-rata berkerja sebagai petani. Kondisi ini bertalian dengan kondisi sosio-geografis masyarakat Samin dimana mereka tinggal, yakni kebanyakan berada di wilayah pinggiran hutan. Namun saat ini, komunitas Samin Dusun Jepang sudah memiliki beberapa bidang pekerjaan selain bertani atau buruh tani. Sebagaimana telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, meskipun tidak banyak, ada beberapa bidang pekerjaan masyarakat Samin selain sebagai petani, antara lain: buruh, peternak, pedagang, pengrajin, wiraswasta, PNS, ABRI/Polri. Bidang pekerjaan komunitas Samin Dusun Jepang saat ini tercatat ada 54,45% dari keseluruhan warga berprofesi sebagai petani.

Jika dicermati, perubahan bidang pekerjaan masyarakat Samin berbanding lurus dengan perubahan tingkat pendidikan masyarakat. Semakin tinggi rata-rata tingkat pendidikan warga Dusun Jepang, akan membuka kesempatan dalam mengakses berbagai jenis pekerjaan. Kondisi ini secara tidak langsung juga akan mendorong peningkatan pendapatan atau penghasilan masyarakat. Konsekuensinya, tingkat pendapatan akan menjadi faktor penentu pencapaian tingkat ekonomi pada masyartakat bersangkutan.

c. Perubahan Aspek Teologis

Sebagaimana dipaparkan pada bagian sebelumnya,

repo uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

bahwa keyakinan dan kepercayaan masyarakat Samin Dusun Jepang telah mengalami perubahan seiring perkembangan kondisi sosial. Jika pada masa awal mereka memiliki keyakinan tentang Agama Adam serta kepercayaan akan keesaan Tuhan Yang Maha Kuasa, saat ini Islam menjadi agama mayoritas masyarakat Samin Dusun Jepang. Ajaran Islam berkembang secara alamiah sejalan adanya guru ngaji sejak tahun 1980an. Fakor lain yang mempengaruhi perubahan sistem keyakinan dan kepercayaan masyarakat Samin Dusun Jepang adalah karena perkawinan dengan umat Islam yang cukup kuat memegang nilai-nilai keislaman. Begitu juga dari institusi Kementerian Agama, selama ini cukup intensif memberikan penguatan ajaran Islam, sehingga perubahan teologis pada ajaran Islam menjadi salah satu faktor pendorong. Meski begitu, keteguhan mereka pada ajaran Saminisme tetang nilai-nilai kemanusiaan tak lekang oleh perkembangan zaman.

d. Perubahan Aspek Teknologi

Perkembangan arus teknologi informasi di era globalisasi merupakan salah satu kondisi yang tidak bisa dihindari oleh siapapun. Tak terkecuali bagi komunitas Samin Dusun Jepang, pengaruh teknologi merupakan suatu keniscayaan. Cara pandang dan sikap masyarakat Samin Dusun Jepang yang begitu toleran pada dinamika perubahan sosial, tentu menjadi pintu masuk yang terbuka bagi datangnya arus teknologi dan informasi. Saat ini bisa

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

kita lihat bagaimana masyarakat Dusun Jepang Bojonegoro sudah banyak menggunakan kecanggihan teknologi dalam membantu pekerjaan kehidupan sehari-hari. Di samping itu, teknologi bagi masyarakat Samin dipandang sebagai sumber informasi penting serta menjadi sarana hiburan, seperti televisi, radio, komputer, *handphone* dan sebagainya. Bahkan salah satu generasi muda dari keluarga komunitas Samin Dusun Jepang Bojonegoro memiliki keahlian dalam bidang multimedia dengan berbagai karyanya.

Komunitas Samin Dusun Jepang Margomulyo Bojonegoro memaknai perubahan sebagai suatu keniscayaa, sehingga manusia tak akan bisa menghindari perubahan jika hal tersebut dijalankan atas aturan yang semestinya. Untuk bisa berkembang menjadi manusia terbaik, ia harus bisa melihat perubahan dengan fikiran jernih dan ketulusan hati. Perubahan harus diikuti agar tidak ketinggalan oleh perubahan zaman, tetapi harus didasari pada perilaku jujur, sabar, *trokal* (berusaha keras) dan *nrimo* (menerima sesuatu secara ihlas). Bahasa lain yang sering dimunculkan dalam mengahadapi perubahan adalah *ngintiro ning ojo kintir* (ikutilah arus tapi jangan terbawa arus).

B. SUKU TENGGER

1. Asal Usul Suku Tengger

Asal muasal suku Tengger yang tinggal di wilayah Probolinggo, Jawa Timur tidak dapat dilepaskan dari sejarah masyarakat Tengger secara umum. Jamak diketahui bahwa

repo uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

masyarakat Tengger hidup di lereng Gunung Semeru dan Gunung Bromo. Secara administratif, masyarakat Tengger menempati 4 Kabupaten, yaitu Malang, Pasuruan, Lumajang dan Probolinggo. Santoso[18] mengatakan bahwa penyebaran komunitas Tengger di 4 wilayah yang mengelilingi Gunung Bromo dari empat penjuru arah itu menciptakan konsep kearifan lokal masyarakat Jawa yang dikenal '*kiblat papat limo pancer*' atau 'empat arah lima pusat', yang berarti Tengger itu papat dan Gunung Bromo sebagai pancer. Jadi Gunung Bromo merupakan pusat dari seluruh kegiatan masyarakat Tengger dari berbagai penjuru mata angin. Dalam konteks ini, masyarkat Tengger Probolinggo lebih dekat dengan Gunung Bromo.

Gambar 3.8.
Peta Penyebaran Komunitas Suku Tengger

18 Santoso, Listiyono. *Manusia dan Masyarakat Adat Tengger* (Surabaya, Laporan Penelitian: Universitas Airlangga, 2004), 53.

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

Gunung Bromo dan Gunung Semeru memang mempunyai arti tersendiri dari masyarakat Tengger karena berhubungan dengan asal usul masyarakat Tengger. Hal itu bisa kita lihat dalam cerita atau legenda tentang asal-usul masyarakat Tengger, yakni cerita tentang Joko Seger dan Roro Anteng. Sejarah Tengger dimulai sejak masa pemerintahan Airlangga memimpin kerajaan Kediri, kurang lebih sekitar tahun 1.115 M. Joko Seger merupakan pendekar pilih tanding yang mewarisi pusaka Kiai Gliyeng dari ayahnya yang merupakan resi sakti mandraguna, yaitu Musti Kundawa atau Resi Kandang Dewa.[19]

Sementara, Roro Anteng merupakan putri Adipati Surogoto yang memimpin salah satu kadipaten di Kerajaan Kediri, yaitu kadipaten Wengker (daerah Ponorogo). Nama asli Roro Anteng sebenarnya adalah Dewi Ratna Wulan yang terkenal karena kecantikannya. Namun, sejak kecil ia mempunyai penyakit yang sulit disembuhkan. Adipati Surogoto kemudian membuat sayembara untuk mengobati putrinya. Joko Seger mendengar sayembara itu dan berhasil menyembuhkan Dewi Ratna Wulan dan mengganti namanya menjadi Roro Anteng.

Adipati Surogoto merasa senang dan menikahkan putrinya dengan Joko Seger. Namun, setelah beberapa lama menikah, pasangan itu tidak juga dikaruniai seorang buah hati. Joko Seger lalu keduanya pun melakukan semedi di Sanggar Pamujan. Keduanya menyadari telah banyak

19 *Ibid*., 23.

repo uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

melakukan kelahan. Karena itu, untuk menebus kesalahan-kesalahannya, keduanya mengadakan upacara Selamatan Sepasar pada bulan Mengestin, mengadakan *sadulur papat kelima badan* dan mengadakan *sesuci* serta melaksanakan *tolak brata* selama 40 hari 40 malam.

Berikut beberapa asal-usul kata Tengger yang memiliki makna pemahaman yang berkembang di lingkungan masyarakat Tengger:

a. **Tengger: *Tetenger* atau *Tenger***

Menurut cerita, setelah melakukan Selamatan Sepasar itu, dalam waktu 40 tahun Joko Seger dan Roro Anteng dikarunia 25 anak. Anak-anak mereka diajarkan untuk menjaga Gunung Bromo, bahkan menurut beberapa cerita, anak ke-25 dibawa terbang oleh api yang membara ke gunung Bromo. Sehingga, hal itu menjadi alasan agar anak-anak dari Joko Seger dan Roro Anteng menyambangi saudaranya yang 'tinggal' di Gunung Bromo.

Di akhir perjalanan hidupnya, Joko Seger dan Roro Anteng melakukan perjalanan dalam rangka semedi di daerah Oro-Oro Ombo. Mereka membuat tetenger atau semacam catatan perjalanan beserta perlengkapan serta mantra-mantra selam mereka melakukan Ritual semedi. *Tetenger* itu dimasukkan ke dalam jodog dan ditanam disekitar daerah Oro-oro Ombo. Beberapa jimat yang ditanam adalah jimat Idontong, jimat Kidontong, dan beberapa mantra-mantra yang dikenal dengan nama Purwa Bumi.

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

Jimat-jimat itulah yang dicari oleh Prabu Wijaya saat memimpin Kerajaan Majapahit. Namun, anak keturunan Joko Seger tidak tinggal diam dan melakukan perlawanan untuk mempertahankan warisan dari kedua orang tuanya, terutama Ki Sari Noto dan Ki Dadap Putih. Dalam mengambil pusaka atau jimat warisan dari orang tuanya itu, mereka mendapatkan tanda-tanda tentang letak jimat tersebut. Tanda dalam bahasa Jawa berarti *Tetenger* atau *tenger*. Dari tenger inilah kemudian muncul salah satu versi sejarah bahwa Tengger diambil dari kata *Tetenger*.[20]

b. **Tengger: *Tenggering Budi Luhur***

Versi lain disebutkan bahwa Tengger berarti *Tenggering Budi Luhur* atau tanda keluhuran budi pekerti. Hal ini mengacu pada versi lain dari cerita Joko Seger dan Roro Anteng yang merupakan contoh dari keluhuran budi pekerti. Diceritakan bahwa Joko Seger merupakan seorang putra seorang Brahmana dari Gunung Pananjakan, sementara Roro Anteng merupakan putri dari Raja Majapahit Prabu Brawijaya. Mereka hidup bersama di kaki Gunung Bromo dan menjaga kelestarian lingkungan di sekitar gunung bersama anak-anaknya. Mereka memberikan contoh hidup bersama dengan alam kepada anak-anaknya.

20 Ayu Sutarto, 2006, Sekilas tentang Masyarakat Tengger, Makalah disampaikan pada Jelajah Budaya 2006 yang diselenggarakan oleh Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta, tanggal 7-10 Agustus 2006.

repo uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

"Bahwa yang pertama, melestarikan adat istiadat. Kita juga menyampaikan kepada anak kita, supaya tidak hilang apa yang sudah dilakukan orang tua, kita lakukan, yang itu dianggap tidak merugikan dan tidak melanggar undang-undang. Lalu, secara umum, mudahan-mudahan, beranggapan apa yang telah kita lakukan ini juga tentunya menurut ajaran agama tidak menyimpang."[21]

Perilaku yang budi luhur yang dimaksudkan dalam masyarakat Tengger adalah sikap hidup yang harmonis dan seimbang antara manusia dengan Tuhan, antara manusia dengan manusia lainnya, serta manusia pada lingkungannya. Maysarakat Tengger juga dikenal dengan perilaku peduli dengan lingkungan. Hal itu lantaran, menurut Rujianto, antara alam dan manusia lebih dulu alam. Karena itu manusia sudah seharusnya menghormati alam.

"Desa dulu itu kan berawal dari hutan belantara. Tidak mungkin langsung lapang. Hutan belantara dengan pohon yang besar-besar. Lha, kita percaya bahwa di samping manusia yang hidup pasti berdampingan dengan mereka yang tidak terlihat dengan mata kepala sendiri, ada jin, dan

21 Wawancara Bapak Rujianto, Pemuka Agama Hindu dan Perangkat Desa Ngadirejo, pada tanggal 12 Oktober 2021 di Rumah Beliau.

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

semacamnya. Semua agama juga kan percaya ini. Lha, karena banyak hutan belantara, itu pastinya ada. Ketika ditempati manusia, lha itu kan ada pergeseran, 'wong ini tempat saya kok ditempati.' Maka dari itu, ada ritual –ritual semcam itu kita karena dulu belum ada agama, jadi adat menggunakan acara-acara ritual seperti itu. Supaya kita tidak mengusir, kita berdamai dengan mereka, apa permintaanya, nanti setelah itu sampean pergi ke sana. Italah kenapa ada ritual seperti itu. Kita ya melanjutkan.Cerita wayang misalnya, sawung gali. Itu termasuk cerita, babad alas. Jadi sebelum ada tanah lapang, pasti ada hutan belantara."[22]

c. **Tengger: *Tiang Tengger***

Cerita lain tentang sejarah masyarakat Tengger adalah berhubungan dengan kedatangan Islam di Pulau Jawa. Cerita tersebut bermula dari perseteruan antara Raja Majapahit Raden Brawijaya V dengan anaknya Raden Patah pada kisaran abad 15. Raden Patah sendiri saat itu menjadi Raja atau Sultan di Kerajaan Demak. Raden Patah ingin keluarganya dan masyarakat Majapahit untuk memeluk agama Islam. Namun, peperangan malah terjadi.

22 Wawancara Bapak Rujianto, Pemuka Agama Hindu dan Perangkat Desa Ngadirejo, pada tanggal 12 Oktober 2021 di Rumah Beliau.

repo uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

Peperangan tersebut kemudian dimenangkan oleh Raden Patah dan pasukannya, sehingga Raja Brawijaya V dan pasukannya pergi meninggalkan ibu kota Majapahit dan pergi ke daerah pedalaman Gunung Bromo dengan tetap berusaha melestarikan tradisi agama Hindu-Budha. Sebagian ada juga yang melarikan diri ke Bali. Dalam wawancara yang dilakukan Farisha Firni (2020) dalam penelitiannya, Dukun Sutomo mengatakan cerita itulah yang menjadi cikal bakal masyarakat Tengger. Di samping itu, Suyono (2009 :34) juga mengatakan bahwa kedatangan Islam di Jawa mendesak orang Hindu untuk meninggalkan pantai menuju wilayah yang sulit dijangkau pendatang, yaitu di daerah kaki Gunung Bromo. Karena itu, terdapat suatu istilah sebagai identitas masyarakat Tengger adalah *Tiang Tengger*.[23]

Dari ketiga sejarah dan makna dari kata Tengger, ada juga makna lain yang menyebutkan bahwa Tengger adalah akronim dari *anteng* dan *seger*. Seperti yang dijelaskan oleh Alim, seorang pemuda Tengger dan sekaligus pendamping desa.[24] Maksud dari *anteng* dan *Seger* itu adalah masyarakat Tengger cenderung mengedepankan keamanan dan perdamaian. Sehingga, lanjut Alim, jarang ditemukan adanya kriminalitas dan perselisihan antar warga di

23 Capt. R. P. Suyono. *Mistisme Tengger*, (Yogyakarta: LkiS, 2009), 23.

24 Wawancara dengan Bapak Alim, Pemuda sekaligus Pendamping Desa tingkat Kecamatan, pada tanggal 12 Oktober 2021 di rumahnya.

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

Tengger.[25] Sedikit berbeda dengan makna tersebut, Rujianto memahami *anteng* dan *seger* sebagai sikap masyarakat Tengger yang tidak berfikir *muluk-muluk* (di luar batas kemampuan/kewenangan). Ia mengatakan:

> "Jadi memang Tengger itu terkenal dengan anteng dan seger. Maksudnya, orangnya itu tidak neko-neko. Tidak pernah berfikir terlalu muluk-muluk, misalnya ini nanti sorga. Jadi kita tidak ke situ. Yang penting kita berbuat baik, surga-neraka itu urusah Tuhan yang maha kuasa."[26]

d. **Peninggalan dan Prasasti di Tengger**

Berbagai cerita rakyat atau legenda yang beragam tentang asal usul masyarakat tentu perlu digali lebih lanjut secara lebih mendalam melalui kajian yang lebih mendalam, baik dari segi antropologi, filologi atau historiografi. Hal ini mengingat banyak ditemukan prasasti-prasasti yang ada di kawasan tersebut. Misalnya, Prasasti yang ditemukan di Desa Walandhit yang bertitimangsa sekitar tahun 929 Masehi. Prasasti itu menceritakan penduduk desa Walandhit yang dihuni oleh Hulun Hyang, yaitu seorang yang mengabdikan hidupnya kepada Dewata.[27]

---

25 Ibid.

26 Wawancara Bapak Rujianto, Pemuka Agama Hindu dan Perangkat Desa Ngadirejo, pada tanggal 12 Oktober 2021 di Rumah Beliau.

27 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Profile Jawa Timur*. (Pemerintah Jawa Timur: 2010), 177.

repo uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

Prasasti yang lain juga menyatakan bahwa di kawasan tersebut penduduknya melakukan peribadatan yang berkiblat di Gunung Bromo dan menyembah Dewa Sang Hyang Swayambuwa atau dalam Agama Hindu dikenal sebagai Dewa Brahma. Bukti lain, tentang keberadaan masyarakat Tengger diperkuat dengan penemuan pada tahun 1880 sebuah prasasti yang terbuat dari kuningan di daerah Penanjakan, Desa Wonokitri Kabupaten Pasuruan. Prasasti itu dibuat pada tahun 1327 saka (1407 M) prasasti ini menyebutkan tentang Desa Walandhit yang dihuni oleh Hulun Hyang atau abdi dewata, tanahnya disebut hila-hila atau suci.

Nama Walandhit adalah tempat suci pada zaman kerajaan Majapahit. Kelompok masyarakat Desa Walandhit memeluk Agama Budha dan Dewa Siwa yang dipimpin oleh seorang siddhapandita (pendeta yang ilmunya sempurna) dan memimpin suatu mandala. Hubungan antara orang walandhit dengan Agama Hindu tidak hanya sebatas pada bukti prasasti yang ditemukan tetapi bukti-bukti pada naskah kuno yang ditulis pada zaman Majapahit.[28]

Bukti lain ditemukan pada naskah Tantri Tamandaka yang membahas tentang orang walandhit dengan Agama Hindu. Dalam naskah tersebut digambarkan bahwa Gunung Bromo bagi penganut Agama Hindu dipercaya memiliki hubungan dengan Dewa Brahma. Gunung Bromo dijadikan tempat pemujaan kepada Hyang Widhi Wasa dalam Dewa

28 Ibid., 179.

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

Brahma dan digunakan sebagai tempat penyucian para arwah untuk bisa ke kayangan. Lautan pasir segoro wedhi sebagai jalan lintas arwah manusia yang harus disucikan sebelum naik ke kayangan. Proses penyucian arwah tersebut digambarkan dalam upacara entas-entas (upacara adat Tengger). Dalam upacara, api penyucian dari Dewa Siwa dan Dewi Uma digunakan untuk mensucikan arwah manusia agar sang arwah dapat naik ke kayangan.

Kemampuan untuk melestarikan kebudayaan menjadikan masyarakat Tengger sebagai salah satu masyarakat adat di Nusantara dengan berbasis kearifan lokal.[29] Perbedaan antara masyarakat Jawa dan masyarakat Tengger tidak jauh mendasar. Penghormatan masyarakat Tengger terhadap adat yang mengakar menjadikan unsur pembeda dengan masyarakat Jawa.

Pemeliharaan adat oleh masyarakat Tengger dibuktikan dengan keberlangsungan tradisi pemberian sesaji kepada para dewa sebagai ungkapan syukur dan terima kasih pada perayaan *slametan* sesudah panen pada musim Karo yang dinamakan *slametan* desa atau *slametan bumi*. Upacara ini juga dilakukan ketika mereka mengalami gagal panen, karena kegagalan tersebut diartikan sebagai kemurkaan dewa. Pelaksanaan slametan bumi disebut perayaan pauman yang dilakukan tanpa sesaji makanan. Kepercayaan lain yang

29 Joko Tri Haryanto, "Kearifan Lokal Pendukung Kerukunan Beragama pada Komuntias Tengger Malang Jatim", *Jurnal Analisa*, Volume 21 Nomor 02 Desember, (Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang, 2014), 206.

repo uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

dimiliki masyarakat Tengger berasal dari pemujaan kepada matahari, bulan, bintang, dan binatang yang dipercaya sebagai unsur utama yaitu, api, air, udara, dan tanah.[30] Sifat keramahan dan keterbukaan masyarakat Tengger sebelumnya terjadi dikalangan sendiri tapi sistem perdagangan yang berkembang mengakibatkan mereka hidup berdampingan dengan kelompok masyarakat lain secara damai.

2. **Sistem Keyakinan/Kepercayaan Suku Tengger**

2.a. Sistem Keyakinan: Agama sebagai *Agem-agem* (Prinsip Toleransi)

Bila ditinjau secara umum, keyakinan masyarakat suku Tengger sebagian besar dipengaruhi oleh agama Hindu, dengan pura sebagai pusat keagamaan dan Gunung Bromo diyakini sebagai tempat tinggal sementara para dewa. Akan tetapi, jika ditinjau secara detil, maka akan terlihat bahwa

30 Suyono, Capt.R.P. 2009. Mistisme Tengger. Yogyakarta: LKIS. Hlm. 23.

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

masyarakat Tengger lebih mengedepankan aspek pluralisme, toleransi dan keterbukaan. Seperti yang disampaikan oleh Rujianto:

> "Tidak usah ditabrakkan. Agama dan adat itu tidak usah ditabrakan. Bentuknya memang berbeda, tapi maksud dan tujuannya sama. Misalnya, sajian Hindu Tengger sajian reresik tadi, di Bali juga ada, tapi pakai janur. Kita pakai pisang. Karena banyak pisang. Kedua, kita meyakini bahwa kita adalah *desa kala patra*. Desamu ya desamu, adatnya. Desaku ya desaku. Jadi kalau saya orang sini mau ke Ngadirejo, saya tidak pakai adat sini, tapi pakai adat Ngadirejo. Itulah yang membuat kita, umat Hindu di tengger ini tidak membedakan. Semua saudara, meskipun bentuknya beda. Misalnya di atas dan di bawah bentuk ritualnya beda. Harinya bahkan beda. Tapi maksudnya beda."[31]

Selain aspek toleransi dan keterbukaan yang luar biasa dari masyarakat Tengger, aspek keyakinan lain dapat kita jadikan sebagai contoh dalam keyakinan masyarakat Tengger adalah terkait tentang keyakinan hubungan manusia dengan alam.

---

31 Wawancara Bapak Rujianto, Pemuka Agama Hindu dan Perangkat Desa Ngadirejo, pada tanggal 12 Oktober 2021 di Rumah Beliau.

repo uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

"Memang sangat erat hubungan masyarakat Tengger dengan alam. Karena ya itu petani. Kedua, barangkali memang dari orang tuanya seperti itu, untuk merawat tinggalan orang tua. Ya terlepas dari itu, agama Hindu juga kan mengajarkan begitu. Trida Karna. Hubungan kita dengan alam, tuhan, manusia, kan begitu."[32]

Peran penting sistem keyakinan dalam masyarakat Tengger adalah karena keyakinan itu cukup besar dalam mempengaruhi pembentukan kepribadian individu. Kehidupan masyarakat Tengger yang teratur dan tingginya toleransi dan pluralisme, tidak lain adalah karena pengaplikasian sistem keyakinan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa tidak boleh hidup merusak alam itu adalah bagian dari sistem keyakinan adat, begitu juga patuh pada orang tua, menghargai sesama manusia, serta menebang pohon secara liar.

Diakui oleh Rujianto bahwa sistem keyakinan adat di masyarakat Tengger memang tidak ditulis atau diatur secara formal. Namun itu lebih diturunkan secara lisan turun temurun dari orang tua ke anaknya.

"Bahwa yang pertama, melestarikan adat istiadat. Kita juga menyampaikan kepada anak kita, supaya

32 Wawancara Bapak Rujianto, Pemuka Agama Hindu dan Perangkat Desa Ngadirejo, pada tanggal 12 Oktober 2021 di Rumah Beliau.

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

tidak hilang apa yang sudah dilakukan orang tua, kita lakukan, yang itu dianggap tidak merugikan dan tidak melanggar undang-undang. Lalu, secara umum, mudahan-mudahan, beranggapan apa yang telah kita lakukan ini juga tentunya menurut ajaran agama tidak menyimpang. Sebenarnya sama, tapi suguhan-nya beda. Di Tengger misalnya pakai pisang, tapi kalau ritual agama, itu pakai janur."[33]

Dalam keseharian, secara umum masyarakat Tengger bebas memeluk agama apapun. Karena pada dasarnya mereka semua mempunyai keyakinan yang kuat untuk meneruskan tradisi dari para leluhur.

"Kalau saya simpel, wong ya dulu ini kakek buyut meninggalkan apa yang kamu minum, apa yang kamu tempati, apa yang kamu nikmati, itu adalah tinggalan dari leluhurmu. Kenapa kamu tinggalkan ajaran dari leluhurmu. Terlepas sebenarnya kalau Tengger itu agamanya bebas. Agama hindu kek, muslim kek, dulu di sini campur. Bahkan yang pakai iket ini tidak hanya orang Hindu sebenarnya dulu. Muslim juga pakai ini, di Sapi Kerep kepala

33 Wawancara Bapak Rujianto, Pemuka Agama Hindu dan Perangkat Desa Ngadirejo, pada tanggal 12 Oktober 2021 di Rumah Beliau.

repo uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

desa, Pak Haji, ya pakai udengan. Sama. Karena ini bukan agama. Ini komunitas. Orang nasrani, muslim, hindu atau apapun, ya itu. Komunitas. Tidak melihat agama."[34]

Namun demikian, di beberapa daerah di kawasan Tengger, masyarakat Tengger tetap memeluk salah satu agama 'resmi' dari pemerintah. Beberapa agama yang dianut oleh masyarakat Tengger diantaranya adalah agama Hindu dan Islam. Sementara, untuk keyakinan agama, masyarakat Tengger diketahui memulai gerakan di bidang keagamaan secara resmi baru pada tahun 1973. Terkait dengan kesadaran agama resmi Hindu ini, Murjianto bertutur:

"Agama di Tengger itu baru ada tahun 73 secara resmi. *Lha wong* saya SD itu agama disuruh Budha gitu pleh orang tua. Tapi ketika ditanya ssembahyang gimana? *Nggak bisa.* Tuhannya siapa? *Nggak bisa.* Akhirnya pada waktu itu dari majlis lima dari seluruh perwakilan agama, MUI, Walubi, dari Kristen dan yang lain turun tangan untuk survey di Ngadisari waktu itu sebenarnya orang tengger itu agamanya apa? Kemudian diteliti Jabamantranya Dukun Pandita dengan sesajinya itu ternyata tidak *nyambung* dengan yang

34 Wawancara Rujianto.

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

dikatakan agama Budha. Ganti agama Kristen, Katolik, apalagi Islam semuanya *nggak* cocok. Akhirnya Ketika ditanya nama-nama Dewa kok menyebut Siwa, Wisnu,Iswara, Betoro, kemudian disimpulkan berarti mereka aadalah orang Hindu tetapi tidak terbina. Ya, mungkin karena dulu jauh dari keramaian. Sehingga Ketika menganut agama tersebut berkembang dengan sendirinya sesuai dengan pemahaman dengan alam."[35]

Salah satu alasan diberikan keyakinan atau agama formal itu adalah untuk mendefinisikan jati diri masyarakat Tengger sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang tetap bersandar pada adat istiadat dan warisan leluhur. Agama Hindu yang dianut sebagian besar masyarakat Tengger mendapat pengaruh juga dari aspek historis -- selain karena banyak bukti peninggalan dan pura. Diketahui, awal mula penduduk Tengger adalah masyarakat Hindu dari kerajaan Majapahit yang pindah ke Gunung Bromo untuk tetap bisa beribadah sesuai dengan keyakinannya.[36]

Pendidikan keagamaan Hindu dimulai dengan mengajarkan materi-materi agama dari orang tuanya. Selain itu, di sekolah dasar, anak-anak juga mendapatkan materi keagamaan dari

35 Wawancara dengan Murjianto, tokoh dan guru agama Hindu Tengger pada tanggal 13 Oktober 2021.

36 Santoso, Listiyono. 2004. Manusia dan Masyarakat Adat Tengger. Laporan Penelitian: Surabaya, Universitas Airlangga. hlm. 67.

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

guru yang didatangkan dari Bali. Para guru agama Hindu dari Bali itu mempunyai tugas untuk membentuk kelompok belajar bagi para pemuda dan orang tua untuk belajar agama Hindu beserta dengan doa-doa dalam bahasa Sansekerta. Dalam perkembangannya, mereka juga mendirikan sekolah agama atau Parisada Hindu.

Pendirian Parisada Hindu membuktikan bahwa masyarakat Tengger menerima ajaran Agama Hindu dengan terbuka. Parisada Hindu berfungsi sebagai tempat menyiarkan agama, mengatur pernikahan, mengatur kematian, dan menjalankan kebijakan parisada yang lebih tinggi di Surabaya. Peraturan pemerintah yang mengharuskan setiap warga Negara Indonesia memeluk keyakinan agar diakui oleh Undang-Undang Dasar 1945 juga sebagai salah satu latar belakang sistem religi pada masyarakat Tengger.

Salah satu hal yang perlu dicatat dalam keyakinan agama Hindu di masyarakat Tengger adalah konsepsi pura yang sangat sakral. Fungsi pura secara umum adalah tempat untuk melakukan sembahyang bagi Umat Hindu. Dalam Agama Hindu di daerah Tengger sembahyang dilakukan tiga kali sehari, yaitu pada waktu pagi, siang, dan malam. Datangnya waktu sembahyang ditandai dengan sebuah panggilan yang bertujuan mengajak masyarakat untuk pergi ke pura. Panggilan tersebut adalah kidung-kidung suci yang dilantunkan oleh anak-anak hingga orang dewasa.

Pura merupakan tempat yang digunakan untuk memuja Hyang Widi dalam Prabhawa-Nya, Tat atau Sat

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

atau tunggal ada-Nya, baik Tat atau Sat maupun Yang Esa akan hadir dimana-mana, memenuhi, dan mengatasi segalanya yang dipuja dengan wujud yang berbeda-beda (indra, Mitra, Waruna, Agni yang bercahaya, Garutman Yang bersayap elok dan sebagainya). Makna filosofis pura dilihat pemaknaan tanah dan bukan dari arsitektur bangunan. Tanah yang akan dijadikan sebuah pura adalah tanah suci. Pura diyakini merupakan tempat tinggal sementara para dewa sebab para penduduk Tengger memiliki kepercayaan bahwa tempat tinggal para dewa yang sesungguhnya berada di puncak gunung Bromo.[37]

Pada waktu tertentu para dewa akan turun ke madyapada untuk melakukan sebuah interaksi dengan manusia dalam bentuk upacara-upacara. Pura Tunggal Jati merupakan sebuah bangunan yang digunakan untuk memuja dan mengagungkan kebesaran tuhan Hyang Whidi Wasa disertai dengan berbagai macam ritual yang mengikuti. Suyono[38] juga menjelaskan konsep kompleks pura terdiri dari tiga bagian yaitu, mandala nista (jaba), mandala madya (jaba tengah), dan mandala utama (jeroan).

i. Mandala Nista (jaba)

Pintu gerbang masuk ke halaman luar terdiri dari suatu pintu gerbang, yang dibelah menjadi dua bagian yang sama

37 Suyono, Capt.R.P. *Mistisme Tengger* (Yogyakarta: LKIS, 2009), 45.

38 Ibid., 46-47.

repo uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

yang diletakkan di samping lain dalam jarak yang sempit (candi bentar). Bagian yang menghadap ke luar dihias dengan ukir-ukiran sedangkan bagian yang menghadap ke dalam dibiarkan tidak bergambar (polos).

ii. Mandala Madya (jaba tengah)

Halaman luar dihubungkan dengan halaman tengah oleh sebuah pintu gerbang yang beratap disebut paduraksa. Jika ingin memasuki pintu gerbang harus menaiki beberapa tangga karena halaman tengah lebih tinggi daripada halaman luar. Diatas pintu gerbang terdapat sebuah patung kepala Bhoma (anak Dewa Wisnu dengan Pretiwi) yang berfungsi sebagai penolak pengaruh jahat yang akan memasuki halaman tengah.

iii. Mandala Utama (jeroan)

Halaman tengah dihubungkan dengan halaman dalam oleh sebuah candi bentar yang sama bentuknya dengan candi bentar di luar. Halaman ini merupakan tempat yang paling suci, tempat para dewa hadir untuk berkomunikasi dengan manusia. Di halaman dalam juga terdapat bagunan yang disebut bale berfungsi sebagai tempat singgasana para dewa. Bale-bale tersebut ditempatkan di tembok belakang halaman. Terdapat beberapa bale untuk Batara Maospait, yang disebut bale manjangan seluwang, dan bale untuk Sang Hyang Trimurti disebut bale tiga sakti. Selain terdapat bale, dalam halaman tersebut juga memiliki sebuah tiang yang terbuat dari batu berfungsi sebagai tempat untuk meletakkan

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

sesajen untuk toksu atau ngerurah. Singgasana yang terbuat dari batu dan tanpa atap disebut padmasana. Padmasana digunakan sebagai singgasana Sang Hyang Widi.

Pawedan di sebelah barat padmasana digunakan untuk rumah Romo Pandita untuk memuja. Sanggar atau punden digunakan untuk melaksanakan pacara Unan-Unan yang dilaksanakan 5 tahun sekali.

Di samping keyakinan agama yang dianut oleh masyarakat Tengger, baik itu muslim maupun hindu, di dalam keseharian masyarakat Tengger itu tidak terlalu berpengaruh karena mereka percaya bahwa agama itu hanyalah *agem-agem*.

> "Bahasanya orang desa itu kan sederhana saja. Agama itu sebenarnya hanyalah agem-agem. Agem-agem itu kan pegangan dalam hati saja. Kan tidak terlihat. Kalau saya berbaju begini apa saja kelihatan agama Hindu? Kan tidak. Kan tidak kelihatan. Mungkin barangkali kalau kita mau ke pura, kita pakai udeng ya, itu dinyatakan saya hindu. Kalau saya pakai kopyah, berarti muslim."[39]

Merujuk pada keyakinan tersebut, menurut Rujianto toleransi dan saling menghargai sesama manusia lebih

39 Wawancara Bapak Rujianto, Pemuka Agama Hindu dan Perangkat Desa Ngadirejo, pada tanggal 12 Oktober 2021 di Rumah Beliau.

repo uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

dipentingkan dalam keseharian masyarakat Tengger. Sehingga tidak salah kalau Tengger itu merupakan akronim dari anteng dan seger. Karena mereka cenderung tidak neko-neko dan tidak muluk-muluk untuk mau mencampuri urusan Tuhan. Apalagi kalau masyarakat Tengger itu sudah meminum Air Tengger. mereka meyakini bahwa yang penting adalah berbuat baik pada sesama manusia dan menjaga alam, urusan surga dan neraka adalah urusan Tuhan Yang Maha Kuasa.[40]

2.b. Kepercayaan Suku Tengger

i. Kepercayaan Hindu Mahayana

Identifikasi kepercayaan masyarakat Tengger secara spesifik disebutkan dalam penelitian Suyono. Ia menyebutkan bahwa kelompok masyarakat Tengger mempunyai agama kepercayaan yang disebut Hindu Mahayana.[41] Sebenarnya, agama Hindu Mahayana ini mulai dikenal ketika masa kerajaan Singosari, kemudian agama ini ikut berkembang pada masa Kerajaan Majapahit. Penganut agama Hindu Mahayana memuja Brahma sebagai Dewa yang mereka percayai ada dan melindungi masyarakat Tengger. Suyono menyatakan dalam bukunya Mistisisme Suku Tengger bahwa:

40 Wawancara Bapak Rujianto, Pemuka Agama Hindu dan Perangkat Desa Ngadirejo, pada tanggal 12 Oktober 2021 di Rumah Beliau.

41 Suyono, 23

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

> "Pada abad ke 16 pelarian dari Iran yang beragama Hindu Parsi membuat Suku Tengger berpindah agama, yang semula Hindu Mahayana menjadi Hindu Parsi. Perpindahan agama tersebut tidak seluruhnya membuat Suku Tengger melupakan kepercayaan awal mereka. Masyarakat Suku Tengger masih tetap melakukan ajaran Budha. Hal tersebut juga membuat penganut asli agama Hindu Parsi mengikuti ajaran Hindu Mahayana Suku Tengger, sehingga terjadi peleburan agama antara Hindu Mahaya dan Hindu Parsi."[42]

Percampuran antar agama Hindu tersebut sedikit banyak mempengaruhi kepercayaan Hindu sebelumnya, yakni Hindu Mahayana. Pencampuran tersebut hanya mempengaruhi sistem kepercayaan, untuk sistem kehidupan umumnya Suku Tengger masih berpegang pada sistem kehidupan yang dijalankan nenek moyang.

ii. Kepercayaan Gunung Bromo

Gunung Bromo, tepatnya kawah Gunung Bromo sebagai tempat suci orang Suku Tengger yang digunakan sebagai persembahan hewan ternak dan hasil bumi pada upacara Kasada. Persembahan-persembahan tersebut nantiya akan di lemparkan ke kawah Gunung Bromo. Upacara

42 Ibid., 25.

repo uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

tersebut dilakukan untuk menghormati anak Jaka Seger dan Rara Anteng yang bernama Raden Kusuma yang telah berkorban untuk melindungi Suku Tengger dari bencana alam dahsyat.

iii. Kepercayaan Nenek Moyang

Masyarakat Suku Tengger sebagai suku yang masih mempercayai keberadaan roh nenek moyangnya. Kebanyakan masyarakatnya masih melakukan serangkaian ritual yang berhubungan dengan penghormatan kepada roh nenek moyang. Suyono menyatakan bahwa :

> "Masyarakat Suku Tengger memiliki tiga prinsip ajaran Hindu yang di dalamya masih ada kepercayaan terhadap nenek moyang. Ketiga prinsip tersebut ialah pemujaan kepada Tuhan, pemujaan kepada leluhur dan pemujaan kepada alam semesta."[43]

Kepercayaan yang kuat terhadap roh leluhur amat dipegang teguh oleh Suku Tengger. Setiap tahun, Suku Tengger mengadakan upacara Kasada yakni upacara pemujaan kepada roh leluhur yang dilakukan di kawah Gunung Bromo.

43 Ibid, 25.

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

iv. Pengaruh Agama Islam terhadap Agama Hindu di Suku Tengger

Mulanya penduduk asli suku Tengger tinggal di pesisir pantai di Probolinggo dan Lumajang. Mereka tinggal di sana selama masa kerajaan Majapahit masih menganut ajaran agama Hindu, kemudian Islam mulai masuk di kerajaan Majapahit. Suyono menyatakan dalam bukunya yang berjudul Mistisisme Suku Tengger bahwa :

> "Pada tahun 1426 SM datangalah ajaran agama Islam yang kemudian membuat penganut Hindu Waisya tersisihkan. Penganut Hindu Waisya kemudian mencari tempat di kawah Gunung Bromo yang jauh dari pendatang."[44]

44 Ibid., 23.

repo uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

Namun, lambat laun agama Islam mulai berkembang pesat di wilayah Suku Tengger karena keterbukaan dan kesenangan orang Tengger dengan kegiatan berdagang.[45] Akhirnya, di dalam Suku Tengger juga terdapat masyarakat yang menganut ajaran agama Islam. Mereka menyebar di berbagai desa di tengah mayoritas warga beragama Hindu. Uniknya, khusus di Kecamatan Sukapura Probolinggo, terdapat satu desa yang mayoritas masyarakatnya memeluk ajaran agama Islam yakni berada di Desa Wonokerto. Desa ini berada di tengah-tengah antar desa, bahkan sudah hampir mendekati desa puncak menuju kawah gunung Bromo. Di sana, terdapat masjid serta lembaga pendidikan agama Islam. Secara umum, umat Islam dalam Suku Tengger masih mempercayai ritual *ngelmu* yang berhubungan dengan penentuan hari baik dan hari buruk. Akulturasi budaya Tengger-Islam bagi pemeluk agama Islam berjalan dengan harmonis sehingga pergumulan antar agama terjadi cukup harmonis dan indah.

Sistem kepercayaan dan keyakinan suku tengger terejawantakan dalam praktik-praktik upacara ada yang diatur dengan menggunakan kalendr khusus masyarakat Tengger. Berikut berapa upacara yang dimaksud:

a. Upacara Kasada

Upacara Kasada adalah upacara yang agama Hindu yang dilakukan oleh suku Tengger namun tidak dilakukan oleh

45 Ibid., 26

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

pemeluk agama Hindu yang lain. Upacara ini sangat berkaitan erat dengan cerita mengenai asal usul masyarakat Tengger terutama mengenai legenda Roro Anteng dan Joko Seger. Setelah menikah, Roro Anteng dan Joko Seger sangat ingin memiliki keturunan. Mereka pun akhirnya memohon kepada Dewata agar bisa memiliki 25 orang anak. Permohonan mereka dikabulkan namun dengan syarat anak yang ke-25 harus dipersembahkan untuk Dewa Bromo. Ketika dewasa, Kusuma anak dari Roro Anteng dan Joko Seger menceburkan diri ke kawah Gunung Bromo dan meminta saudara-saudaranya agar pada bulan kesepuluh tepat pada bulan purnama memberikan kurban ke kawah Gunung Bromo, upacara ini kemudian menjadi awal mula dilaksanakannya upacara Kasada.

Upacara kasada itu pada kalender Tengger jatuh pada bulan ke-12 kalender Tengger. Kegiatan adat Istiadat secara rutin tiap bulan terus dilestarikan oleh masyarakat Tengger. Murjianto menceritakan:

> "Rangkaian upacara sebenarnya biasanya dimulai dengan kumpul Karo. Saya sebutkan bulannya dulu ya, Kasa, Karo, Ketiga, Kapat, Kalima, Kanem, Kapitu, Kawulu, Kasanga, Kasepuluh, Kesta, Kasada. Terus bulan pertama Kasa *niku wonten* upacara kumpul Karo. Terus *wulan* Karo *wonten* Hari Raya Karo. Ketiga mboten wonten, terus wonten Pujan Kapat di bulan keempat. Terus kalima kosong. Kanem persiapan Megeng Kapitu, niku petengan menyambut

repo uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

badhe ngelakuni Brata, tidak makan asin dan tidak makan manis selama 30 hari. Meniko megeng Kapitu, menawi ten muslim niku nggeh Puasa. Pada awalnya, megeng Kapitu itu untuk semua warga, tapi dengan perkembangan zaman akhirnya diserahkan ke pamong desa. Kemudian Pujan kewolu itu diselameti. Terus pujan Kesanga diselameti, ibaratnya di Bali sama dengan Tawur Agung, Nyepi. Terus kemudian baru terakhir Kasada itu."[46]

Dari sekian upacara tersebut, sebenarnya terdapat dua perayaan besar yang rutin mereka lakukan. R.P. Suyono menyatakan bahwa:

"Dua perayaan terbesar orang-orang Tengger jatuh pada hari ke-14 atau ke-15, pada pagi harinya setelah bulan purnama pada bulan kedua dan kedua belas. Jadi, tepatnya pada Karo ke-14 atau ke-15 dan Kasada ke-14 atau ke-15 dengan perbedaan antara sebesar sepuluh dan dua bulan.[47] Acaranya diisi dengan pemujaan-pemujaan yang disebut dengan pujan Kasa."[48]

---

46 Wawancara dengan Murjianto, tokoh dan guru agama Hindu Tengger pada tanggal 13 Oktober 2021.

47 Suyono, 29.

48 Wawancara dengan Murjianto, tokoh dan guru agama Hindu Tengger pada tanggal 13 Oktober 2021.

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

Dalam meminta pengampunan dari Brahma, masyarakat Suku Tengger melakukan pengorbanan, apa yang dikorbankan dibuang ke kawah Gunung Tengger. Pengorbanan tersebut berupa makanan, uang, dan pakaian. Pada zaman dahulu sebelum mengenal pengorbanan dalam bentuk barang, dimungkinkan orang Tengger melakukan pengorbanan dalam bentuk manusia.

Terdapat tiga tempat penting dalam prosesi perayaan Kasada yakni rumah dukun adat, pura Poten Luhur dan kawah Gunung Bromo. Upacara Kasada ini dilaksanakan mulai dari tengah malam hingga dini hari, untuk melaksanakan perayaan ini, dilakukan persiapan sejak pukul 24.00 WIB yang dimulai dengan bergerak dari depan rumah dukun adat dan sampai di Pura Luhur Poten sekitar pukul 04.00 WIB. Sebelum upacara dilaksanakan dukun pandita terlebih dahulu melakukan semeninga, yaitu persiapan untuk upacara yang bertujuan memberitahukan para Dewa bahwa ritual siap dilaksanakan. Ketika sudah sampai di Pura Luhur Poten, semeninga kembali dilaksanakan. Ritual Kasada dilaksanakan dengan menempuh perjalanan dari Pura Luhur Poten menuju kawah Gunung Bromo.

Dalam perlengkapan sesaji yang digunakan dalam perayaan Kasada terdapat dua unsur penting yaitu kepala bungkah dan kepala gantung. Sedangkan bagi beberapa orang yang memiliki permohonan khusus disyaratkan untuk membawa ayam atau kambing sebagai persembahan.

repo uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

Ritual Kasada dimaknai berbeda-beda oleh setiap kalangan. Pemaknaan ritual Kasada juga tergantung dari sudut pandang pemaknaannya. Dalam konteks religi komunitas makna dari ritual Kasada sangat erat kaitannya dengan kepercayaan Gunung Bromo. Seperti yang telah diungkap oleh Slamet Subekti bahwa:

> "Ritual Kasada dimaknai sebagai peneguhan kosmologi komunitas Tengger, bahwa Gunung Bromo merupakan pusat dunia. Hal ini terungkap pada zaman dahulu pembangunan rumah maupun sanggar menghadap ke arah Gunung Bromo. Ritual Kasada juga dimaknai sebagai identitas komunitas Tengger sebagai anak keturunan Majapahit."[49]

Orang-orang Tengger merasa bangga dirinya merupakan komunitas penerus tradisi nenek moyang. Pada masa sekarang yang mengikuti upacara Kasada tidak hanya suku Tengger yang beragama Hindu saja namun juga warga Tengger yang beragama Islam maupun Kristen yang sudah keluar daerah datang dan berkumpul kembali. Ritual Kasada ini juga memiliki pesona wisata budaya yang kuat berlatar panorama Gunung Bromo yang indah. Pesona budaya dan alam Tengger inipun banyak menarik wisatawan.[50]

---

49 Slamet Subekti, *Pelaksanaan Ritual Kasada Pada Komunitas Tengger, Jawa Timur*. 2014. Academia.edu.

50 Wawancara dengan Slamet, pemuda dan seorang guru yang ahli

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

b. Upacara Karo

Upacara Karo adalah upacara yang dilakukan oleh masyarakat suku Tengger untuk memuliakan tradisi leluhur. Selain sebagai tradisi upacara ini juga merupakan wujud syukur masyarakat suku Tengger terhadap para leluhur. Bulan satu itu kasa, lalu kedua karo. Karo itu bulan 2 di Tengger. Karo itu ya selametan itu, sodoran, selametan ritual khususnya masyarakat Tengger, khususnya Hindu.[51]

Dalam perayaan Karo ini ada tarian bernama Sodoran. Tarian Sodoran ini erat kaitannya dengan asal-usul upacara Karo. Tarian Sodoran ini merupakan lembang dimana dua bibit manusia bertemu. Dua bibit tersebut adalah laki-laki dan perempuan. Yang dimaksud dengan laki-laki dan perempuan tersebut yakni Roro Anteng dan Joko Seger yang menjadi kepercayaan sebagai cikal bakal tumbuhnya masyarakat Tengger.

Arie Yoenianto menyatakan bahwa:

> "Simbol tarian Sodoran yang hanya dipertunjukkan pada hari raya Karo ini ditandai dengan sebuah tongkat bamboo berserabut kelapa yang di dalamnya terdapat biji-bijian palawija. Di kalangan masyarakat suku Tengger, biji-bijian yang

---

di bidang pakaian adat Tengger pada 13 Oktober 2021 di rumah beliau.

51 Wawancara dengan Murjianto, tokoh dan guru agama Hindu Tengger pada tanggal 13 Oktober 2021.

repo uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

dipecahkan dari dalam tongkat ini dipercaya akan memberi rezeki, keturunan bagi pasangan keluarga yang belum memiliki anak."[52]

Bersumber dari pernyataan Yodi Kurniadi dalam bukunya berjudul *Adat Istiadat* masyarakat *Jawa Timur* mengenai upacara Karo, berikut ini adalah rangkaian upacara Karo yang dilakukan selama 15 hari:[53]

1. Selamatan ping pitu (selamatan tujuh kali tujuh hari). Upacara ini bertujuan untuk mengundang roh leluhur setiap keluarga ke rumahnya masing-masing.
2. Prepekan Karo
3. Penari menari untuk menghormati arwah di beberapa tempat yang di anggap penting dan keramat. Tempat tersebut misalnya pedhayangan (tempat roh penjaga desa), punden desa (makam leluhur desa), sumber air (sumber air diyakini dijaga oleh roh. Upacara ini ditujukan agar tidak kualat karena arwah leluhur dilangkahi.
4. Warga berkunjung ke rumah kepala desa. Upacara ini dilakukan pada pukul 19.00. kegiatan berkunjung ini dilakukan oleh para tetua adat, tokoh masyarakat dan pamong desa.
5. Keesokan harinya warga berkunjung ke rumah kepala

52 Arie Yunianto, https://daerah.sindonews.com/berita/796335/23/suku-tengger-rayakan-tradisi-karo, diakses 11 November 2021.

53 Yodi Kurniadi, *Adat Istiadat masyarakat Jawa Timur*, (Bandung: Sarana Panca Karya Nusa, 2009), 56.

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

desa sambil membawa tumpeng yang akan disandingkan dengan tumpeng gede.

6. Dukun melafalkan mantra yang ditujukan untuk tumpeng
7. Warga berebut tumpeng gede. Potongan tumpeng dijadikan sebagai oleh-oleh yang wajib dibawa pulang agar tidak kualat.
8. Dukun dan pembantunya mempersiapkan acara nundung roh "memulangkan roh"
9. Dukun melakukan perjalanan keliling desa mengunjungi setiap warga desa dengan membawa prapen (tungku api) dan air suci.
10. Pada hari ke-15 atau sebagai penutup diadakan sadranan. Upacara ini dimaksudkan untuk mendoakan arwah leluhur dan keluarganya yang sudah meninggal.

Diterangkan oleh Rujianto, bahwa di Ngadirejo, sebelum upacara besar Karo, ada yang namanya rapat Karo.

"Dulu ada rapat karo namanya. Kalau di Ngadirejo, sebelum melakukan karo itu diawali kumpul karo, rapat membahas tentang adat karo, bersih desa. Sebenarnya karo itu sama dengan bersih desa, karena itu yang dimantrai romo dukun itu adalah bersih desa. Sandingannya itu reresik. Jadi reresik global. Apa yang telah dilakukan selama satu tahun kemarin ada salah luput, atau melakukan hal-hal yang kurang baik, atau apa, semua warga ini dimohonkan ampun oleh tuhan melalui ritual itu. Kalau ada salah-salah.

repo uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

Itu wajib, satu tahun sekali. Baru setelah itu menentukan kapan pelaksanaan hari raya karo, mulai dari kapan sesantinya, sampai kapan nyadrran. Nyadran itu mirip kupatan. Ziarah. Ziarah pertama itu di punden kelurahan. Ini kan ada punden, kita percaya itu leluhur pertama kali di sini. Di situ kita melakukan tabur bunga dan berdoa. Setelah itu ke tindioger atau tindihe desa, tengah-tengah desa. Baru setelah itu ziarah ke lulur masing-masing".

c. Upacara Unan-unan

Upacara Unan-unan adalah upacara yang dilakukan oleh suku Tengger dalam lima tahun sekali atau sewindu sekali menurut penanggalan suku Tengger. Upacara Unan-unan ini bisa disebut mayu bumi, selain itu upacara ini juga bisa disebut bersih desa untuk menghindari segala macam gangguan. Selain memohonkan pengampunan para arwah leluhurnya dalam upacara ini, seluruh umat manusia di seluruh dunia juga dimohonkan agar diberi keselamatan, kesejahteraan dan kedamaian abadi. R.P. Suyono menyatakan bahwa:

Upacara Unan-unan dilakukan dengan tujuan membersihkan desa dari gangguan makhluk halus dan juga membersihkan arwah yang belum sempurna kematian fisiknya.[54]

Setiap warga Tengger wajib melaksanakan upacara ini yang bertujuan agar manusia terbebas dari penderitaan, noda

54 Suyono, 55.

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

dan dosa, ditunjukkan jalan yang benar, menjadi manusia kuat dan berwibawa, serta memperoleh kesejahteraan dan kedamaian. Pengorbanan dalam bentuk kerbau selalu terjadi dalam upacara Unan-unan. Kepala dari kerbau tersebut diarak dari kampung menuju sanggar utama sambil membaca doa-doa dan mantra-mantra agar seluruh makhluk hidup tidak mengganggu sepanjang ritual ini berlangsung . Bagi mereka kerbau adalah binatang yang memiliki karakter agung, kuat dan sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Ketika acara puncak, hanya masyarakat Tengger dan tokoh masyarakat saja yang diizinkan memasuki area utama upacara.

Rangkaian upacara adat Tengger dilaksanakan oleh seluruh warga tanpa mengenal agama. Mereka diikat oleh upacara-upacara tersebut dan mengikuti prosesi yang dipimpin oleh Dukun Pandita karena di dalamnya terdapat nilai-nilai yang sangat luhur. *Pertama,* nilai spiritual: mengingat kepada para leluhur. *Kedua,* nilai kekeluargaan. Kita kumpul bersama dan ada nilai kekompakan dan kegotong-royongan. Terakhir, nilai yang terdapat pada upacara-upacara tersebut adalah nilai melestarikan alam.[55] Dengan demikian, dalam upacara-upacara yang berlangsung pada masyarakat Tengger terdapat nilai-nilai luhur yang menggabungkan keharmonisan antara tiga aspek: Tuhan, manusia dan alam.

55 Wawancara dengan Murjianto, tokoh dan guru agama Hindu Tengger pada tanggal 13 Oktober 2021.

repo uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

3. Sistem Sosial dan Ekonomi Suku Tengger

3.a. Keadaan Sosial

Masyarakat Tengger diakui sebagai kelompok sosial yang sangat terbuka dalam mengungkapkan perasaan mereka. Mereka juga diakui sebagai kelompok sosial yang mempunyai solidaritas yang tinggi. Gotong royong dan saling tolong menolong seperti sudah menjadi kewajiban bagi anggota masyarakat. Hal itu terlihat pada saat mereka melakukan aktivitas sosial yang berskala besar seperti upacara adat, hingga di lingkup yang lebih kecil seperti gotong royong membangun rumah, apalagi jika itu untuk kepentingan umum. Kerja sama antar individu dalam kegiatan sosial pun cenderung lebih banyak didasari oleh rasa solidaritas yang kuat dibandingkan dengan hukum formal.

> "Kerja bakti, gotong royong, dan semacamnya itu sudah sering. Misalnya, ketika mau ngecor jalan, itu kan harus dibersihkan dulu. Itu kita tidak menggunakan anggaran. Jadi cukup dengan perintahkan pak RT, dimintai bersihkan lingkungan, kerja bakti, maka itu sudah selesai. Itu pun kalau ada yang bandel itu pun terlihat. Karena banyak yang datang. Lha yang bandel ini nanti yang malu pada tetangganya, bukan pada pemerintah desa. Lha itu kembali ke hukum adat, bukan hukum pemerintah."[56]

56 Wawancara Bapak Rujianto, Pemuka Agama Hindu dan Perangkat

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

Dengan demikian, rasa persaudaraan dan solidaritas antar individu dalam masyarakat Tengger sangatlah kuat. Selain terkenal dengan masyarakat yang terbuka dan punya solidaritas tinggi, masyarakat Tengger juga diakui dengan toleransinya yang tinggi. Karena itu, masyarakat Tengger juga dikenal dengan kedamaian dan kerukunannya. Dalam melakukan kegiatan sosial, masyarakat tidak memandang agama yang dianutnya itu apa. Misalnya, pada saat melakukan peringatan Hari Raya Idul Fitri. Peringatan itu tidak hanya dimeriahkan oleh masyarakat Tengger yang muslim saja, masyarakat yang beragama lain seperti Hindu juga ikut memeriahkannya. Begitu juga sebaliknya, ketika ada peringatan hari besar Hindu, masyarakat muslim juga ikut memeriahkannya.

Dalam bertutur kata pun masyarakat Tengger cenderung sopan dan santun, serta menghindari perkataan kasar yang dapat menyinggung perasaan orang lain terlebih tutur kata yang berbau dengan agama. Selain itu, dalam hal menyelesaikan permasalahan, penduduk di wilayah ini juga sangat berpedoman pada norma adat yang berlaku sehingga perilaku yang ditampakkan dalam pergaulan sehari hari mengandung nilai sopan santun (kesantunan). Hal demikian menunjukkan bahwa terdapat sinkronisasi antara kehidupan nyata dengan kehidupan yang digariskan oleh adat istiadat.

Secara bahasa, masyarakat Tengger umumnya menggunakan bahasa Jawa dengan dialek Bahasa Tengger atau Dialek Tengger

---

Desa Ngadirejo, pada tanggal 12 Oktober 2021 di Rumah Beliau.

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

yang merupakan sub Bahasa Jawa yang digunakan oleh suku Tengger di daerah Gunung Bromo dan Gunung Semeru. Dialek Tengger umum digunakan di dataran tinggi Tengger, termasuk wilayah sebagian Kabupaten Probolinggo, Pasuruan, Malang dan Lumajang. Di Kabupaten Probolinggo, dialek Tengger ini ditemukan di desa yang berada di wilayah administratif Kecamatan Sukapura. Seperti Desa Ngadisari, Sariwani, Kedasih, Pakel, Ngepung, Sukapura, Sapikerep, Ngadirejo, Wonokerto, Ngadas, Jetak dan Wonotoro. Ada yang mengatakan bahwa Dialek Tengger ini juga merupakan turunan dari Bahasa Kawi dengan masih mempertahankan kosakata Jawa Kuno yang sulit dipahami oleh orang-orang suku Jawa lainnya karena sudah tidak lagi digunakan dalam Bahasa Jawa Modern.[57] Misalnya:

Reang : sebutan saya (jika yang berbicara adalah laki-laki)

Isun : sebutan saya (jika yang berbicara adalah perempuan)

Namun, dalam perkembangannya, bahasa yang digunakan oleh masyarakat Tengger lambat laun mengalami perubahan. Hal itu lantara mulai gencarnya pengaruh dari luar Tengger, terutama dari media sosial.

> "Kadang memenag banyaknya media sosial itu pengaruhnya luar biasa, dan adat ini kan tidak

57 Farisha Firni, "Bentuk, Makna, Dan Fungsi Kidung-Kidung Suci Masyarakat Tengger Di Kabupaten Probolinggo", *Skripsi*, (Surabaya: Universsitas Airlangga, 201), 102.

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

tertulis seperti undang-undang. Ini kadang-kadang sedikit-sedikit masih lupa. Lha ini, yang sepuh, harus bisa menyampaikan bisa diterima anak-anak. Misalnya saja bahasa saja. Bahasa kromo itu yang mestinya harus bisa, lha sekarang sudah jarang. Ketika ketemu guru itu kan dulu wajib kromo inggil, meskipun agak kaku. Tengger itu kromo, tapi ya ngoko juga. Saya juga bahasa sama guru."[58]

Dari segi pendidikan, pada awalnya sebagian besar tingkat pendidikan formal penduduk di masyarakat Tengger masih tergolong rendah karena mayoritas penduduknya hanya lulusan Sekolah Dasar (SD). Namun, menurut pengakuan dari Rujianto, bahwa pendidikan di masyarakat Tengger sebagian besar kini sudah banyak yang lulusan SMA atau sederajat.

"Masih jarang yang sekolah tinggi keluar, masih bisa dihitung. Karena anaknya ini, biasaya keluar, lha keturunan itu yang keluar semua. Biasanya begitu. Tapi kalau sekarang yang lulusan SMA banyak. Untuk yang lulusan SMP, juga sudah kita adakan kejar paket C. Sehingga meningkat, dan kalau ada event-event kayak pilkada kan butuh

58 Wawancara Bapak Rujianto, Pemuka Agama Hindu dan Perangkat Desa Ngadirejo, pada tanggal 12 Oktober 2021 di Rumah Beliau.

repo uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

SMA, tidak kesulitan. Bahkan perangkat desa dulu banyak yang SMP, tapi sekarang sudah ikut paket C."[59]

Akan tetapi, pendidikan yang lebih mendominasi di dalam masyarakat Tengger adalah pendidikan yang bersifat non-formal, bukan sekolah-sekolah formal. Diakui oleh Rujianto, memang pendidikan di Tengger secara umum tidak begitu menyolok dan lebih kepada pendidikan model pasraman yang tidak resmi. Selain itu, warga dan masyarakat juga lebih mengedepankan pendidikan moral dan tradisi adat istiada daripada pendidikan-pendidikan dengan materi umum pada saat ada kegiatan-kegiatan.

"Para sesepuh, keluarga, memberikan wacana pendidikan, tapi seringnya memang tradisi adat yang sering disampaikan daripada materi umum. Itu bisa melalui kegiatan-kegiatan, darma wacana, upanisat namanya, dan sebagainya. Itu menyampaikan beberapa hal terkait, pentingnya Gotong royong, yang sifatnya untuk menunjang di desa ada kegiatan-kegiatan. Waktu menikah juga kita sampaikan.Pendidikan adatnya itu

59 Wawancara Bapak Rujianto, Pemuka Agama Hindu dan Perangkat Desa Ngadirejo, pada tanggal 12 Oktober 2021 di Rumah Beliau.

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

dilalui secara keseharian. Hari ke hari. Bahasanya itu ora ilok. Kalau begini, jangan dilakukan, ora ilok. Cuman sebatas itu, tidak tertulis."[60]

Pendidikan lain yang diajarkan pada generasi muda Tengger juga lebih mengedepankan aspek toleransi dan solidaritas. Hal itu karena, menurut Rujianto adat istiadat itu lebih utama dibandingkan dengan agama yang dianut.

"Adat itu, di samping agama, karena adat itu lebih dulu. Agama itu yang tertulis, sebelumnya kan adat yang tidak tertulis. Adat itu bisa jadi rem. Kalau begini ora ilok, begini ora ilok. Misalnya, yang kecil aja, kita di depan pintu, tidak masuk tidak keluar, itu ora ilok, di hukum adat itu ora ilok, disampaikan tidak laku menikah. Secara logika itu tidak masuk akal, tapi bisa jadi itu karena kalau ada tamu dia di depan pintu nanti ada tamu kan repot, mau lewat, itu kan repot."[61]

Bahkan akhir-akhir ini banyak masyarakat Tengger yang mengapatkan gelar sarjana terutama para aparatur negara. Menariknya, peruntukan pendidikan sarjana bagi aparatur

60 Wawancara Bapak Rujianto, Pemuka Agama Hindu dan Perangkat Desa Ngadirejo, pada tanggal 12 Oktober 2021 di Rumah Beliau.

61 Wawancara Bapak Rujianto, Pemuka Agama Hindu dan Perangkat Desa Ngadirejo, pada tanggal 12 Oktober 2021 di Rumah Beliau.

repo uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

desa dikarenakan adanya anggapan bahwa kesejahteraan rakyat tidak akan mudah tercapai begitu saja tanpa adanya aparatur yang memiliki kemampuan mumpuni sehingga pengetahuan aparatur desa harus memadai guna memberikan pelayanan yang baik untuk rakyatnya disamping memberikan contoh kepada rakyat. Bahwa pendidikan juga penting dimiliki meski hasil pertanian lebih menjanjikan.

> "Kalau pendidikan sekarang sudah banyak, tapi yang kuliah masih terbatas. Bisa dihitung. Ada juga dari Tengger yang keluar, dan itu sudah tidak kembali. Ada keluarga yang begitu. Ke Sulawesi atau ke mana gitu. Tapi tidak kembali ke Tengger. Kalau ada yang kuliah ke luar, terus kembali, itu biasanya jadi petani. Atau paling ada juga yang jadi perangkat desa."[62]

Dengan demikian, kondisi tingkat pendidikan masyarakat yang semula rendah, kini mulai berubah secara perlahan ketika pemimpin desa membuat kebijakan yang terkesan memaksa warga untuk bersekolah sampai jenjang SMA. Namun kebijakan dan persyaratan demikian tidak berlaku untuk seorang wanita yang belum lulus SMA dan telah hamil diluar pernikahan. Dimana kepada pihak

62 Wawancara Bapak Rujianto, Pemuka Agama Hindu dan Perangkat Desa Ngadirejo, pada tanggal 12 Oktober 2021 di Rumah Beliau.

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

wanita yang telah hamil diluar nikah akan diberi ijin menikah dengan diberinya alternatif kebijakan. Alternatif kebijakan yang diberikan adalah sebuah perjanjian antara pihak bersangkutan dengan pemerintah desa bahwa setelah menikah sanggup melanjutkan pendidikannya melalui pendidikan Kejar Paket C (setara SMA) untuk memperoleh ijazah pendidikan 12 tahun.

Kebijakan tersebut merupakan ide atau inisiatif dari pemimpin Desa Ngadisari ketika itu pada tahun 2011 yang kemudian melalui musyawarah, dukungan dan persetujuan dari warga Desa Ngadisari ditetapkannya kebijakan sebagai Peraturan Kepala Desa Ngadisari dalam rangka terwujudnya visi Pemerintah Desa Ngadisari melalui pencapaianmisi ketiga Pemerintah Desa Ngadisari yakni Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia. [63]

Menariknya lagi, untuk memperkuat program pendidikan di wilayah Tengger, secara kultural Pemerintah Desa yakni Kepala Desa beserta Perangkat Desa berkolaborasi dengan Lembaga Adat yakni Dukun Pandhita untuk menciptakan ritual baru dengan tujuan untuk mensukseskan program pendidikan di wilayahnya. Ritual tersebut bernama Mayu Ilmu. Penciptaan ritual adat Mayu Ilmu tersebut menjadi pertanda bahwasannya masyarakat Tengger Ngadisari telah siap mentransformasikan dan

63 Farisha Firni, "Bentuk, Makna, Dan Fungsi Kidung-Kidung Suci Masyarakat Tengger Di Kabupaten Probolingg", 106.

repo uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

menjalankan nilai-nilai modern melalui pengetahuan yang bermanfaat bagi tradisi kehidupannya.

Hal tersebut dikarenakan nilai-nilai modern bukan sekedar benda industrial melainkan sebuah jalan hidup yang harus dihormati, diyakini dan dilakukan. Maka dari itu, ritual ini merupakan salah satu bentuk penghormatan terhadap kekuatan modernitas ke pikiran masyarakat tradisional.[64]

Kondisi sosial yang disebutkan sebelum berlangsung atas partisiapasi beragam struktur sosial yang telah lama berkembang. Di antara struktur sosial yang dimaksud sebagai berikut:

1. Struktur Adat

Masyarakat Tengger merupakan sekumpulan masyarakat yang memegang teguh persoalan adat-istiadat, segala urusan dilaksanakan dengan keputusan adat. Hal tersebut terlihat dari sistem organisasi kehidupan yang dijalankan, bahwa kekuatan yang paling utama terletak pada sistem yang bernama adat-istiadat. Pada sistem sosial masyarakat Tengger ditemukan dua sistem kepemimpinan yang pertama kepemimpinan bersifat formal (kelembangaan) sedangkan yang kedua adalah kepempinan bersifat informal (adat-istiadat). Sistem kepemimpinan struktural terletak pada kepala desa yang disah kan oleh Bupati Daerah Pemilihan

64 Ibid, 107.

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

Tingkat II yang menjadi pempin secara administratif bagi masyarakat Tengger. Istilah lain yang digunakan untuk menyebut kepala desa dalah petinggi. Sistem kepemimpinan kedua yaitu kepemimpinan kultural berada pada dukun yang menjadi panutan bagi masyarakat Tengger. Kepala adat atau dukun memiliki peranan penting dalam perkembangan masyarakat adat yang dipimpinnya.[65]

Dukun merupakan pemimpin keagamanaan masyarakat Tengger yang beragama Hindu yang bertugas memimpin upacara yang bersifat keagamaan dan adat. Dalam pelaksanaannya dukun dibantu oleh tiyang sepuh, dadan, dan legen. Tiyang sepuh bertugas membantu dukun dalam ritual upacara, istilah yang digunakan tiyang sepuh bukan merujuk pada faktor usia melainkan pada jabatan dan dipilih oleh petinggi berdasarkan kecakapan membantu dukun. Tugas utama dari tiyang sepuh adalah menguncupkan sajian dalam upacara, meminta kesaksian dari para undangan untuk menghandiri upacara dengan menggunakan bahasa Jawa-krama, dan membantu dukun dalam pelaksanaan upacara besar. Dandan merupakan seorang yang lanjut usia untuk membantu dukun selain tiyang sepuh.[66]

Tugas utama seorang dandan adalah mempersiapkan sajian-sajian yang berhubungan dengan salah satu jenis

65 Wawancara dengan Misnoyo, Dukun yang sebelumnya menjadi Legen pada tanggal 13 Oktober 2021 di rumah beliau.

66 Farisha Firni, 2014. Bentuk, Makna, Dan Fungsi Kidung-Kidung Suci Masyarakat Tengger, 31.

repo uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

upacara sebelum dimantrai oleh dukun. Legen merupakan seorang laki-laki yang menjadi pembantu dukun dan dipilih langsung oleh dukun. Tugas utama seorang legen adalah mengambilkan bendabenda upacara dan api yang diperlukan oleh dukun untuk perlengkapan upacara.[67]

Pemilihan seorang dukun bukan berdasarkan faktor keturunan melainkan dari kecakapan dan hasil uji coba yang diadakan satu tahun sekali oleh tetua dukun pada saat Upacara Kasodo. Syarat paling utama menjadi seorang dukun adalah menghafalkan semua doa dan mantra dengan fasih dan lancar di luar kepala. Seorang dukun Tengger harus lulus dari sebuah upacara yang disebut mulenan pada upacara Kasada dan setiap orang berhak untuk mendaftar diri.[68]

Kepercayaan masyarakat Tengger tentang silsilah dukun menjadi penting sebagai pertimbangan, karena seorang yang menjadi dukun diusahakan dari keluarga dukun. Terdapat kepercayaan di kalangan masyarakat Tengger bahwa jika dukun Tengger berasal dari kalangan orang biasa maka akan mendapat cobaan selama masa bertugas. Penetapan seorang dukun dilaksanakan saat upacara Kasada yang disaksiskan oleh perisada, pemangku adat, dan masyarakat.

Kepercayaan masyarakat Tengger terhadap seorang dukun memiliki konsep yang berbeda dengan daerah lain seorang

67 Ibid. 31

68 Ibid, 32.

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

yang biasanya seorang 'dukun' pandai mengobati penyakit. Dukun di Tengger memiliki tugas sebagai pemimpin upacara keagamaan dan bertugas membaca doa-doa, mantra-mantra serta menentukan sajian dalam upacara. Dukun Tengger memiliki peran yang berbeda bila dibandingkan dengan dukun di luar Tengger. Dukun di luar Tengger seringkali dipercaya dapat menyembuhkan orang sakit dan meminta pertolongan untuk melakukan hal-hal yang bersifat gaib. Gambaran dukun tersebut pada masyarakat Tengger disebut dukun cilik.

Sebaliknya pada dukun Tengger dipilih dan harus melalui uji kelayakan untuk menjadi seorang dukun bertugas sebagai pemangku adat sekaligus pemuka agama. Para dukun dalam sistem kemasyarakatan Tengger menempati tempat khusus, tingkatan yang dimiliki oleh seorang dukun lebih tinggi dibandingkan ulama desa tetapi berada di bawah padanda di Bali. Dukun dalam kepercayaan masyarakat Tengger disejajarkan dengan para Resi Shiwa atau orang suci yang menjalankan hidup pertapaan yang dinamakan 'ajar' (guru).[69]

Setiap dukun memiliki prasen atau jambang zodiak yang berupa bokor cawan yang terbuat dari kuningan diisi dengan air sajian sembayang. Berbentuk sebagai bokor yang lebar dengan sisi-sisi tegak atas, pinggiran atasnya pipih melingkar seolah ada tutupnya. Pada pinggir bawahnya terdapat dua belas tanda rasi atau tanda-tanda zodiak yang

69 Ibid, 33.

repo uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

dalam bahasa Jawa disebut perase. Perbedaan sistem yang terjadi antara masyarakat Tengger dengan masyarakat Bali terdapat di tugas seorang dukun. Di daerah Tengger dukun juga memimpin ritual keagamaan yang disebut sebagai dukun pandita atau dukun adat.[70]

Hal tersebut berbeda dengan situasi di Bali yang ritual keagamaan dipimpin oleh pandanda atau pandita. Perbedaan tersebut menegaskan bahwa masyarakat Tengger memiliki sistem organisasi kemasyrakatan yang berbeda dengan daerah berbasis Agama Hindu termasuk daerah Bali. Dukun Tengger diyakini memiliki kekuatan yang melebihi manusia disekitarnya dan anggapan tersebut diperkuat dengan status sebagai pemuka agama dan dukun adat. Struktur dukun pada masyarakat Tengger tidak tersusun secara formal, tetapi dilaksanakan dengan pemilihan yang dilakukan melalui sebuah musyawarah wilayah seluruh Tengger. Dalam pelaksanannya dukun Tengger memilih seorang wakil pada setiap wilayah yang berfungsi untuk membantu penyelenggaraan kegiatan yang langsung mengkoordinir masyarakat pada daerah tersebut.[71]

2. Lembaga Agama

Ketika Orde Baru, terdapat tekanan yang terparah, yaitu masyarakat Tengger terpaksa masuk Agama Hindu

70 Wawancara dengan Dukun Misnoyo pada tanggal 13 Oktober 2021 di rumah beliau.

71 Farisha Firni, 35.

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

dan Budha (sebagian Islam). Melalui peraturan Presiden Nomor 1 tahun 1965 dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1969, pemerintah memaksa seluruh rakyat Indonesia harus terdaftar dalam 5 agama formal (Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha). Sedangkan Tengger merupakan kelompok masyarakat penghayat kepercayaan kepada Sang Hyang Widi Wasa dan Sang Hyang Dewa Brahma.[72]

Dari tekanan tersebut, masyarakat Tengger mencoba menyiasati dengan memisahkan antara agama dan adat. Dari akulturasi tersebut, masyarakat Tengger tidak mengenal kasta, pembakaran mayat/ngaben, dan terdapat lembaga agama dan lembaga adat pada struktur sosial mereka. Era Orde Baru juga meratakan desadesa dengan menghilangkan hak swatantra komunal dan hak ulayat masyarakat desa. Gerakan represif ini melalui Undang-undang Desa No. 5 tahun 1979 pengganti Undangundang Desa No. 5 Tahun 1974. Penggantian undang-undang ini ditujukan untuk menetralkan masyarakat desa yang tergabung dalam gerakan PKI. Selain itu, berlakunya UU ini telah menghilangkan hak swatantra tanah Hila-Hila dari era kerajaan. Masyarakat Tengger sebagai masyarakat adat tidak lagi merasakan kehadiran negara didalam dimensi sosio-kulturalnya. Justru negara melakukan tindakan represif terhadap masyarakat Tengger karena dianggap simpatisan

72 Hefner, Robert W. *Geger Tengger* (Yogyakarta: LP3ES, 1990), 320-322.

repo uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

PKI. Tidak hanya itu, konstruksi di era Orde Baru dengan memasukan agama pada kolom KTP. Masyarakat Tengger sebagai penganut SiwaSugata yang tidak diakui di dalam undang-undang tersebut, terpaksa harus masuk ke dalam Agama Hindu dan Budha, sebagian Islam.[73]

Akan tetapi, yang perlu digarisbawahi dalam struktur kelembagaaan masyarakat Tengger khususnya di Ngadirejo adalah struktur adat lebih tinggi statusnya dibandingkan dengan struktur formal. Setiap unsur kelembagaan mempunyai fungsi dan peran masing-masing. Dan memang, hukum adat lebih kuat dibandingkan dengan hukum pemerintah.

> "Dari segi pembangunan misalnya. Dari apa yang telah kita termita dari pemerintah terus kita program, ada yang memang kita kasih reward, karena memang ada bayarannya, masak gotong royong tok. Tapi kalau dimintai untuk kerja bakti, emergency, konduran (longsor), itu ya cepet. Tanpa harus diminta berulang kali. Karena malu dengan tetangganya, bukan malu pada pemerintahnya. Kalau hubungan dengan pemerintah terkait dengan pembangunan, ada. Itu sudah sering. Kalau mau dicor itu kan kita bersihkan dulu. Itu kita tidak menggunakan anggaran. Jadi cukup dengan perintahkan pak RT, dimintai

73 Ulfa Binada, "Konstruksi Identitas Komunal Masyarakat Adat Suku Tengger Dari Zaman Kerajaan Hingga Pascareformasi" *Jurnal. Ilmu Pemerintahan* (Malang: FISIP Universitas Brawijaya, 2019)

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

bersihkan lingkungan, kerja bakti, itu sudah selesai. Itu pun kala ada yang bandel itu pun terlihat. Karena banyak yang datang. Lha yang bandel ini nanti yang malu pada tetangganya, bukan pada pemerintah desa. Lha itu kembali ke hukum adat, bukan hukum pemerintah."[74]

Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa memang masyarakat Tengger merupakan masyarakat yang sangat matang dan dewasa. Dalam artian, mereka dapat tergerak dan mengatur kehidupan bermasyarakat dengan tanpa berpaku tangan kepada program-program pemerintah. Hal ini dikarenakan nilai-nilai kebersamaan, solidaritas, gotong royong dan kerja bakti telat kuat tertanam dalam laku hidup masyarakat Tengger.

3.b. Kondisi Ekonomi

Selain kondisi sosial yang 'unik', masyarakat Tengger juga dikenal sebagai petani tradisional yang giat. Sebagian besar dari masyarakat Tengger mata pencahariannya adalah bertani. Karena itu, banyak dari masyarakat Tengger yang memilih untuk tinggal di bukit-bukit yang tidak jauh dari lahan pertanian mereka. Suhu dingin udara di dekat Gunung Bromo juga membuat para petani bisa bekerja dari pagi hingga sore hari. Kawasan Tengger

74 Wawancara Bapak Rujianto, Pemuka Agama Hindu dan Perangkat Desa Ngadirejo, pada tanggal 12 Oktober 2021 di Rumah Beliau.

repo uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

di lereng Gunung Bromo-Semeru biasanya tidak sampai 20 derajat (sekitar 4 derajat pada malam hari dan sekitar 18 derajat pada siang hari.

Salah satu alasan kenapa masyarakat Tengger bertani adalah karena memang mereka punya lahan. Rujianto menyatakan bahwa secara umum memang masyarakat Tengger adalah petani karena sumber daya alamnya ada dan lahan itu adalah warisan yang harus dijaga.

> "Secara umum memang petani. Jadi untuk menjadi pegawai itu jarang. Jadi supir sayur ada. Atau supir lainnya. Pegawai jarang itu karena dulu sekolahnya itu terbatas. Yang kedua, tidak mau jauh dari rumah. Yang ketiga memang lahannya. Jadi kalau jauh dari rumah biasanya disuruh untuk di sana. Dan lahan untuk garapannya kan memang ada. Sumber daya alamnya ada. Dan itu warisan. Itu perlu dijaga."[75]

Jenis pertanian di masyarakat Tengger lebih diutamakan pada sayur-sayuran seperti kubis, kentang, wortel, toman dan lain sebagainya. Namun terkadang mereka juga menanam jagung tergantung dengan kondisi atau cuaca. Dan pada masa panen, banyak pedagang dari luar Tengger yang berdagang ke daerah Tengger untuk mengambil

75 Wawancara Bapak Rujianto, Pemuka Agama Hindu dan Perangkat Desa Ngadirejo, pada tanggal 12 Oktober 2021 di Rumah Beliau.

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

barang-barang komoditi pertanian tersebut untuk dijual di pasar kota dan pasar kabupaten Probolinggo.[76]

Namun, selain menjadi tani, masyarakat Tengger juga sebagian besar bekerja sebagai pegawai desa atau guru. Banyak juga dari mereka yang menyewakan kuda tunggang untuk para wisatawan yang berkunjung. Wisatawan-wisatawan yang datang untuk Gunung Bromo tidak hanya berasal dari dalam negeri, tapi juga luar negeri. Selain menyewakan kuda tunggang, ada juga yang menyewakan mobil jeep atau hartop, menyewakan kamar penginapan, atau sekedar *travel guider*.

Gunung Bromo sendiri memang Gunung Bromo menawarkan pemandangan yang luar biasa indah. Biasanya para wisatawan ingin pergi ke Bromo untuk memanjakan mata dengan menikmati pemandangan matahari terbit. Selain itu, kawah Gunung Bromo juga tidak kalah menarik. Perjalan menuju tujuan itu jauh, sehingga sebagian besar wisatawan lebih memilih untuk menggunakan jasa penyewaan kendaraan, baik itu jeep atau kuda tunggang.

Di samping itu, ada juga masyarakat Tengger yang bekerja dengan membuka toko kelontong, warung makan atau toko bunga. Hal itu karena memanfaatkan peluang banyaknya wisatawan yang datang dan mereka pasti membutuhkan tempat istirahat, bahan-bahan pokok makanan, atau souvenir. Gunung Bromo sendiri merupakan

76 Badrus Samsi, "Partisipasi dan perayaan Idul Fitri suku Tengger Wonokerto Sukapura Probolinggo Jawa Timur (1994-2015)" *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017), 27.

repo uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

salah satu gunung yang dapat ditumbuhi bunga abadi atau dikenal dengan bunga Edelweis Jawa. Edelweis Jawa itu juga mempunyai posisi yang penting di dalam tradisi dan adat masyarakat Tengger.[77]

Masyarakat Tengger menamainya *tanalayu*, yang dimaknai *mandape wahyu* atau turunnya wahyu. Pada upacara Kasada, Sesanding, dan Entas-entas, tanalayu atau edelweiss jawa itu menjadi salah satu muatan sesaji. Bunga ini juga menjadi bahan pokok pembuatan petra, semacam boneka yang berfungsi sebagai pelinggih atman: tempat mempersemayamkan roh orang meninggal atau arwah leluhur yang diundang dalam suatu upacara.

Dalam berbagai upacara adat Tengger yang melibatkan unsur mengundang arwah leluhur, selalu ada petra. Edelweis jawa termasuk tumbuhan yang dilindungi. Manfaat ekologisnya tak ternilai. Bunganya menjadi sumber makanan bagi sekitar 300-an jenis serangga. Kulit batangnya bercelah dan mengandung banyak air, menjadi tempat hidup beberapa jenis lumut. Bagian akarnya yang muncul di permukaan tanah menjadi tempat hidup cendawan tertentu yang membentuk mikoriza: kelompok jamur yang bersimbiosis dengan tumbuhan yang dilekatinya.[78]

Cendawan-cendawan itu mendapat oksigen dan tempat hidup dari edelweiss, sedangkan edelweiss mendapat unsur

77 Ibid., 28.

78 Ibid, 29.

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

hara dari cendawan. Itulah sebabnya edelweiss jawa mampu hidup di tanah vulkanik muda yang tandus, menjadi tumbuhan perintis yang berfungsi "menyiapkan lahan" bagi tumbuh dan tersebarnya tumbuhan-tumbuhan lain. Sebagai tumbuhan yang dilindungi, tentunya terlarang memetik edelweis jawa dan apalagi memperdagangkannya. Akan tetapi karena ada permintaan pasar (demand) dari wisatawan, muncullah penyediaan barang (*supply*) oleh masyarakat Tengger. Saat ini kondisi edelweis jawa di Bromo memang masih dapat dikatakan belum kritis.[79]

Di samping kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Tengger yang sudah dijelaskan di atas, salah satu tantangan yang kini dihadapai masyarakat Tengger adalah terkait perubahan sikap para generasi muda di tengah gempuran informasi dan budaya luar.[80] Rujianto mengatakan bahwa mulai terdapat perubahan-perubahan perilaku dan sikap dalam keseharian anak muda di Tengger, meskipun tidak sampai merubah adat-adat yang bersifat wajib seperti selametan dan upacara-upacara wajib lain.

"Perubahan pasti ada. Tapi yang tidak bisa ditinggalkan itu adat selametan-selametan itu. Tapi kalau perubahan

79 Ibid, 29.

80 Salah satu perubahan yang terjadi adalah para pemuda mulai memutuskan untuk mencari nafkah di luar sumber daya alam gunung Bromo dan pariwisata. Hal ini tidak terlepas dari keinginan untuk mencari tantangan dan nuansa baru dari "dunia luar". Wawancara dengan Dian, pemuda daerah Tengger yang memutuskan untuk bekerja di luar pada 14 Oktober 2021.

repo uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

tentang tingkah laku, gaya, sopan santun, yaa agak berkurang. Kalau tidak dari keluarga sendiri membantu mengajarkan akan sulit. Karena tidak ada guru resmi semacam itu. Sekarang ini pengaruh dari luar cukup gencar. Tidak hanya dari apa yang kita lihat dari mata langsung. Tetapi dari informasi dari gawai kan bisa diakses langsung. Bahkan pengaruh moral untuk melupkan sejarah, itu kan mulai banyak. Sejarah orang tua. Makanya peran dari keluarga, dari sringgih, maksudnya pak mangku, pak dukun, itu kan penting juga untuk menyampaikan yang ora ilok tadi. Harus mengenang kakek buyutnya dulu."[81]

4. Dinamika Sosial Suku Tengger

Masyarakat Tengger sebagaimana masyarakat pada umumnya memiliki ikatan yang kuat dengan negara sebab mereka berada dalam lingkup negeri Indonesia. Karenanya, masyarakat Tengger tidak lepas dari kebijakan pemerintah kaitan dengan pembangunan desa. Walau dalam konteks tertentu, mereka memiliki *local wisdom* –dengan segala keunikannya-- yang membedakan dengan masyarakat lain di tempat yang berbeda.[82]

---

81 Wawancara Bapak Rujianto, Pemuka Agama Hindu dan Perangkat Desa Ngadirejo, pada tanggal 12 Oktober 2021 di Rumah Beliau.

82 Alasan ini yang kemudian, cukup beralasan bila kemudian salah satu Indonesianis, Robert W. Hefner menyebutkan bahwa masyarakat Tengger memiiliki karakter kuat, yang mayoritas Hindu, dalam memegang nilai-nilai, tradisi dan kebudayaan, walau mereka berhadapan dengan arus perubahan yang terus

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

Dengan wilayahnya yang berada di sekitar Gunung Bromo, masyarakat Tengger telah lama hidup dalam kondisi alam yang dingin. Karenanya, tidak salah bila kemudian penulis menyebutkan mereka dengan "masyarakat bersarung", yakni masyarakat yang dalam aktivitas kesehariannya sulit lepas dari sarung sebagai sarana untuk menahan dinginnya cuaca, khususnya pada malam atau pagi hari ini. Artinya, mereka yang bertani berangkat pada pagi hari, misalnya, tidak sedikit menggunakan sarana sarung yang diletakkan di leher agar terhindar dari dingin.

Di samping itu, adaptasi masyarakat Tengger juga dibentuk oleh Gunung Bromo yang menjadi salah satu tempat wisata yang sangat potensial. Pemandangannya yang sangat menarik menjadi alasan, gunung Bromo menjadi salah satu destinasi wisata yang cukup penting sehingga menarik para pengunjungan baik lokal, nasional hingga dari pengunjung dari luar negeri. Karenanya, kondisi ini diakui atau tidak sangat mempengaruhi cara pandang masyarakat Tengger, khususnya dalam persoalan ekonomi.

Memang dalam konteks menjaga tradisi luhur, masyarakat Tengger sangat kuat sampai buku ini ditulis.

---

terjadi. Lihat Robert W. Hefner, Geger Tengger: *Perubahan Sosial dan Perkelahian Politik* (Yogyakarta: LKiS, 1999), xxii. Amatan penulis di lapangan, setidaknya sekitar desa-desa di wilayah kecamatan Sukapura, menunjukkan hal yang sama, walau ada sedikit perubahan. Tanggal 14 Oktober 2021.

repo uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

Tapi, dalam banyak hal, kondisi sosial masyarakat Tengger mengalami proses yang sangat dinamis sehingga mengalamai perubahan sesuai dengan perkembangan dan perubahan waktu.

Pertama, perubahan dalam aspek ekonomi. Pada mulanya, mayoritas masyarakat Tengger adalah para petani. Pilihan menjadi petani karena mempertimbangan kondisi alama yang sangat mendukung, walau tidak sama dengan petani yang ada di dataran rendah. Dengan posisi yang berada dekat Gunung Bromo memungkinkan pilihan bertani jatuh pada bertani, sebagaimana penulis lihat di desa ngadisari Kecamatan Sukapura. Artinya, masyarakat Tengger lebih banyak bertani sayur-sayuran mengikuti kondisi alam yang diakibatkan oleh cuaca Gunung Bromo.

Namun, seiring dengan Kawasan keindahan taman nasional Bromo disahkan menjadi salah satu taman

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

nasional yang ditetapkan oleh Mentri Pertanian NO. 736/ mentan/X/1982, maka menjadi sebab keindahan ini menjadi destinasi wisata yang banyak orang berdatangan, baik dari lokal dan nasional, bahkan dari mancanegara. Kondisi ini, di akui atau tidak sangat mempengaruhi perubahan masyarakat dalam mengakses keberuntungan ekonomi.

Satu misal, banyaknya orang Tengger mulai memiliki kendaraan jeep sebagai modal tranportasi bagi mereka yang mengunjungi Gunung Bromo untuk menikmati keindahan alamnya. Pada kondisi yang sangat normal, bukan dalam situasi pandemi 19, penghasilan masyarakat yang memiliki mobil Jeep lumayan besar. Dapat diperkirakan kurang lebih 500ribu perhari. Penghasilan ini sangat berbeda pada hari-hari libur panjang seiring dengan jumlah para wisata yang datang akan lebih besar.

Pada konteks yang berbeda juga demikian, ada sebagian masyarakat Tengger yang memilih bisnis merchandise atau semacam pernak-pernik khas yang menyimbolkan karakter masyarakat Tengger, misalnya udeng, batik Tengger dan lain-lain. Memang bisnis ini pilihan, dan sekaligus sebagai sarana promosi atas keindahan Gunung Bromo dan budaya masyakat Tengger. Hal ini sebagaimana diakui oleh salah satu penjual Merchandise yang sempat ditemui oleh penulis, ia mengatakan:

> "Bagi saya menjual *merchandise* khas Tengger, bukan saja dalam rangka kepentingan ekonomi.

repo uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

Tapi, sekaligus sebagai sarana untuk menyebarkan hal-hal unik yang dimiliki oleh Tengger sehingga bisa menarik untuk datang ke Gunung Bromo untuk menikmati keindahan kawahnya, walau sebenarnya saya sendiri juga sebagai seorang guru."[83]

Itulah beberapa perubahan yang terjadi kaitannya dengan ekonomi masyarakat Tengger. Pastinya, perubahan-perubahan ini masih tetap belum mampu merubah paradigma masyarakat Tengger untuk tetap bersahabat dengan hasil alam, yakni dengan memilih sebagai petani. Karenanya, dalam pagi hari kita akan menemukan masyarakat Tengger yang bersarung menuju lahannya untuk merawat tanaman sayur sebagai jalan dan pilihan ekonomi.

Kedua, perubahan dalam aspek pendidikan. Selanjutnya, yang juga mengalami perubahan adalah aspek pendidik. Memang, perubahan ini tidak secepat yang dialami dalam perubahan ekonomi, mengingat kuatnya ketaatan masyarakat Tengger terhadap nilai-nilai lokal, yang diyakini telah diangkap cukup nyaman untuk hidup berharmoni dengan alam.

Beberapa perubahan itu salah satunya adalah ada kesadaran masyarakat untuk mengikuti kejar paket agar juga memiliki ijazah. Tapi tidak sesederhana itu, semuanya tidak bisa dilepaskan dari peran kepala desa untuk menyadarkan

83 Wawancara dengan Slamet Susandi, salah satu pebisnis *merchandise* yang juga pendidik. Tanggal 13 Oktober 2021.

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

masyarakat agar dalam pendidikan. Artinya, sangat sedikit masyarakat Tengger –khususny dari kalangan pemuda-- yang betul-betul memiliki kesadaran untuk sekolah, apalagi melanjutkan ke perguruan tinggi. Selebihnya, hal menarik mereka yang berpendidikan adalah ---tidak sedikit--- untuk tetap kembali dan berkiprah di desanya.

Ketiga, perubahan dalam aspek kepercayaan dalam berbudaya. Perubahan dalam konteks ini terjadi pada budaya yang dikaitkan dengan keyakinan. Artinya, banyak upacara-upacara atau ritual-ritual yang dilakukan masyarakat Tengger lebih identik dengan keyakinan Hindu dengan beragam proses ritual yang berbeda-beda sebagaimana disebutkan sebelumnya.

Perubahan terjadi karena memang kondisi sosial masyarakat menuntut untuk beradabtasi dengan perubahan seiring dengan hadirnya masyarakat lain yang tinggal di sekitar Gunung Bromo, dan bersamaan dengan itu mereka tidak seagama atau sekeyakinan dengan mayoritas masyarakat Tengger yang beragama hindu. Karenanya, nuansa alam yang damai melahirkan sikap toleransi yang tinggi terhadap perbedaan masyarakat.

Sebut saja, upacara Unan-unan yang dilaksanakan oleh lintas keyakinan dan agama. Bukan, dalam rangka menyampurkan keyakinian, tapi ritual yang tidka ada kaitannya yang keyakinan lain, tidak ada upaya untuk memaksa. Jadinya, hal-hal yang masih diperkenankan menurut keyakinannya, tetap bisa dilakukan dan tidak

repo uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

memaksa yang lain untuk melaksanakannya. Upacara ini dilaksanakan dalam rangka untuk menjaga dan melestarikan ada budaya Tengger.

Bagi masyarakat Tengger bahwa keyakinan adalah wilayah individu. Tapi, berkaitan dengan budaya Tengger menjadi tanggung jawab bersama untuk melestarikan agar warisan para leluhur tidak terserat dari akar kearifan masyarakat Tengger. Cukup beralasan bila dalam kehidupan sosial, sebagaimana dijelaskan oleh bapak Rujianto,[84] sudah terbiasa, komunitas lain mendatangi undangan keagamaan –untuk doa-doa keselamatan, walau dalam ritual tertentu tetap tidak dilaksanakan.

Perubahan ini yang kemudian memberikan makna tersendiri bagaimana toleransi yang terjadi dalam

84 Wawancara Bapak Rujianto, Pemuka Agama Hindu dan Perangkat Desa Ngadirejo, pada tanggal 12 Oktober 2021 di Rumah Beliau.

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

masyarakat Tengger sangat kuat. Hampir tidak ada konflik antar keyakinan atau kepercayaan sebab semua sadar betul bahwa harmoni yang terinspirasi dari keindaham alam Gunung Bromo harus dijaga sebagai etika sosial dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

BAB IV

MODEL PARTISIPASI KOMUNITAS DALAM PEMBANGUNAN DESA

A. Dari Komunitas untuk Desa

1. Peran Komunitas Samin-Tengger dalam Pembangunan Desa

Komunitas Samin dan Suku Tengger (selanjutnya disebut dengan komunitas) memiliki pranata sosial yang mereka pegang secara kuat dan diwariskan secara turun temurun. Kedua komunitas ini secara nyata turut andil dalam pembangunan masyarakat secara luas. Pembangunan masyarakat ini dapat dijelaskan melalui peran mereka mengkonservasi ajaran-ajaran luhur yang telah diwariskan turun temurun, dan selanjutnya diinternalisasi sebagai perilaku keseharian.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa masyarakat Tengger sangat terbuka dengan apapun yang dilakukan oleh

pos uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

pemerintah kaitannya dengan pembangunan daerah. Artinya, walau dalam konteks tertentu tetap menjaga tradisi lokal yang menjadi ciri khasnya, masyarakat Tengger ikut terlibat sebagai bagian dari anak bangsa untuk ikut mensukseskan program pemerintah sebab dengan itu masyarakat Tengger membuktikan kecintaannya terhadap bangsa ini.

Keterbukaan juga ditampilkan oleh komunitas Samin melalui berbagai aktifitas yang mereka lakukan dalam pembangunan masyarakat, yang selalu terlibat dan bahkan cenderung menjadi pelopor di lingkungannya. Selain itu, keterbukaan juga ditampilkan melalui pewarisan status sebagai sesepuh yang tidak selalu menempatkan anak kandung dari sesepuh sebagai pewaris ajaran dan kesepuhan. Genealogi pewaris dan pemegang ajaran Samin secara turun temurun dapat dilihat pada bab sebelumnya, yang menggambarkan bahwa seseorang yang diangkat menjadi sesepuh tidak selalu dari keturuan langsung sesepuh Samin. Kenyataan ini menunjukkan adanya keterbukaan pada komunitas Samin, yang dapat diikuti oleh siapa saja, yang mau mengamalkan ajaran Samin.

Kuatnya komunitas Samin memegang ajaran mereka menggerakkan pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan menetapkan ajaran Samin sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia pada tahun 2019.[1] Ajaran

1 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Piagam Penetapan Karya Budaya Ajaran Samin Surosentiko Bojonegoro dari Provinsi Jawa Timur sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia (Jakarta, 8 Oktober 2019).

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

ini kemudian menjadi perilaku keseharian yang ditampilkan oleh komunitas ini. Beberapa diantaranya termanifestasikan dalam berbagai kehidupan kemasyarakatan mereka, antara lain pada perilaku menjaga keseimbangan alam dan tata kehidupan sosial kemasyarakatan lainnya.

Namun demikian, kekuatan ajaran yang diujarkan oleh sesepuh Samin ini tidaklah memiliki saluran transmisi yang baik. dikatakan demikian karena tidak ada media khusus yang dipakai oleh komunitas Samin dalam mentransmisi ajaran mereka ke generasi penerus. Mbah Harjo Kardi sendiri menyebut bahwa ajaran Samin berjalan mengalir begitu saja: "Sopo sing gelem ngamalke, ya monggo. Nek apik mestine khan yo diamalke. Yen ora gelem, yo ora usah dipekso".[2]

Kajian ini melihat bahwa di komunitas Samin memiliki media yang dapat dipakai untuk mentransmisikan ajaran secara formal melalui lembaga pendidikan, majlis taklim atau rutinan keagamaan yang ada di institusi agama di lingkungan tersebut, atau juga dapat ditransmisikan melalui institusi non-formal seperti forum publik yang ada di lingkungan masyarakat tersebut. Beberapa media transmisi ini tidak dipakai dengan alasan bahwa jika sudah saatnya pasti akan terjadi dengan sendirinya.[3]

---

2 Wawancara dengan Harjo Kardi (Sesepuh Samin, Bojonegoro) pada tanggal 12 Oktober 2021.

3 Wawancara dengan Bambang Sutrisno (Putra ke-7 Mbah Harjo Kardi, sesepuh Komunitas Samin Bojonegoro) pada tanggal 12 Oktober 2021.

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

Mencermati peran sosial kedua komunitas ini, kajian ini menemukan dua hal menarik sebelum membahas tentang posisi dan peran mereka dalam pembangunan. Pertama, kedua komunitas ini memiliki ketaatan yang sangat kuat terhadap struktur kekuasaan non-formal. Kekuasaan non-formal yang dimaksud dalam tulisan ini adalah kekuasaan yang dibentuk oleh struktur lokal, yang sangat mungkin tidak ditemukan di daerah yang lainnya. Artinya, kekuasaan lokal menjadi jangkar yang menyatukan komunitas tersebut dalam melakukan beragam aktivitas.

Dalam konteks Tengger, kekuasaan yang berbasis lokalitas ini dibentuk cukup lama dan turun temurun, yang dalam konteks tertentu kekuasaan ini dipilih tidak bisa dilepaskan dari mitologi proses yang diyakini sampai hari ini. Sebut saja misalnya, kekuasaan lokal ini dikendalikan oleh dukun, di mana dalam konteks ritual keagamaan masyarakat sangat bergantung besar pada peran dan petunjuknya. Dukun bagi masyarakat Tengger, bukanlah dukun yang dipahami kebanyak orang sebagai orang yang ahli doa-doa mistik, suwuk dan sejenisnya. Dukun bagi masyarakat Tengger adalah seorang yang mempunyai tugas dalam bidang keagamaan, termasuk pelaksanaan upacara dan pembinaan adat.[4]

Di samping itu, juga ada pemangku agama yang

4 Nurudin dkk (editor), *Agama Tradisional: Potret Kearifan Hidup Masyarakat Samin dan Tengger* (Yogyakarta: LKiS, 2003), 166.

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

posisinya hampir bersamaan dengan mbah Dukun sebagai pemimpin kultural, walau posisinya lebih strategis Mbah Dukun sebab pemangku agama hanya terbatas pada masyarakat yang beragama Hindu, sementara Mbah Dukun lebih umum kaitan dengan ritual-ritual adat yang masyhur dilakukan oleh masyarakat Tengger. Karenanya, Mbah Dukun memiliki otoritas kharismatik yang sangat kuat sehingga petuah-petuahnya sangat dinantikan, bukan sekedar pemimpin upacara.

Jadi, tugas dan peran Dukun berputar pada soal kematian, perkawinan dan upacara-upacara lain. Untuk melaksanakan tugasnya, mbah dukun yang biasanya dipanggil dibantu oleh oleh w*ong sepuh* dan *legen.* Ketika penulis bertanya kepada pak Misnoyo, salah satu mbah Dukun di Tengger kaitan dengan tugas *wong sepuh* dan *legen,* iapun berkomentar sebagai berikut:

> "Wong sepuh adalah orang yang selalu membantu mbah dukun, begitu juga legen. Bedanya wong sepuh itu mengurus upacara-upacara adat dan kematian serta menyiapkan segala macam sesajen. Sementara, Legen bertugas mengurus upacara perkawinan, dan mempersiapkan sesajen."[5]

5 Wawancara dengan Misnoyo, salam satu Mbah Dukun Tengger pada tanggal 13 Oktober 2021.

repo uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

Secara fungsional, peran mbah Dukun sangat strategis dalam mengatur, menentukan, dan melaksanakan hal-hal penting kaitannya dengan peribadatan atau perayaan apapun yang dilakukan oleh masyarakat Tengger misalnya, upacara hari raya Kasada, Karo dan Unang-unang. Karenanya, secara kultur mbah Dukun memiliki kharisma di tengah masyarakat, bukan saja karena mbah Dukun dipandang sebagai tokoh desa yang dituakan, tapi juga karena status mbah Dukun tidak bisa lepas dari mitologi kekuasaannya yang sangat mulia di tengah masyarakat Tengger.

Bisa dibayangkan, untuk menjadi Mbah Dukun tidak semudah sebagaimana pilihan kepala desa. Salah satu syarat utama dari Mbah Dukun adalah harus menghafal matra-matra di luar kepala, yakni matra-matra yang biasa dibaca dalam setiap upacara dalam tradisi masyarakat Tengger. Bukan hanya itu, prosesi menjadi Mbah Dukun juga dilakukan dengan ritual tertentu, dekat kawah gunung Bromo yang dipandu oleh penyelenggara sesepuh masyarakat Tengger secara bersama-sama, yakni mereka yang mau menjadi Mbah Dukun. Dari prosesi ini dapat dipastikan, mereka yang terpilih adalah yang mengikuti ritual tengah malam, sekaligus dapat melantunkan mantra-mantra di luar kepala. Mereka yang ditakdir menjadi Mbah Dukun akan mudah melantunkan mantra-mantra tadi dengan lancar dan benar. Sebaliknya mereka yang tidak ditakdir, akan lupa di tengah jalan, walau sebelumnya sudah hafal di luar kepala.

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

Begitulah prosesi menjadi Mbah Dukun sehingga sudah wajar bila kharisma kepemimpinannya sangat nampak di tengah masyarakat. Bahkan, dalam konteks tertentu petuah-petuah Mbah Dukun, dengan kesederhanaan, di beberapa sangat ditunggu masyarakat dalam memutuskan hal-hal penting, termasuk soal pelestarian alam.[6] Dari sini dapat dipahami, walau sebagai pemimpin informal, keberadaan Mbah Dukun sangat penting, bahkan menentukan kaitan dengan keberlangsungan menjaga tradisi-tradisi masyarakat Tengger, sekaligus kontribusi masyarakat Tengger bagi pelestarian alam dan lain-lain.

Senada dengan Tengger, Komunitas Samin juga memiliki patronase yang kuat pada sesepuh mereka. Ketaatan pada sesepuh ini mempengaruhi cara berpikir dan berperilaku komunitas Samin pada umumnya.[7] Kedua hal itu disandarkan pada ajaran yang telah dimiliki dan diwariskan secara turun temurun. Sebagaimana dijelaskan di atas, sesepuh tidak selalu berasal dari anak kandung sesepuh sebelumnya. Artinya kekuasaan lokal non-formal ini tidak serta merta diwariskan dari sesepuh sebelumnya ke anak

---

6 Kaitan salah satu peran sosial Mbah Dukun bisa lihat Riska Dwi Setiaini dan Akhmad Ganefo, "Dukun Pandhita dan Pelestarian Budaya Lokal (Studi Tentang Suku Tengger Di Desa Wonokitri)", *Jurnal Entitas Sosiologi*, Volume VIII, Nomor 02, Agustus 2019.

7 Siti Nur Aini, "Kontribusi Harjo Kardi dalam Membangun Masyarakat Samin di Dusun Jepang Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur 1970-2015" (Surabaya: Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

repo uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

mereka. Terdapat kitab yang diyakini sebagai pedoman tata kehidupan dan ajaran komunitas Samin, yaitu Serat Jamus Kalimasada. Sesiapa yang ditakdirkan memegang kitab ini, ia lah yang akan menjadi sesepuh.[8]

Proses penobatan sesepuh komunitas Samin memang tidak seketat suku Tengger, tetapi benang merah keduanya dapat disimpulkan bahwa menjadi tetua atau menjadi sesepuh harus melalui prosesi tertentu. Proses inilah yang kemudian memunculkan kekuatan non-formal di lingkungan dua komunitas tersebut, yang dalam kajian ini disebut sebagai *cultural leader*. Disamping itu, posisi sebagai tetua berimplikasi pada kepatuhan memegang ajaran-ajaran yang telah diwariskan secara turun temurun dan berkewajiban menjaganya secara baik. Sosok *cultural leader* dari kedua komunitas ini menempatkan diri mereka harus secara ajeg dan konsisten menjaga ajaran-ajaran dan berperilaku sesuai ajaran yang mereka warisi secara turun temurun.

Kedua, masyarakat Tengger juga memegang prinsip pada kekuasaan formal. Struktur kekuasaan formal yang dimaksud adalah kekuasaan yang memiliki hubungan struktural dengan pemerintah. Misalnya dalam konteks masyarakat Tengger adalah kepala desa, sekretaris desa, kasun, kepala seksi dan kepala urusan terkait yang bertanggung jawab pada sekretaris. Struktur kekuasaan

8 Wawancara dengan Bambang Sutrisno (Putra ke-7 Mbah Harjo Kardi, sesepuh Komunitas Samin Bojonegoro) pada tanggal 12 Oktober 2021.

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

formal ini sejatinya berkaitan dengan struktur pemerintah sehingga dalam banyak hal, kegiatan yang dilakukan adalah kepanjangan dari kerja-kerja pada level pemerintahan, setidaknya pada tingkat desa.

Prinsip kepatuhan pada kekuasaan formal juga dipegang teguh oleh komunitas Samin. Sebagaimana lazim diketahui bahwa perlawanan Samin adalah perlawanan anti kolonialisme, yang berujung pada pembuangan Samin Surosentiko dan juga memunculkan sikap heroisme sedulur sikep, yaitu persaudaraan yang memiliki sikap sama dalam melawan kolonialisme di Indonesia. Keteguhan Samin dalam memegang prinsip patuh pada kekuasaan formal dapat dilihat pada statemen klasik mereka: "Yen wes tukule Kanjeng Jowo, Tinggi Jowo, Manggon mburi manut ombak'e banyu" yang berarti patuh pada kekuasaan atau pemerintah yang dipimpin oleh pribumi, bukan kolonial.[9]

Atas pernyataan legendaris itu, komunitas Samin memegang teguh prinsip ikut aturan pemerintah sebagai kewajiban bagi penganutnya. Karena tidak ada pemimpin yang secara prinsip berupaya mencelakai rakyat mereka. prinsip ini yang melandasi perilaku taat pemerintahan formal di kalangan komunitas Samin. Dari prinsip ini

9 Wawancara dengan Harjo Kardi (Sesepuh Samin, Bojonegoro) pada tanggal 12 Oktober 2021. Lihat juga Dheasrika Fernanda Ebrilianti, "Peran Ketua Adat Sedulur Sikep Dalam Meningkatkan Pembangunan Masyarakat di Desa Sambongrejo (Studi Kasus Masyarakat Samin Desa Sambongrejo, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora)," (Surakarta: Skripsi Universitas Sebelas Maret, 2020).

repo uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

pula, warga Samin dapat membaur dan bahu membahu mensukseskan program pemerintah, seperti pembangunan dan pemberdayaan yang diperuntukkan bagi masyarakat di lingkungan mereka.

Kekuasaan berbasis formal ini sangat membantu masyarakat kaitannya dengan hal-hal resmi kebijakan pemerintah. Tapi, menariknya kekuasaan formal ini, tetap saja dalam banyak kasus melibatkan Mbah Dukun sebagai legitimasi. Sebut saja dalam soal pelantikan, perangkat desa tidak saja dilantik oleh pemerintah, tapi juga harus melakukan proses *reresik*, yang dikenal dalam masyarakat Tengger sebagai aktivitas upacara adat yang melibatkan kepala desa dan seluruh perangkat desa. Upacara ini juga bagian dari pelantikan jimat dengan menggunakan pakaian putih sebagai simbol kesucian, yang dipimpin langsung oleh Mbah Dukun.

Fakta lain tentang persinggungan *cultural leader* dengan kekuasaan formal sebagaimana ditunjukkan oleh peran sesepuh yang seringkali menjadi rujukan akhir bagi pengambilan keputusan krusial strategis di tingkatan desa. Keterlibatan sesepuh Samin dalam memberi arah dan gerak ritmik harmoni sosial desa secara nyata ditampilkan melalui partisipasi politik yang nir-money politic di lingkungan komunitas Samin. Pilihan politik Mbah Harjo Kardi diikuti secara mutlak oleh komunitas Samin dan tanpa embel-embel politik uang dalam proses pemilihan kepala desa. Fakta ini cukup menarik, sebab di beberapa desa lainnya politik uang kerap mengiringi proses pemilihan kepala desa.

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

Berdasarkan dua fakta di atas, menunjukkan hubungan kekuasaan non formal dan kekuasaan formal sangat dekat, bahkan saling menentukan eksistensinya masing-masing. Karenanya, bagi masyarakat Tengger posisi kepada desa dan Mbah Dukun sangat penting dalam mengatur eksistensi kehidupannya, baik yang berurusan dengan pemerintahan maupun yang berkaitan dengan merawat aktivitas kaitannya adat istiadat dan pelaksanaan beragam upacara yang sesuai dengan siklus kalender masyarakat Tengger. Pun demikian, hal itu berlaku sama pada komunitas Samin, yang menempatkan posisi sesepuh selaku *cultural leader* sebagai mitra strategis kepala desa dalam membangun dan memberdayakan masyarakat desa.

Posisi strategis antara *structural leader* dan *cultural leader* ini digambarkan secara timbal balik sebagaimana bagan di bawah ini:

Dari bagan ini, bisa dipahami kaitan perannya dalam pembangunan, yakni berdasarkan pada adanya ikatan yang kuat masyarakat antara kedua komunitas tersebut (Tengger dan Samin) dengan kepala desa dan *cultural leader* (Mbah

repo uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

Dukun-Tengger dan Sesepuh-Samin) di masing-masing komunitas. Pertama: mendukung semua proses kebijakan pemerintah kaitannya dengan pembangunan. Sepanjang kepala desa dan Mbah Dukun memberikan memberitahuan kaitannya dengan pembangunan, maka secara otomatis masyarakat Tengger akan menerima, mengingat tingkat ketaatan pada kepemimpinan sangat tinggi, lebih-lebih kepada Mbah Dukun.

Begitu juga sebagaimana yang dilakukan oleh sesepuh Samin. Saat sesepuh menyampaikan kepada warga untuk urusan gotong royong pembangunan desa, masyarakat berbondong-bondong berpartisipasi dalam pembanguna desa tersebut. Partisipasi ini umumnya muncul sebagai keniscayaan yang telah diinternalisasi dari ajaran-ajaran Samin, sehingga dijumpai beberapa aktifitas gotong royong justru terjadi tanpa campur tangan terlalu jauh dari sesepuh. Masyarakat telah secara sadar menjadi bagian dari kelompok sosial di lingkungan itu, dan berkewajiban secara gotong royong membantu mensukseskan program-program pembangunan yang tekah dicanangkan oleh pemerintahan desa.

Tradisi lokal yang terjadi secara turun temurun diterima oleh kedua komunitas ini dari para leluhurnya. Tradisi itu telah terpatri menjadi karakter dan kepribadian mereka untuk selalu menjaga harmoni dengan orang lain sebagaimana mereka berharmoni dengan alam yang merupakan bagian dari ciptaan Tuhan. Artinya, ketaatan mereka untuk membantu tidak bisa lepas dari prinsip

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

kehidupan yang telah mendarah-daging kaitan dengan relasi dirinya dengan orang lain, Tuhan dan alam. Tanggungjawab sebagai manusia harus senantiasa mendukung kebaikan dan menjaga harmoni, apapun bentuk prilaku atau ucapanya, mengutip penjelasan salah satu tokoh adat Tengger yang juga menjabat Plt. Kepala desa, Pak Rujianto.

Kedua, ikut turun di lapangan membantu agar pelaksanaan pembangunan. Terlibat di lapangan adalah salah satu bentuk kesungguhan masyarakat Tengger dalam upaya memberikan kontribusi bagi setiap program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah. Pasalnya, manfaat pembangunan sangatlah besar dalam memberikan kemudahan dalam beraktifitas, khususnya pembangunan jalan desa yang mempertemukan antar desa-desa bagi masyarakat Tengger.

Lebih dari itu, keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa tidak bergerak sendiri-sendiri, tapi mengikuti komando pimpinan formal dan non-formal sebab kesetiaan masyarakat Tengger kepada pimpinannya sangat tinggi melebihi kesetiaan pada yang lain. artinya, bila kepala desa dan Mbah Dukun sudah menyepakati pembangunan yang telah dicanangkan oleh pemerintah, maka secara otomatis masyarakat Tengger akan mengikutinya dengan turut terlibat terhadap pembangunan sesuai pekerjaan yang dibutuhkan dan sesuai dengan kemampuan mereka.

Fakta lain didapatkan dari komunitas Samin, dimana putra dari sesepuh juga turut aktif sebagai ketua Karang

repo uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

Taruna Desa Margomulyo. Selain itu, kesehariannya juga sebagai ASN di kecamatan Margomulyo. Atas dua posisi ini, Samin dapat dikatakan telah terbuka pada perubahan dan arus pembangunan. Samin juga menjadi salah satu ikon desa dengan wujud pembangunan desa wisata budaya dan pagelaran festival Samin. Pembangunan yang diinisiasi oleh pemerintahan desa sepenuhnya didukung oleh komunitas Samin. Sekali lagi, bahwa itu terjadi berkat ajaran sebagaimana dinyatakan di atas, manggon mburi manut ombak'e banyu.

Ajaran Samin itu telah terpatri di lingkungan masyarakat secara kuat. Hal itu dibuktikan dengan adanya perilaku gotong royong yang hingga kini masih kuat mengakar di masyarakat Samin. Bahkan Miran QR, salah satu masyarakat Jepang menyebut keberadaan dan kekuatan ajaran Samin tersebut mampu merekatkan hubungan antara komunitas Samin dan warga masyarakat pada umumnya. Miran melihat bahwa semangat gotong royong yang ditampilkan oleh warga masyarakat adalah cerminan dari perilaku ajaran Samin. Ia tak dapat menggambarkan secara detail, tetapi mampu merasakan kekuatan ajaran itulah yang mampu mendorong munculnya sikap andarbeni di antara masyarakat yang ada di lingkungan komunitas Samin.[10]

Jadi, posisi dan peran kedua komunitas dalam konteks pembangunan daerah tidak bisa dilepaskan dari nilai-

10 Wawancara dengan Miran QR (Kepala KUA Kasim, warga asli dusun Jepang Bojonegoro) pada tanggal 13 Oktober 2021.

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

nilai lokal kaitannya dengan ketaatan mereka terhadap kepemimpinan formal dan non formal sebab hidup ini tidak bergerak sendiri, apalagi yang akan dilakukan masyarakat Tengger memiliki dampak sosial yang cukup luas sebagaimana terjadi dalam proses pembangunan daerah. Hubungan ini yang kemudian para pemegang kebijakan baik daerah maupun pusat tidak boleh mengabaikan kearifan lokal ini agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, untuk tidak mengatakan akan mengalami kegagalan.

2. Bentuk Partisipasi Komunitas Samin-Tengger dalam Pembangunan Desa

Sebelum penulis menjelaskan bagaimana bentuk partisipasi yang selama ini terjadi dalam lingkungan suku Tengger Probolinggo, maka perlu ditegaskan bahwa dalam proses pembangunan, apalagi yang didanai oleh pemerintah, keterlibatan semua pihak menjadi kunci. Artinya, pemerintah sebagai pemantik modal dan gagasan harus melibatkan masyarakat setempat, yang menjadi target prioritas pembangunan, termasuk pembangunan desa. Jangan sampai, proses kebijakan dilakukan tanpa keterlibatan masyarakat, apalagi menganggap mereka sebagai obyek dari pembangunan ini.

Semangat ini sebenarnya tergambarkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021. Lebih tegasnya, bila membaca pasal 10, dapat disimpulkan

repo uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

bahwa pemerintah sangat memperhatian betul kaitannya dengan partisipasi masyarakat; mulai soal prioritas dana desa, penetapan, sosialisasi, pelaksanaan dan evaluasi. Artinya, dari awal pemerintah memperhatikan betul agar masyarakat terlibat secara partisipatif dalam kegiatan yang dicanangkan pemerintah, khususnya pembangunan desa.

Dalam konteks masyarakat suku Tengger, gerak partisipatif sangat nampak dalam setiap pembangunan. Pastinya, partisipasi yang dilakukan tidak bisa dilepaskan dengan kultur kesadaran dan model komunikasi mereka, baik intenal maupun dengan eksternal yang dibangun dalam basis nilai *local wisdom*, yakni berkaitan dengan pandangan mereka yang berpusat pada pentingnya menjaga kehidupan harmoni dengan pola yang diperoleh secara turun temurun. Salah satu pola hubungan yang menarik adalah hubungan kepala desa, mbah dukun dan masyarakat. Hubungan ini yang kemudian melahirkan model partisipasi dalam setiap pembangunan.

Oleh karenanya, kaitan dengan partisipasi masyarakat Tengger tidak bisa diragukan. Tapi, dalam rangka agar pola partisipasinya semakin nampak dari setiap proses pembangunan yang menjadi prioritas dengan mengikuti tahapan-tahapan partisipasi, yakni tahapan perencanaan (planning), pengerjaan *(participation by doing)*, dan evaluasi program (monev).

Pertama, tahapan perencanaan (planning). Pada tahapan ini, biasanya melibatkan kepala desa, perwakilan

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

warga, dan selama ini juga ada perwakilan dari tim kemendes sebagai pendamping. Dalam prosesnya, tahapan perencanaan dilakukan dengan menggunakan forum-forum resmi, misalnya Musrenbangdes dan Rembug Warga. Lebih dari itu, tahapan perencaan biasanya juga dilakukan dalam forum-forum kultural yang diadakan oleh kepada adat, walau tidak jarang tahapan perencanaan ini sebagai bahasan tambahan, setelah kepala adat dan masyarakat menyepakati kegiatan-kegiatan rutin yang berkaitan denga adat, misalnya tentang upacara, dan lain-lain.

Menariknya, ketika penulis turun di desa Ngadirejo kecamatan Sukapura –sebagaimana penjelasan sebelumnya— menemukan kepala adat, sekaligus menjabat plt. kepala desa. Dalam konteks ini maka, bisa dipahami bahwa pemimpin kultural dan pemimpin strutural sangat elastis sehingga sangat dimungkinkan dijabat satu orang sebagaimana dialami oleh Pak Rujianto. Ketika ditanya soal perencanaan dalam pembangunan, maka pak Rujianto mengatakan sebagai berikut:

> "saya kali ini menjadi kepala desa, sekaligus kepala adat. Akivitas saya ganda, bukan saja menerima masyarakat kaitan dengan urusan administrasi desa, tapi juga berkoordinasi kaitan dengan tradisi masyarakat Tengger, seperti upacara dan lain-lain. Dalam program pemerintah, seperti pembangunan desa, kondisi ini memudahkan saya untuk koordinasi

repo uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

dengan melibatkan masyarakat dalam mencari langkah prioritas yang harus dipilih sesuai dengan kebutuhan mereka."[11]

Memang posisi Pak Rujianto sangat strategis dan memudahkan dalam kordinasi untuk penentuan planning kegiatan pembangunan desa. Banyak hal yang bisa dilakukan, bisa menggunakan medium musyawarah desa atau bisa juga menggunakan forum-forum adat bersamaan dengan kegiatan ada. Karenanya, dalam konteks perencanaan pembangunan dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat dan pemerintah, bahkan tidak jarang para pemdamping desa ikut mendampingi proses.

Pastinya, pastisipasi yang dilakukan masyarakat Tengger dalam setiap perencanaan sangat jelas, walau dalam penentuan dan peresmian pembangunan mengikuti arahan dari kepala desa dan suku adat. Hanya saja pelibatan masyarakat dalam perencanaan prioritas menjadi kunci bahwa setiap proses pembangunan selalu menjaga agar tidak bermasalah, bila betul-betul jauh dari kepentingan masyarakat. Pastinya, prosesnya adalah dimulai adanya penentuan desa yang menjadi sasaran tujuan bantuan pemerintah, lantas kepala desa—dengan dukungan kepala adat—bersama masyarakat melalukan musyawarah untuk menentukan skala prioritas

11 Wawancara dengan pak Rujianto, Plt. Kepala Desa dan Kepala Adat desa Ngadirejo Kecamatan Sukapura 13 Oktober 2021.

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

pembangunan sesuai dengan fakta-fakta yang dibutuhkan kaitan dengan pembangunan desa.

Dari potret Pak Rujianto, peran masyarakat dalam pembangunan kaitanya dengan perencanaan prioritas menunjukkan keunikan tersendiri sebab bukan saja hubungan kepala desa –mewakili pemerintah, tapi juga hubungan kepala adat yang sangat kuat. Jadinya, partipasi masyarakat Tengger cukup baik dalam konteks perencanaan pembangunan dengan menentukan skala prioritas, waktu pelaksanaan hingga batas akhir program. Pastinya, keterlibatan masyarakat dalam konteks perencanan lebih didasarkan pada keterwakilan mereka, bukan semuanya datang dalam forum musyawaroh.

Jadi dibawah komando koodinasi kepala desa, sebagai pihak yang mengawal apapun yang berkaitan dengan administrasi, dan restu kepada adar dalam proses ini memungkinkan proses partipasi masyarakat Tengger—sekali lagi—lebih mudah digerakkan sehingga proses pembangunan desa berjalan sesuai dengan yang diharapkan, dan sesuai dengan fakta yang betul-batul dibutuhkan masyakat.

Sementara kedua, partisipasi berbasis pelaksanaan. Berbeda dengan sebelumya, pastisipasi ini lebih banyak aksi di lapangan dengan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program yang direncanakan. Bagi masyarakat Tengger, keterlibatan yang dalam pelaksanaan lebih mudah dilakukan sebab tradisi lokal yang berkembang dalam

repo uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

lingkungan mereka masih sangat kuat dalam menjaga hubungan harmoni antar sesama, termasuk dalam mengawalkan kepentingan umum.

Dalam banyak hal, mereka yang jarang kerja bakti atau terlibat dalam pelaksanaan pembangunan jalan—sebagai skala prioritas—akan terbangun rasa malu sebab akan mendapat perlakuan secara kultural dari yang lain. Sebut saja, misalnya, adanya rasa malu untuk hanya berpikir kepentingan diri sendiri, mengingat pembangunan jalan lebih banyak untuk kepentingan umum. Kaitan dengan ini, salah satu plt. kepala desa di Ngadisari mengatakan:

> "Masyarakat Tengger masih kuat berpegang pada nilai-nilai lokal kaitan kebersamaan dan gotong royong. Mereka yang tidak memeperhatikan hal ini sehingga tidak hadir dalam kegiatan kerja bakti, sangat dimungkinkan mereka malu sebab secara alami ada sangsi moral. Dan kejadian ini sangat jarang terjadi karena mungkin saya juga sebagai kepala adat."[12]

Dengan begitu, masyarakat Tengger sudah terbiasa gotong-royong dalam membangun desa sehingga kebijakan apapun yang menyangkut dengan pembangunan desa selalu mudah dilakukan, asal tetap mendapat persetujuan

12 Ibid.

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

dari kepala desa dan Mbah Dukun sebagaimana disebutkan sebelum. Jika keduanya, belum memberikan restu, maka bisa dikatakan pembangunan apapun akan mengalami hambatan, untuk tidak mengatakan akan gagal.

Sementara itu, partisipasi dalam konteks evaluasi atau monev, biasanya dilakukan oleh unsur perwakilan dari pemerintah daerah atau pusat, kepala desa, mbah dukun dan perwakilan masyarakat. Semua bersinergi berdasarkan kemampuan dan kapasitasnya masing-masing. Maksudnya, pemerintahan daerah atau pusat hanya sebagai pengarah dengan dibantu oleh pendamping desa untuk kegiatan pembangunan desa yang diinisiasi oleh kementerian desa.

Model partisipasi yang dilakukan masyarakat Tengger di atas, sejatinya juga dilakukan di komunitas Samin, bahwa partisipasi dari proses perencanaan diikuti karena memang partisipasi pada level ini dilakukan untuk merancang suatu program pembangunan. Para tokoh adat dan tokoh masyarakat lainnya menjadi bagian dari perencanaan pembangunan desa. Mereka terlibat memberi sumbangsih gagasan dan jalan keluar atas pembangunan yang dibutuhkan untuk mensejahterakan masyarakat.

Pada proses pelaksanaan, gotong royong menjadi kunci perekat sosial di antara mereka, tak terkecuali komunitas Samin. Sebagaimana dijelaskan di atas, gotong royong merupakan nilai sosial yang tertanan kuat di wilayah ini. Partisipasi yang dimainkan oleh komunitas Samin dalam pelaksanaan pembangunan memiliki peran

repo uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

strategis sebab ajaran dan anjuran dari sesepuh Samin di wilayah ini adalah membantu sesama dan menjaga keseimbangan alam secara baik.

Selain dua hal di atas, terdapat beberapa bentuk partisipasi masyarakat Samin dalam pembangunan desa, yang lahir dari ajaran yang mereka pedomani dalam kehidupan. Pertama, partisipasi ekologis. Partisipasi ini diwujudkan komunitas Samin dengan selalu mengkampanyekan pentingnya menjaga hutan di sekitar perkampungan mereka. hal itu diterjemahkan secara teknis dengan mencegah penebangan hutan secara liar. Pengambilan kayu hutan dilakukan dengan izin dari pemangku kepentingan hutan setempat dan hanya untuk kepentingan umum. Alhasil sepanjang jalan menuju dusun Jepang, pohon-pohon jati berdiri tegak di pinggir jalan. Hutan ini terbelah jalan paving yang menghubungkan jalan besar arah Ngawi dengan pemukiman komunitas Samin. Keberadaan hutan ini masih asli dan tidak menunjukkan adanya penabangan liar. Oleh masyarakat sekitar, hutan itu dijaga dengan baik sebagai bagian dari kehidupan mereka.

Komunitas Samin melalui pemerintahan desa juga membuka wisata budaya desa. Wisata ini memanfaatkan lahan yang dikuasai oleh Perhutani Ngawi. Atas seizin pemangku kepentingan hutan, mereka memanfaatkan lahan ini untuk kepentingan wisata budaya. Di area ini juga di gelar festival Samin, setiap tahun. Pengelolaan festival Samin dan wisata budaya ini secara teknis di bawah tanggungjawab Karang Taruna Desa Margomulyo.

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

Kedua, partisipasi sosial. Partisipasi ini sifatnya tidak hanya untuk melancarkan pembangunan desa semata, tetapi juga partisipasi yang diberikan kepada antar warga saat terdapat hajatan atau kepentingan khusus yang melibatkan banyak orang. Bondong-bondong warga untuk saling membantu ini mereka kenal sebagai gotong royong, suatu istilah yang lekat dengan masyarakat Indonesia pada umumnya, yang kini hampir punah. Gotong royong menjadi penciri utama masyarakat Samin. Guyub rukun antar warga terwujud melalui bhakti gotong royong ini. Hal ini menurut Miran QR menjadi pembeda dengan desa-desa lainn. Ia tidak dapat mengungkapkan dengan kata-kata tetapi dapat merasakan perbedaan itu, dimana masyarakat masih sukarela membantu satu sama lain.[13]

Ketiga, Partisipasi Politik. Sebagaimana telah diungkap di atas, partisipasi yang ditampilkan oleh komunitas Samin ini adalah dengan gigih menghindari politik uang. Hal itu juga disampaikan oleh kepala Desa setempat, bahwa selama dua kali menjalani proses kontestasi pemilihan kepala desa, ia tidak mengeluarkan uang untuk kepentingan mobilisasi dan pengerahan pemilih pada dirinya.[14] Mbah Harjo Kardi sendiri mengakui bahwa masyarakat, terutama di dusun Jepang lebih mengikuti arah pilihan dirinya dan menolak

13 Wawancara dengan Miran QR (Kepala KUA Kasim, warga asli dusun Jepang Bojonegoro) pada tanggal 13 Oktober 2021.

14 Wawancara dengan Nuryanto (Kepala desa margomulyo) pada tanggal 13 Oktober 2021.

repo uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

politik uang. Penolakan ini disampaikan kepada warga agar kelak yang terpilih menjadi kepala desa tidak terbebani dengan mengembalikan modal yang telah dikeluarkan selama proses politik tingkat desa tersebut. Sehngga dapat bekerja dengan baik mensejahterakan masyarakat.

Argumentasi yang dibangun oleh Mbah Harjo Kardi ini memberi ilustrasi bahwa ia adalah sosok yang kuat sebagai sesepuh (cultural leader) yang ditaati oleh warga komunitasnya dan juga oleh masyarakat sekitar. Prinsipnya ia menjalankan sesuatu yang baik dan dengan keyakinan yang kuat hal itu akan berimbas menjadi sesuau ynag baik pula.[15]

Keempat, partisipasi pemerintahan. Sebagaimana dinyatakan di atas, partisipasi pemerintahan ditunjukkan oleh komunitas Samin melalui keterlibatan putra Mbah harjo Kardi sebagai ketua Karang Taruna Desa. Selain itu, hal mendasar yang melandasi partisipasi pemerintahan ini juga didasari oleh ajaran Surosentiko Samin yang menegaskan manut ombak'e banyu. Partisipasi pemerintahan kerap ditunjukkan oleh komunitas Samin dengan terlibat secara aktif dalam kegiatan-kegiatah pemerintahan desa dan menginisiasi kegiatan-kegiatan lain yang dapat mengharumkan nama desa.

Melihat keempat bentuk partisipasi di atas, kelenturan

15 Wawancara dengan Harjo Kardi (Sesepuh Samin, Bojonegoro) pada tanggal 12 Oktober 2021.

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

dan keterbukaan komunitas Samin sejajar dengan apa yang ditampilkan oleh masyarakat Tengger. Kedua komunitas ini secara terbuka menerima perubahan dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa. Kelebihan partisipasi berbasis komunitas ini adalah adanya kekuatan ajaran yang telah diwarisi turun temurun dan terinternalisasi menjadi perilaku sosial. Kekuatan ajaran inilah yang membentuk komunitas menjadi pribadi yang taat pada cultural leader di satu sisi, dan taat pada structural leader di sisi yang lain. Keduanya tidak dipertentangkan atau tidak mengalami pertentangan.

Kekuatan ajaran bagi komunitas menjadi spirit dalam membangun harmoni sosial. Di samping itu, harus diakui, desa-desa yang memiliki komunitas etnik atau komunitas lainnya kerap terdongkrak popularitasnya dan tidak perlu susah-susah mencari identitas yang harus dikembangkan di desa tersebut, sebab hal itu sudah ada, berupa identitas etnik. Pemerintah desa tinggal mengkomodifikasi identitas komunitas tersebut menjadi kekuatan yang selanjutnya dapat dipakai untuk kepentingan bersama masyarakat desa. Dengan demikian, desa yang memiliki komunitas dapat disimpulkan sangat diuntungkan.

B. Dari Desa untuk Komunitas

1. Dukungan Pemerintah untuk Pemberdayaan Komunitas

Interaksi timbal balik dua arah antara masyarakat dengan pemerintah merupakan modal dasar dalam mewujudkan

repo uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

tujuan pembangunan. Tak terkecuali dalam upaya menjaga dan mengembangkan tradisi-budaya yang telah lahir di tengah kehidupan sosial. Komunitas Samin di Dusun Jepang Bojonegoro merupakan salah satu wujud warisan budaya bangsa yang membutuhan sentuhan dukungan pemerintah agar bisa tetap eksis dan berkembang. Perhatian dari pemerintah dalam menjaga eksistensi komunitas Samin tentu tak terbatas pada dukunga bersifat material, tetapi juga dukungan non material sangat dibutuhkan.

Sejalan dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dinyatakan pada pasal 78 bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pada posisi ini, pemerintah mulai dari tingkat pusat hingga desa memiliki peran penting untuk menginisiasi, mendukung dan memfasilitasi proses pembangunan desa secara material maupun non material. Termasuk di dalamnya mendukung pelestarian nilai-nilai budaya bangsa yang telah tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat desa.

Penetapan ajaran Samin Bojonegoro sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ada tahun 2019 merupakan salah satu wujud dukungan non material dari Pemerintah

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

Indonesia. Arti penting pengakuan dan apresiasi dari pemerintah tentu tak sebatas pada selembar piagam, tetapi implikasi dari penetapan tersebut juga akan membangun persepsi positif dari publik tentang eksistensi komunitas Samin. Pemerintah pada seluruh level, mulai dari tingkat desa hingga pemerintah pusat, bisa memainkan peran masing-masing untuk turut berkontribusi dalam memajukan warisan budaya bangsa yang masih bertahan hingga saat ini. Pada sisi stakeholders, dukungan dari berbagai elemen masyarakat juga sangat diperlukan guna memperkuat eksistensi komunitas Samin di Dusun Jepang Bojonegoro.

Pada tingkat desa, yang bersinggungan langsung dengan dinamika kehidupan masyarakat Samin, mereka memiliki posisi strategis untuk terus menjaga dan mengembangkan nilai-nilai Saminisme. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan Nuryanto, Kepala Desa Margomulyo, bahwa pemerintah desa memahami komunitas Samin sebagai potensi kekayaan budaya yang harus selalu dilestarikan. Oleh karena itu, Pemerintah Desa Margomulyo menempatkan budaya Samin sebagai salah satu prioritas program pembangunan Desa yang disusun melalui kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Kegiatan tersebut sebagai forum dialogis tahunan antara pemerintah desa dengan para pemangku kepentingan guna menyusun program-program stretegis untuk memajukan dan meningkatkan potensi desa.[16]

16 Wawancara dengan Nuryanto, Kepala Desa Margomulyo

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

"Kami dari pihak Pemerintah Desa selama ini memang memiliki perhatian khusus dalam rangka mengembangkan budaya Samin di Desa Margomulyo, khususnya di wilayah Dusun Jepang. Setiap tahun sudah dialokasikan anggaran untuk menyiapkan kegiatan pelestarian budaya Samin, misalnya dengan mengadakan festival Samin. Selain itu juga membangun infrastruktur untuk mempermudah akses ke wilayah Dusun Jepang, sehingga masyarakat luar bisa lebih mudah dan nyaman dalam mendalami budaya Samin. Pembangunan akses jalan menuju Dusun Jepang adalah salah satu yang sudah kita lakukan, juga berkomunikasi dengan pihak Perhutani agar bersedia menyediakan lahan guna mendukung kegiatan perkemahan dan pelestarian budaya", ungkap Nuryanto.

Keberhasilan sebuah program dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan lingkup program. Jika tingkat partisipasi masyarakat tinggi, maka dapat mendorong tingkat keberhasilan program tersebut, begitu pula sebaliknya.[17] Untuk itu pola interaksi antara komunitas

---

Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 13 Oktober 2021.

17 Febi Rizka Eliza dkk, "Peran Pemerintah terhadap Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Suku Anak Dalam (SAD) di Provinsi Jambi Tahun 2018," *Jurnal Kesmas Jambi* (JKMJ) 2, 1 (2018), 40-49.

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

dengan Pemerintah Desa setempat perlu dilakukan dalam kerangka simbiosis-mutual, dalam arti kedua pihak saling memberikan kontribusi atau manfaat satu sama lain. Manfaat sebagaimana dimaksud dapat berupa dukungan material maupun non material.

Meski demikian, pemerintah sebagai bagian unit sosial yang melekat padanya sebuah kewenangan menyusun kebijakan, maka pemerintah lebih banyak bertanggung jawab dalam membangun sendi-sendi potensi desa agar bisa terus dikembangkan. Berdasarkan telaah kondisi faktual pada komunitas Samin Dusun Jepang, dapat diidentifikasi beberapa dukungan yang diberikan Pemerintag Desa kepada komunitas Samin, antara lain: dukungan anggaran, dukungan pengembangan insfrastruktur serta dukungan dalam bentuk pelaksanaan kegiatan.

Gambar 4.1.
Model Dukungan Pemerintah Desa untuk Komunitas Samin

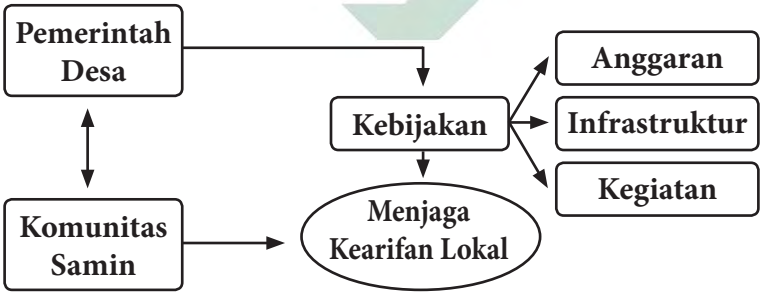

repo uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

a. Dukungan Anggaran

Pemerintah Desa Margomulyo selama ini telah memberikan alokasi anggaran untuk kepentingan pemberdayaan komunitas Samin. Dukungan anggaran sebagaimana dimaksud disusun bersama berbagai unsur masyarakat melalui Musrenbangdes. Lingkup implementasi dukungan anggaran ini bisa berupa bantuan finansial secara langsung, maupun penganggaran yang diberikan dalam wujud pembangunan sarana prasarana serta kegiatan-kegiatan pengembangan masyarakat. Dukungan anggaran dari Pemerintah Desa kepada komunitas Samin tidak terbatas pada alokasi dalam APBDes (Anggaran Pemdapatan dan Belanja Desa) tetapi juga terbuka peluang bantuan anggaran yang diperoleh dari sumber lain, baik pemerintah daerah/pusat maupun organisasi swasta.

b. Dukungan Pengembangan Infrastruktur

Tak terlepas dari dukungan anggaran, Pemerintah Desa Margomulyo turut berperan dalam pembangunan infrastruktur wilayah desa, tak terkecuali di Dusun Jepang sebagai lokasi komunitas Samin. Jika dulu akses masuk menuju Dusun Jepang begitu sulit dijangkau karena kerusakan jalan, kini kondisi tersebut sudah berubah. Kita bisa melewati jalan poros desa menuju Dusun Jepang dengan mudah, tanpa khawatir kendala jalan terjal atau jalan becek berlumpur. Pembangunan jalan merupakan salah satu dukungan pemerintah untuk kepentingan

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

komunitas Samin, di samping dukungan infrastruktur dalam bentuk berbeda, seperti: pembangunan lembaga pendidikan, perbaikan rumah warga, serta fasilitas umum lainnya. Dukungan infrastruktur juga bisa bersumber dari pihak lain baik pemerintah daerah/pusat maupun swasta, dalam hal ini Pemerintah Desa berperan sebagai mediator dalam penyaluran bantuan.

c. Dukungan Program/Kegiatan

Selain dukungan dalam bentuk anggaran dan infrastruktur, Pemerintah Desa Margomulyo juga memberikan dukungan berupa pelaksanaan program/kegiatan dalam memberdayakan komunitas Samin. Salah satu kegiatan yang diagendakan secara rutin dan difasilitasi oleh Pemerintah Desa adalah Festival Samin. Kegiatan tahunan tersebut juga melibatkan dukungan dari berbagai pihak di luar Pemerintah Desa, sehingga pola komunikasi secara baik sangat dibutuhkan guna menunjang kesuksesan program kegiatan. Program lain yang diberikan Pemerintahn Desa kepada komunitas Samin adalah kegiatan pemberdayaan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat.

Dukungan Pemerintah Desa dalam menjaga kearifan lokal, termasuk di dalamnya nilai dan ajaran leluhur dan disampaikan secara turun temurun, menjadi faktor kunci dalam pembangunan desa menuju harmoni tata kehidupan masyarakat. Semakin bersinergi antara kebijakan pemerintah dengan besarnya partisipasi masyarakat, maka semakin mudah

repo uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

mewujudkan pembangunan desa secara berkelanjutan. Tanpa dukungan masyarakat, maka upaya pembangunan desa akan kehilangan substansinya. Dalam kerangka SDGs *(Sustainable Development Goals)* Desa, sinergi pemerintah dengan komunitas merupakan variabel pendukung pembangunan berkelanjutan yang akan masuk dalam program prioritas pembangunan di wilayah pedesaan.

Apa yang dialami masyarakat Samin di Bojonegoro kaitan dukungan pemerintah dalam pemberdayaan komunitas hampir memiliki kesamaan denga napa yang dialami oleh masyarakat Tengger, khususnya yang berada di wilayah Sukopura yang menjadi titik penelitian ini dilakukan. Artinya, dalam banyak hal pemerintah memang ikut andil dalam pemberdayaan masyarakat Tengger, baik kaitan dengan dukungan anggaran, Dukungan Pengembangan Infrastruktur maupun Dukungan Program/Kegiatan.

Pastinya, pada titik tertentu setiap desa memiliki karakteristik, dan yang menarik dari karakteristik Tengger adalah kesadaran bahwa menjaga harmoni adalah kunci yang ingin diciptakan sebagai manifestasi dari pancaran keindahan Gunung Bromo sebagai pemberian agung Tuhan. Karenanya, dukungan pemerintah selalu disinergikan dengan kekuatas kharismatik lokal, yakni adanya Mbah Dukun dan pemangku agama. Untuk lebih jelasnya bagaimana model dukungan pemerintah di satu sisi, dan dukungan mbah dukun dan pemangku agama di sisi yang berbeda sebagai berikut:

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

Gambar 4.2.
Model Dukungan Pemerintah Desa dan Sinergitas dengan Kekuatan Lokal

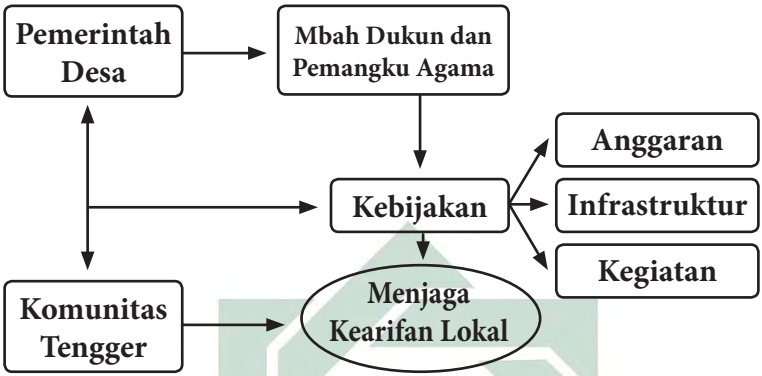

Jadi, dukungan pemerintahan desa—dengan restu Mbah Dukun dan pemangku agama---mengantarkan pemberdayaan masyarakat sangat kuat dengan mengandalkan gaya partisipatoris yang sangat tinggi sebab nilai-nilai lokal yang tumbuh telah membentuk karakter suku Tengger dalam berinteraksi dengan dirinya, orang lain, alam dan penguasa jagat semesta, yakni Tuhan.

2. Institusionalisasi Nilai untuk Keberlangsungan Komunitas

Institusionalisasi atau pelembagaan nilai merupakan langkah dalam memberi penghargaan sekaligus pemeliharaan nilai-nilai yang dimiliki oleh komunitas. Pelembagaan berarti mengafirmasi sebagaian atau keseluruhan apa yang dimiliki oleh komunitas agar tetap hidup dan tumbuh seiring

repo uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat itu. Ujung dari proses pelembagaan itu adalah agar apa yang telah mengakar di komunitas dapat dimiliki secara bersama oleh masyarakat. Nilai-nilai itu dapat diinternalisasi dan dapat dipakai sebagai norma sosial bersama. Dari proses pelembagaan ini, keberlangsungan nilai-nilai yang ada dalam komunitas dapat terpelihara dengan baik. pelembagaan umummya diberikan oleh pengampu kebijakan agar komunitas merasa memperoleh dukungan atas apa yang telah mereka perjuangkan. Di samping itu, pelembagaan juga berguna untuk menopang sisi-sisi yang menjadi kekhasan dan atau hasil dari proses perjuangan yang selama ini dilakukan oleh masyarakat.

Pelembagaan diberikan oleh pengampu kebijakan berupa dukungan kebijakan dan dukungan anggaran, serta dukungan pranata lain yang memungkinkan nilai itu lestari dan dimiliki bersama. Dalam konteks yang lebih luas, pelembagaan juga diberikan oleh pengampu kebijakan dalam bentuk pembangunan sarana fisik, seperti pembangunan gedung yang berguna bagi kelestarian nilai tersebut. Selain itu, pelembagaan juga diberikan dalam bentuk mengafirmasi nilai-nilai atau warisan luhur suatu masyarakat yang dengan itu mereka dapat lebih meningkatkan kapasitasnya dan konsisten memegang nilai-nilai tersebut.

Masyarakat Tengger memang dianugerahi alam dengan Gunung Bromonya. Keindahan ini juga ditopang dengan banyaknya ragam tradisi yang menjadi simbol unik mereka

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

sehingga membedakan dengan masyarakat lain yang berada di berbagai daerah. Gunung Bromo yang sangat indah telah memantik para wisatawan datang dari berbagai wilayah di Indonesia, bahkan dari manca negara. Secara ekonomi, kedatangan para wisatawan ini memiliki dampak yang sangat besar bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar, termasuk masyarakat suku Tengger.

Di samping itu, keunikan budaya yang dimiliki masyarakat Tengger telah menjadi sistem nilai yang turun-temurun. Tidak tahu sejak kapan budaya unik dengan simbol yang mengiringinya itu berkembang, yang pasti tidak bisa dilepaskan dari pertumbuhan dan perkembangan masyarakat Tengger sebagaimana disebutkan sebelumnya. Apapun alasannya, pelestarian budaya lokal masyarakat adalah keniscayaan bagi siapapun, apalagi bagi pemerintah. Jangan sampai, atas nama pembangunan desa, lantas pemerintah merusak kearifan lokal dari kekhasan budaya masyarakat Tengger.

Di lihat dari sisi ini, pemerintah nampaknya sangat memperhatikan hal ini–dalam berbagai kebijakannya—sebagai upaya agar keunikan masyarakat Tengger tidak tercerabut dari budayanya sendiri. Inisiasi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, dalam konteks masyarakatan Tengger, masih memperhatikan betul budaya lokal setempat, apalagi budaya Tengger telah menjadi pemantik luar biasa bagi kehadiran para wisata. Artinya, ada proses institusionalisasi yang dilakukan oleh pemerintah

repo uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

dalam rangka merawat budaya lokal yang ada sebagai simbol dari kearifan masyarakat Tengger.

Salah satunya adalah upacara Yadnya Kasada. Sekedar untuk diketahui, upacara Yadnya Kasada adalah salah satu upacara yang dilakukan oleh masyarakat Tengger sebagai bentuk rasa syukur, sekaligus harapan agar dijauhkan dari malapetaka. Lebih dari itu, upacara ini juga sebagai bhakti mereka kepada Sang Hyang Widhi dan para leluhur. Dengan begitu, masyarakat Tengger berada dalam situasi hening, penuh kesakralan dan larut dalam doa-doa lirih agar selamat dari malapetaka dan balak.

Biasanya, tahapan Yadnya Kasada yang dipandang oleh banyak kalangan eksternal sebagai keunikan tersendiri bagi masyarakat Tengger adalah aktivitas tengah malam yang melibatkan banyak orang. Mereka semua hadir menuju Gunung Bromo untuk menghantarkan korban suci sesajen; mulai hasil ternak dan pertanian ke Pura Luhur Poten Agung. Lantas sesajen lain, misalnya sayuran atau –bahkan- uang yang telah disiapkan di bawah menuju ke atas untuk dilarung ke kawah. Prosesi ini diyakini sebagai simbol pengorbanan yang dilakukan leluhur leluhur masyarakat Tengger.

Jadi keunikan upacara Yadnya Kasada adalah kekayaan budaya yang dimiliki oleh masyarakat Tengger sebagai pembeda dengan komunitas lainnya di negeri ini. Keterbukaan masyarakatnya dalam batas-batas tertentu menjadi sebab pihak luar dapat terlibat dalam upacara Yadnya Kasada, baik sebagai penonton atau larut dalam

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

kegiatan Yadnya Kasada. Karenanya, hal ini menjadi alasan tersendiri bagi para wisata dari berbagai daerah, lebih-lebih pariwisata dari luar, untuk hadir mengikuti perayaan ini. Bagi mereka dari luar, kehadirannya disebebab ingin mengetahui simbol-simbol budaya lokal masyarakat Tengger yang tidak ditemukan di daerah atau negara asalnya.

Photo Proses Upacara Yadya Kasada suku Tengger[18]

Oleh sebab itu, cukup beralasan bila pemerintah memandang penting untuk ikut andil mendukung, bahkan mengawal keberlangsungan upacara Kasada sebagai bagian dari kegiatan pemerintahan desa, bukan hanya kegiatan komunitas Tengger dengan Mbah Dukun sebagai pemeran utama kegiatan upacara, yang mengatur hingga memimpin

18 Photo dikutip dari: https://www.liputan6.com/lifestyle/read/4590866/mengenal-yadnya-kasada-yang-dirayakan-suku-tengger-di-gunung-bromo-dari-24-26-juni-2021. diakses pada tanggal 17 November 2021

repo uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

ritual-ritual yang harus dilaksanakan. Artinya, pemerintahan desa ikut andil mendukung kegiatan ini dalam rangka merawat kearifan lokal sebagai ciri khas masyarakat Tengger.

Bukan hanya itu, pemerintah pusat juga ikut tertarik merawat kearifan Yadnya Kasada, bahkan menjadinya sebagai penggerak bagi kehadiran wisata. Artinya, sambil mendayung, dua pulau terlampaui, yakni dengan menjaga kearifan lokal sembari berpikir agar wisata terus menggeliat di gunung Bromo. Jadi, dengan alasan ini, bisa jadi lantas Kementerian Pariwisata Republik Indonesia dalam memasukkan Eksotika Bromo sebagai kegiatan menyambut Kasada sebagai Top 30 Events Calender of Event Wonderful Indonesia yang dilaksanakan pada tahun 2019.

Bukan hanya itu, proses institualisasi juga dilakukan pemerintahan desa terhadap masyarakat Tengger kaitan dengan pentingnya pendidikan. Hal ini penting dalam rangka agar posisi-posisi strategis dalam pemerintahan desa dapat ditempati oleh warga Tengger, dimana posisi strategis ini mengharuskan adanya ijazah sebagaimana diamanatkan pemerintah kaitan dengan pegawai di lingkungan pemerintahan, baik pusat, daerah, hingga desa.

Fakta ini tidak lepas dari kenyataan bahwa tidak semua masyarakat Tengger sadar betul terhadap pentingnya pendidikan formal. Pasalnya, mereka sangat menikmati betul dengan kondisi alam sekitar gunung Bromo, tenang dan harmoni. Bukan hanya itu saja, mereka juga merasa cukup, bersahabat dengan alam sambil menikmati kekayaan

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

alamnya yang diwariskan dari para leluhurnya. Bahkan tidak sedikit, alasan menjaga alam warisan leluhur agar biar fokus, dari pada harus sekolah formal dengan menyisaka waktu-waktu yang semestinya untuk digunkan sebagai sarana agar lebih dekat dengan alam gunung Bromo.

Institualisasi kaitan dengan pendidikan tidak memaksa, tapi dimulai dengan fakta-fakta sosial yang dialami sehingga masyarakat Tengger memandang bahwa pendidikan sangat penting dalam rangka mengawal keberlangsungan kehidupan, terlebih kaitan dengan hal-hal yang sangat atministrasi di desa. Tapi, memang peran desa sebagai sangat menentukan, di samping dukungan kepala adat sangat menentukan dalam membangun kesadaran masyarakat untuk melanjutkan pendidikan.

Dukungan mbah Dukun, pemangku adat dan agama, setidaknya nampak dari sikap mereka yang tidak resisten terhadap proses pendidikan yang dilakukan oleh sebagia masyarakat Tengger di sekekitar gunung Bromo, khususnya mereka yang berada di wilayah kecamatan Sukapura Probolinggo. Dan masih banyak lagi, proses keterlibatan pemerintah melakukan institusionalisasi kaitan dengan masyarakat Tengger, misalnya kaitan dengan kesehatan, penguatan kesadaran kaiatan dengan pertanian-hutan, dan lain-lain.

Sebagai sebuah komunitas yang memiliki kearifan dan ajaran yang diwariskan turun temurun, nilai-nilai yang mereka pegang berhasil membentuk tatanan yang kuat dan terinternalisasi dalam diri setiap anggota komunitas

repo uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

tersebut. Nilai ini menjadi keunggulan mereka dan selanjutnya memantik adanya nilai tambah bagi lingkungan sekitar. Pemerintah desa sebagai kepanjangan tangan pemerintah daerah dan pemerintah pusat memandang kekhasan komunitas ini sebagai keunggulan yang terus dirawat dan dilembagakan. Ada dua hal penting yang saling menguntungkan antara pemangku kebijakan (pemerintah) dengan pemangku adat (komunitas), yaitu komunitas merasa aman dan terayomi dengan kehadiran pemerintah yang memberi dukungan penuh bagi terselenggaranya ritual atau kepentingan menjalankan adat komunitas; dan kehadiran komunitas juga menjadi daya tarik orang luar yang selanjutnya dapat dikomodifikasi oleh pemerintah dan dijadikan sebagai modal peningkatan taraf hidup masyarakatnya, dalam bentuk pembangunan wisata budaya atau wisata tradisional lainnya.

Melihat dua kutub kesalingketergantungan di atas, apa yang terjadi dalam kehidupan suku Tengger juga berlaku pada komunitas Samin. Dua komunitas ini sama-sama memiliki kekuatan adat dan nilai yang mereka pegang teguh. Kekuatan itulah yang selanjutnya mengantarkan dua komunitas ini menjadi kelompok masyarakat yang memiliki ciri khusus, dan itu menjadi keuntungan tersendiri bagi pemerintahan desa setempat. Kehadiran pemerintah memberi jalan bagi Samin dalam mengoptimalkan potensi adat mereka melalui ajang festival Samin dan pembangunan desa wisata di kampung mereka.

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

Festival Samin merupakan rangkaian kegiatan yang digagas oleh warga dan komunitas serta mendapat dukungan penuh dari pemerintah. Pada tahun 2021 kegiatan ini telah digelar sebanyak lima kali dengan melibatkan berbagai pihak dan utamanya pemerintah desa setempat. Kegiatan ini merupakan media apresiasi bagi adat setempat yang juga dibarengi dengan berbagai kegiatan-kegiatan kebudayaan lain, yang dikreasikan oleh warga setempat. Bentuk dukungan pada kegiatan ini sebagaimana tampak dalam beberapa logo yang ditampilkan dalam poster kegiatan ini, antara lain terdapat logo pemerintah dan swasta.

Photo Festival Samin[19]

19 Photo dikutip dari https://jatim.genpi.co/seni-budaya/8925/festival-samin-ke-5-bentuk-keberagaman-kabupaten-bojonegoro. Diakses pada tanggal 28 November 2021

repo uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

Sumber: Danang Rudy Purnomo, *Festival Samin 2019; Buku Dokumentasi Festival Samin 2019* (Bojonegoro, 2019)

Rangkaian kegiatan yang diselenggarakan dalam festival ini umumnya berupa kegiatan budaya, dengan menampilkan berbagai atraksi budaya mulai dari tari, pagelaran wayang, hingga pagelaran teater kontemporer. Kegiatan ini juga diisi dengan diskusi mengenal lebih jauh tentang Samin, baik dalam bentuk diskusi budaya, maupun pembacaan Samin dari sudut pandang budaya dan sastra. Tentu kehadiran kegiatan festival yang demikian adalah suatu cara yang digagas bersama oleh elemen masyarakat sekaligus difasilitasi oleh pemerintah desa. Kehadiran pemerintah tak lain adalah memberi dukungan agar apa yang dimiliki oleh Samin dapat terus lestari.[20] Ajaran-ajaran

20 Wawancara dengan Bambang Sutrisno (Ketua Karang Taruna) pada tanggal 12 Oktober 2021.

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

yang selama ini diinternalisasi secara turun temurun juga ditularkan kepada yang lain, kepada para penikmat atau pengunjung yang hadir di acara tersebut.

Kajian ini melihat bahwa pemerintah secara nyata memberi penghargaan pada apa yang dimiliki oleh dua komunitas tersebut. Suku tengger memiliki Yadnya Kasada dan Samin memiliki Festival Samin. Keduanya merupakan ruang sosial yang bagi komunitas tersebut untuk menampilkan berbagai ritual mereka kepada publik. itu semua terselenggara tak lepas dari dukungan pemerintah. Entah pemerintah hadir lebih dulu memberi ruang bagi mereka atau komunitas terlebih dahulu menginisiasi ruang sosial tersebut. Yang jelas kehadiran ruang ekspresi adat ini telah menguntungkan dua belah pihak, yaitu pengampu adat dan pengampu kebijakan.

Proses pelembagaa nilai komunitas dalam sebuah gelaran rutin tahunan ini menjadi salah satu jalan keluar bagi pemerintahan desa yang menginginkan adanya perekat sosial di antara mereka. model perekat sosial ini selain bermanfaat bagi komunitas, juga memiliki nilai tambah bagi pemerintah desa sebab dengan itu mereka mampu menjaga kohesi sosial dengan baik. Jadi, pelembagaan nilai yang dilakukan oleh pemerintah desa dibutuhkan dalam rangka memperkuat hubungan antar entitas sosial di wilayah tersebut.

repo uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

BAB V

REFLEKSI & REKOMENDASI

A. Refleksi Kebijakan

Buku ini menyajikan model partisipasi berbasis komunitas dalam pembangunan desa. Kajian-kajian yang dihasilkan dalam buku ini mengarah pada bagaimana komunitas berkontribusi dalam pembangunan desa. Temuan yang paling kuat dalam kajian ini mengarah pada kekuatan tak benda, yang berupa ajaran atau nilai yang dikembangkan dan dipedomani oleh komunitas secara turun temurun, baik di komunitas Samin maupun pada masyarakat suku Tengger. Dari nilai itu terpantul berbagai perilaku yang selanjutnya menyemangati mereka dalam berkontribusi pada pembangunan desa secara keseluruhan. Hal terpenting dari pantulan nilai itu dapat dilihat pada bagaimana kedua komunitas ini

pos uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

melakukan penjagaan pada alam sekitar mereka. Alam, bagi masyarakat Tengger dan Samin, tidak hanya dianggap sebagai anugerah yang dapat dieksploitasi secara suka-suka, tetapi dalam hubungan antara alam dan manusia ada kesaling-tergantungan, yang keduanya harus saling bersinergi untuk kelangsungan kehidupan mereka.

Dari paparan yang telah disebutkan sebelumnya, maka sebagai bahan refleksi, penulis memastikan bahwa partisipasi tinggi komunitas Samin maupun Suku Tengger dalam pembangunan Desa sudah selayaknya menjadi prototipe bagi para pemangku kebijakan khususnya pemerintah dalam merumuskan kebijakan-kebijakan strategis. Nilai-nilai luhur yang turun temurun diajarkan pada kedua komunitas ini harus diakui merupakan modal berharga dalam menggerakkan partisipasi mereka; sebuah partisipasi yang lahir dari kesadaran sendiri, disamping ada dukungan secara kultural dari pemangku tokoh kultural yang sangat kharismatik pada masyakat Samin atau Tengger.

Peran strategis *cultural leader* bagi komunitas perlu ditempatkan sebagai modal sosial, yang dengan itu mereka dapat memobilisasi diri untuk pembangunan masyarakat. Pemerintah desa perlu menyambut hal itu dengan memberi ruang seluas-luasnya pada komunitas. Pemberian ruang ini penting, sebab tak jarang *structural leader* enggan memberikan ruang tersebut bagi komunitas dengan berbagai alasan. Dalam konteks ini, setiap kebijakan pemerintah harus dikomunikasikan dan didialogkan dengan tokoh

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

masyarakat agar kebijakan-kebijakan yang dihasilkan dapat diimplementasikan dengan baik dan terukur. Persoalan ini menjadi sangat urgen karena kebijakan pemerintah yang monolog atau non-akomodatif berpotensi mematikan potensi lokal yang sudah tertradisi secara turun temurun. Bukan hanya itu, kebijakan model ini memberikan dampak yang kurang baik bagi hubungan masyarakat dengan pemerintah. Salah satunya, bila kebijakan sudah tidak mengindahkan potensi lokal, maka bisa berpotensi pada munculnya penolakan masyarakat lokal, apalagi efek dari kebijakan pemerintah telah merusakan nilai-nilai adat di satu sisi atau merusak ketahanan sistem alam yang berpotensi pada kerusakan hutan di sisi yang berbeda.

Jangan sampai ada niatan dari pemerintah, ketika menggulirkan kebijakan, khususnya di daerah-daerah pedalaman dalam rangka memberikan penghargaan kepada masyarakat lokal, misalnya masyarakat Samin dan Tengger. Niatan ini tidak berbanding dengan kontribusi masyarakat lokal dalam menjaga ekosistem alam yang lama terbangun, tanpa berharap uluran tangan dari Pemerintah. Parahnya, jika dengan niat tersebut, pemerintah lantas membenarkan perusakan *local wisdom* dari masyarakat setempat dengan mengatasnamakan pembangunan.

Setidaknya terdapat tiga poin penting yang perlu diperhatikan dalam mengggerakkan partisipasi masayarakat dalam pembangunan desa berbasis komunitas dengan belajar pada komunitas Samin dan Suku Tengger:

repo uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

1. **Sinergitas antara *Structural Leader* dan *Cultural Leader***

Sinergitas kedua pemimpin merupakan kunci keberlangsungan pembangunan yang diinisiasi pemerintah. Jika sinergi ini berjalan dengan baik, pembangunan desa akan mudah dilaksanakan. Jika pemimpin struktural memiliki andil dalam mengawal pengelolahan administratif kaitan dengan kebutuhan masyarakat, maka berbeda dengan pemimpin kultural yang lebih banyak fokus pada kegiatan masyarakat kaitan dengan budaya atau ritual lokal yang dilaksanakan bersama masyarakat. Karenanya, keduanya memiliki kuasa tersendiri dalam menggerakkan masyarakat secara partisipatoris, baik dalam kegiatan berbasis lokal atau kegiatan-kegiatan yang diinisiasi oleh pemerintah.

Hubungan pastisipasi masyarakat dengan sinergitas kedua pemimpin itu sejatinya, dimulai dengan adanya hubungan yang saling memahami dan saling menghormati sesuai dengan peran masing-masing. Dalam konteks ini, pemerintahan yang membuat kebijakan harus menempatkan harmoni keduanya sebagai pintu masuk agar masyarakat lokal dapat berpartisipasi di semua lini. Bukan hanya dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi, tapi juga ada rasa kepemilikan terhadap setiap program.

Pendek kata, jika pelibatan komunitas dilakukan sejak dini, akan diperoleh partisipasi yang baik dari mereka. Penguatan partisipasi di tingkat komunitas dan pembukaan ruang partisipasi oleh pengambil kebijakan dibutuhkan agar hasil-hasil yang diperoleh selama masa pembangunan

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

dapat dimiliki bersama-sama, yang selanjutnya dapat dirawat bersama pula. Pembangunan-pembangunan yang minim partisipasi, hanya akan ditinggalkan atau diabaikan oleh masyarakat sebab mereka tidak merasa bahwa hasil-hasil pembangunan itu adalah milik mereka. Oleh karena itu, pelibatan komunitas, terutama dengan kekuatan *structural leader* mereka, akan berdampak positif bagi keberlangsungan pembangunan dan hasil-hasilnya di kemudian hari. Simpulan di atas tidaklah berlebihan, sebab komunitas ini secara otomatis akan menjaga hasil-hasil pembangunan tersebut. Sebaliknya, jika komunitas ditinggal karena dianggap sebagai obyek kebijakan atau dianggap tidak kompeten dalam pembangunan, maka dapat dipastikan mereka akan menarik diri dari proses pembangunan tersebut, dan bahkan cenderung tidak ingin bertanggungjawab atas proses pembangunan dimaksud.

Dalam konteks munculnya asumsi komunitas tidak paham atau tidak tahu menahu tentang pembangunan, semestinya *structural leader* dan *cultural leader* juga perlu menggunakan perangkat fasilitasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. tidak boleh ada asumsi bahwa masyarakat yang tidak tahu, sejatinya adalah betul-betul tidak tahu. Mereka menjadi diam dan tidak mau tahu dapat disebabkan karena mereka memilih untuk diam. Pada posisi ini, kemampuan memfasilitasi dibutuhkan oleh kedua pimpinan tersebut untuk menggugah partisipasi masyarakat. Untuk itu, *structural leader* dan *cultural leader* juga perlu

repo uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

dibekali tentang teknik fasilitasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pinggiran yang cenderung diam.

2. Mengedepankan Komunikasi Informal

Jalan agar pembangunan berbasis partisipasi berjalan dengan baik adalah tidak mengandalkan komunikasi formal. Artinya, tidak semua urusan pembangunan atau pemberdayaan berbasis masyarakat bisa diselesaikan dengan dengan komunikasi formal yang melibatkan semua unsur pemerintah secara lengkap, dan dalam forum yang resmi. Karenanya, komunikasi informal menjadi salah satu alternatif sebab tidak semua orang senang dengan forum-forum formal, apalagi masyarakat pedesaan dan pedalaman.

Komunikasi informal biasanya lama ada secara turun-turun, yang tidak ada kaitannya dengan kebijakan pemerintah. Biasanya, forum-forum kultural yang dilakukan setelah acara rutinan adat, dengan obrolan santai dengan bentuk pemberitahuan atau pengumuman. Forum-forum seperti ini cenderung santai sebab tidak membebani masyarakat dan kegiatan dilaksanakan dengan santai dalam kegembiraan setelah acara-acara adat atau ritual masyarakat.

Komunikasi informal juga bisa dilakukan dalam ruang-ruang terbuka, misalnya di ruang warung kopi, di sawah dan *public sphere* lainnya, yang intinya semua tempat itu representatif untuk membicarakan kegiatan desa kaitannya dengan partipasi masyarakat dalam program pemerintah. Komunikasi informal merupakan kunci keberhasilan dalam

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

menggerakkan kesadaran partisipatif masyarakat, sebab lebih terkesan santai, dan tidak terkekang oleh agenda-agenda yang berstruktur.

Komunikasi informal pada komunitas biasanya dimiliki dan digerakkan oleh *cultural leader* mereka. mengapa demikian? *Cultural leader* biasanya menjaga hubungan-hubungan kemasyarakatan mereka melalui kegiatan-kegiatan rutin atau ritual rutin. Pada kegiatan ini, *cultural leader* hadir secara *full power* bagi masyarakat mereka. keberadaannya akan sangat ditaati oleh warga ketimbang kehadiran structural leader. Dalam posisi yang demikian, *structural leader* harus dapat memasuki ruang itu dan hadir menjadi bagian dari keberadaan *cultural leader*. Jika keberadaan kedua pimpinan ini sudah dalam posisi tanpa batas, komunikasi akan cenderung lebih luwes dan mengalir. Pada situasi yang demikian, gagasan-gagasan masyarakat dan inisiatif untuk berpartisipasi dari masyarakat dapat dibangkitkan.

3. Pembangunan Desa Ramah Alam

Pembangunan desa–dan pembangunan apapun—yang diinisi oleh pemerintah sudah saatnya tidak hanya berpikir pada keuntungan ekonomi semata. Perhatian pemerintah terhadap alam sungguh lebih penting agar tidak menimbulkan mudharat yang lebih besar. Keindahan bangunan, tanpa didukung oleh keramahan pada lingkungan menjadi sebab keindahan itu hanya bersifat semu, untuk tidak mengatakan tidak bermanfaat. Bahkan harus diakui,

repo uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

keindahan bangunan fisik umumnya mengorbankan alam.

Dapat disaksikan, di berbagai tempat, dimana proses pembangunan yang tidak ramah terhadap alam dan lingkungan bukan saja merusak ekosistem, tapi juga mengancam kehidupan manusia. Semua bisa menyaksikan, berapa rumah dan bangunan hancur. Belum lagi berapa manusia yang menjadi korban akibat pembangunan yang tidak menjaga harmoni dengan alam dengan tidak merusak ekosistemnya. Pembangunan liar ataupun resmi yang tidak memperhatikan resapan adalah salah satu potret berpotensi munculnya banjir dan seterusnya. Bagi masyarakat dengan hutan yang melindungi perkampungan mereka, penebangan pohon secara liar juga mengancam ketentraman mereka, sebab banjir dapat datang kapan saja di musim penghujan.

Intinya, pembangunan apapun, apalagi pembangunan desa, harus selalu ramah terhadap alam. Pasalnya, ramah terhadap lingkungan sama artinya juga menjaga harmoni dengan tradisi leluhur masyarakat lokal, yang secara konkrit memiliki sikap yang sangat dekat dengan alam sebagaimana kepada dirinya sendiri. Bagi masyarakat lokal, menjaga alam adalah bagian dari menjaga dirinya sendiri. Sebaliknya, merusak alam adalah sama halnya dengan merusak diri mereka sendiri. Dalam proses pembangunan, pemerintah perlu memperhatikan hal itu dengan kacamata komunitas. Hal itu penting sebab kacamata pemerintah cenderung berbeda dengan kacamata komunitas dalam memandang alam. Kacamata pembangunan yang dimiliki

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

oleh pemerintah tidak selalu seirama dengan kacamata pelestarian alam yang dimiliki oleh komunitas. Oleh karena itu, keduanya perlu duduk bersama mendudukkan alam sebagai hal mutlak yang harus dijaga.

B. Rekomendasi

Sebagai upaya kepedulian terhadap pentingnya partisipasi berbasis komunitas dalam pembangunan desa, beberapa hal yang dapat dipakai oleh pengampu kebijakan adalah:

1. Dalam konteks "dari komunitas untuk desa" partisipasi komunitas diberikan manakalah pemerintah juga memberi ruang sosial yang sama bagi komunitas tersebut. Oleh karena itu, pemerintah perlu menggandeng *cultural leader* untuk melancarkan agenda-agenda pembangunan desa.
2. Dalam konteks "dari desa untuk komunitas" pemerintah desa perlu menyusun strategi kebijakan yang dapat mendorong kemajuan komunitas dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip dan nilai dasar komunitas itu sendiri.
3. Partisipasi berbasis komunitas mengharuskan adanya pembukaan ruang partisipasi oleh *structural leader*. Untuk itu *structural leader* juga perlu dibekali dengan teknik fasilitasi peningkatan partisipasi masyarakat untuk menggugah komunitas masyarakat yang cenderung memilih diam meski mereka tahu bahwa

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

yang sedang terjadi tidak sejalan dengan apa yang mereka yakini sebagai kebenaran.

4. Pola pendampingan komunitas perlu memilih pendekatan secara tepat dalam situasi berbeda, antara lain: persuasi, advokasi dan kolaborasi. Ketika partisipasi masih rendah, pendekatan persuasi dapat dilakukan untuk mendorong dan meningkatkan partisipasi komunitas. Sementara advokasi merupakan tindakan yang diperlukan ketika komunitas mengalami problem tertentu. Sedangkan pendekatan kolaborasi dengan berbagai stakeholders dilakukan jika partisipasi komunitas sudah tumbuh dengan baik.
5. Guna mewujudkan harmoni kehidupan pedesaan, ada tiga simpul utama yang perlu bergerak secara seimbang, yaitu: *local leader*, komunitas dan alam. Pemimpin lokal, baik struktural maupun kultural, harus mampu membangun partisipasi komunitas dalam menjaga kesimbangan alam dan nilai-nilai kearifan lokal.
6. Peningkatan partisipasi komunitas akan muncul manakala nilai-nilai yang diyakini sebagai kebenaran oleh komunitas itu diafirmasi oleh pengampu kebijakan lokal. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberi dukungan baik kebijakan maupun anggaran untuk perayaan adat atau kegiatan-kegiatan adat yang sifatnya permanen dan rutin.
7. Pembangunan harus senantiasa memperhatikan nilai-nilai lokal setempat. Pasalnya, pembangunan

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

hakekatnya berkaitan dengan proses menciptakan keadilan bagi rakyat secara menyeluruh agar memiliki kesamaan dengan daerah lain yang lebih maju. Tapi, tetap saja semua daerah memiliki *local wisdom* sebagai kekayaan bangsa dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika.

8. Pembangunan desa berbasis komunitas dengan beragam karkteristiknya, perlu sejalan dengan kerangka SDGs *(Sustainable Development Goals)* Desa, terutama pada indikator ke-18 tentang "Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif". Hal ini dilakukan untuk mempertahankan kearifan lokal, serta melakukan revitalisasi dan menggerakan seluruh elemen lembaga-lembaga masyarakat di tingkat desa.
9. Kebijakan pembanguan dalam suatu daerah seyogyanya didahului dengan kajian akademik dengan melibatkan pihak eksternal, yakni perguruan tinggi. Pelibatan perguruan tinggi ini penting bagi pemerintah, setidaknya dalam rangka untuk melakukan penelitian awal kaitan dengan daerah yang akan menjadi tujuan kebijakan pembangunan. Pemetaan awal dari pihak eksternal ini, menjadi dasar pijak dalam menentukan skala prioritas pembangunan, sekaligus mengenal lebih dekat polarisasi masyarakatnya, sekaligus peta daerahnya dengan segala keunikan yang dimiliki.

repo uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Alamsyah, "Eksistensi Dan Nilai-Nilai Kearifan Komunitas Samin Di Kudus Dan Pati," *HUMANIKA* 21. 1. 2015.

Ayu Sutarto, *Sekilas tentang Masyarakat Tengger*, Makalah disampaikan pada Jelajah Budaya 2006 yang diselenggarakan oleh Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta, tanggal 7-10 Agustus 2006.

Badrus. "Partisipasi dan perayaan Idul Fitri suku Tengger Wonokerto Sukapura Probolinggo Jawa Timur (1994-2015)". *Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya. 2017.

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

Bayor, Isaac. "Community Participation In Poverty Reduction Interventions: Examining The Factors That Impact On The Community-Based Organisation (CBO) Empowerment Project In Ghana".

Binada, Ulfa. "Konstruksi Identitas Komunal Masyarakat Adat Suku Tengger Dari Zaman Kerajaan Hingga Pascareformasi." *Jurnal. Ilmu Pemerintahan.* Malang: FISIP Universitas Brawijaya. 2019.

Budiyanti, Syamsu. "Analisis Deskriptif Aktivitas Dan Potensi Komunitas Desa Enclave Ranu Pane Pada Zona Pemanfaatan Tradisional, Kecamatan Senduro, Kab. Lumajang, Wilayah Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (Tnbts)", Jp Sosiologi dd 2015.

Candrawati, Siti Dalilah. "Pemberdayaan Keluarga Berbasis Masjid Pada Masyarakat Samin Dusun Jepang Margomulyo Bojonegoro". *Jurnal Al-Qalam*. Vol. 24. No. 1. Juni. 2018.

Catatan "Sejarah Perjuangan Masyarakat Samin". Januari. 1996.

Christanto, Yan Adi. "Konstruksi Masyarakat Samin Tentang Nilai-Nilai Pancasila Di Dusun Jepang Kecamatan Margomulyo Bojonegoro". *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*. Vol. 01. NO. 03. 2015.

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

Creswell JW, Plano Clark VL. Designing and conducting mixed methods research. 2nd ed. ThousandOaks. CA: Sage: 2011.

Data Monografi Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Bojonegoro tahun 2020.

De La O Campos et al, Ana Paula. *Ending Extreme Poverty In Rural Areas: Sustaining Livelihoods To Leave No One Behind*. Rome: Food And Agriculture Organization Of The United Nations. 2018.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Profile Jawa Timur*. Pemerintah Jawa Timur. 2010.

DeVellis RF. *Scale development: Theory and application*. Newbury Park, CA: Sage; 1991.

Falairiva, Taafaki. "The University and Its Role in Rural Development in The Developing Countries". *Doctoral Dissertations* University of Massachusetts Amherst. February. 2014.

Farida Murti et al, "Kajian Arsitektur Rumah Tinggal Suku Samin "Dulu dan Kini" Di Dusun Jepang, Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro". *Seminar Nasional Call For Paper & Pengabdian Masyarakat*. Vol. 1. No. 01. 2018.

Fauzia, Amelilia. "Arti Memelihara Tradisi Pada Suku Samin". *Jurnal Empati*. Vol. 8. No. 1. Januari. 2019.

repo uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

Febi Rizka Eliza dkk, "Peran Pemerintah terhadap Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Suku Anak Dalam (SAD) di Provinsi Jambi Tahun 2018," Jurnal Kesmas Jambi (JKMJ) 2. 1. 2018.

Fernanda Ebrilianti, Dheasrika. "Peran Ketua Adat Sedulur Sikep Dalam Meningkatkan Pembangunan Masyarakat di Desa Sambongrejo (Studi Kasus Masyarakat Samin Desa Sambongrejo, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora)," *Skripsi*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret. 2020.

Firni, Farisha. "Bentuk, Makna, Dan Fungsi Kidung-Kidung Suci Masyarakat Tengger di Kabupaten Probolinggo". *Skripsi*. Surabaya: Universsitas Airlangga. 2014.

Ganefo, Riska Dwi Setiaini dan Akhmad. "Dukun Pandhita dan Pelestarian Budaya Lokal (Studi Tentang Suku Tengger Di Desa Wonokitri)". *Jurnal Entitas Sosiologi*. Volume VIII. Nomor 02. Agustus 2019.

Harianto, Dani. "Pengembangan Laboratorium Budaya Suku Tengger Untuk Mewujudkan Sistem Pemerintahan Desa Yang Baik (Good Village Governance)". *Maksigama Jurnal Hukum*. Vol. 19. No. 1. Mei. 2016.

Hartmut, et al. Brandt. *Poverty Oriented Agricultural and Rural Development*. London: Routledge. 2007.

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

Hasyim, Muh Fathoni. "Literasi Politik Komunitas Samin Di Bojonegoro Dalam Pemilu Perspektif Fiqh Siyasah". *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. 14. No. 2. Desember. 2020.

Hefner, Robert W. *Geger Tengger.* Yogyakarta: LP3ES. 1990.

Herdiana, Dian. "Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perihal Pembangunan Desa". *Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 50 No. 1*. (2020).

Hidayat, Syifa Sakinah. "Kedudukan, Peran, Dan Fungsi Dukun Pandita di Suku Tengger". *Umbara Indonesian Journal of Anthropology.* Vol. 4. No. 1. Juli. 2019.

Homer CJ, Klatka K, Romm D, et al. A review of the evidence for the medical home for children with special health care needs. Pediatrics 2008.

Huda, Khoirul. "Menjadi Jatmika; Nilai Kejatmikaan Pada Perempuan Samin Di Kabupaten Bojonegoro". *Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama*. Vol. 11. No. 2. Juli-Desember. 2001.

Huda, Mahmud. "Pasuwitan Suku Samin Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: Studi Kasus di Dusun Jepang Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro". *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 4. No. 1. April. 2019.

repo uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

Kurniadi, Yodi. *Adat Istiadat masyarakat Jawa Timur.* Bandung: Sarana Panca Karya Nusa. 2009.

Larsen, Anne Karin et al. (eds). *Participation in Community Work International Perspectives*, (New York: Routledge, 2014).

Listiyana, Anik. "Emberdayaan Masyarakat Suku Tengger Ngadas Poncokusumo Kabupaten Malang Dalam Mengembangkan Potensi Tumbuhan Obat dan Hasil Pertanian Berbasis "Etnofarmasi" Menuju Terciptanya Desa Mandiri". *Journal Of Islamic Medicine*. Vol. 1. No. 1. 2017.

Lopez, Et Al. Ramon. *Preface at Rural Poverty in Latin America.* London: Macmillan. 2000.

Luthfi, "Strategi Dakwah Masyarakat Samin". *Islamic Communication Journal*. Vol. 4, No. 1. Januari-Juni. 2019.

Maia Chankseliani et al, "Higher Education Contributing To Local, National, And Global Development: New Empirical And Conceptual Insights". *Higher Education.* 2021. 110.

Mas Danang. "Upacara Pernikahan Adat Samin Bojonegoro", *Channel Youtube*.

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, *Piagam Penetapan Karya Budaya Ajaran Samin Surosentiko Bojonegoro dari Provinsi Jawa Timur sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia*. Jakarta, tanggal 8 Oktober 2019.

Mertens DM. Transformative research and evaluation. New York: Guilford: 2009.

Moh Rasyid, "Memotret Agama Adam: Studi Kasus Pada Komunitas Samin". *Orientasi Baru*. Vol. 23. No. 2. Oktober. 2014.

Moh Rosyid, "Agama Adam dan Peribadatan dalam Ajaran Samin," *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia* 1. 2. 2020.

Moh. Ali Hisyam, "Harmoni Lintas Agama Masyarakat Tengger". *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*. Vol. 10. No. 1. September. 2015.

Negara, Purnawan Dwikora. "Budaya Malu Pada Masyarakat Tengger Dan Pengaruhnya Terhadap Budaya Hukum Penghindaran Konflik". *Widya Yuridika Jurnal Hukum*. Vol. 1. No. 2. Desember. 2018.

Nur Aini, Siti. "Kontribusi Harjo Kardi dalam Membangun Masyarakat Samin di Dusun Jepang Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur 1970-2015." *Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel. 2018.

repo uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

Nur Fitria Sari, Resa Eka. "Sistem Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Adat Samin Dalam Prespektif Hukum Adat Dan Hukum Islam. Studi di Desa Margomulyo Kec. Margomulyo Kab. Bojonegoro". *Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. Vol. 26. No. 3. Februari. 2020.

Nur Hadi. "Local Wisdom of Samin Community In Tradition And Modernization Frame". Di *Proceedings of The 2nd International Conference On Sociology Education*. Icse. Vol. 2. 2017.

Nurcahyono, Okta Hadi. "Harmonization Of Tengger Culture Society (Social Capital Existance Analysis In Harmonization Processes on Culture Society Of Tengger Etnic Tosari Village, Pasuruan, East Java". *Dialektika Masyarakat: Jurnal Sosiologi Harmonisasi Masyarakat Adat Suku Tengger*. Vol. 2. No.1. Mei 2018.

Nurdyansya, Angga Ridhotul. "Undhak-Usuk Percakapan Kelompok Sosial Dalam Masyarakat Samin, Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro: Kajian Sosiolinguistik". *Skriptorium*. Vol. 2. No.1. 28.

Nutting PA, Miller WL, Crabtree BF, et al. Initial lessons from the first national demonstration project on practice transformation to a patient-centered medical home. Ann Fam Med. 2009.

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

Palinkas LA, Aarons GA, Horwitz S, et al. *Mixed Methods Designs in Implementation Research*. Adm Policy Ment Health. 2011.

Peikes D, Zutshi A, Genevro J, et al. Early Evidence on the Patient-Centered Medical Home, FinalReport (Prepared by Mathematica Policy Research, under Contract Nos. HHSA290200900019I/HHSA29032002T and HHSA290200900019I/HHSA29032005T). Rockville, MD: Agency for Healthcare Research and Quality. AHRQ Publication No. 12-0020-EF.

Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2020. Berita Resmi Statistik No. 56/07/Th. Xxiii, 15 Juli 2020. https://www.bps.go.id. Diakses pada 4 November 2021. pukul 09.00.

Putri, Alifia. "Identifikasi Dan Eksplorasi Etnomedisina Pada Suku Samin Di Kabupaten Bojonegoro. Jawa Timur". *Jpms*. Vol. 1. No. 2. 2016.

Rahmena, "Participation", di Wolfgang Sachs (ed), *The Development Dictionary: A Guide to Knowledge as Power*. London: Zed Books. 2010.

Rudy Purnomo, Danang. Buku Dokumentasi Festival Samin 2019.

Santoso, Listiyono. *Manusia dan Masyarakat Adat Tengger.* Surabaya, Laporan Penelitian: Universitas Airlangga. 2004.

repo uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

Siti Munawaroh dkk. Etnografi Masyarakat Samin di Bojonegoro: Potret Masyarakat Samin dalam Memaknai Hidup. Yogyakarta: Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB). 2015.

Sopanah, Ana. "Dibalik Ceremonial Budgeting: "Rembug Desa Tengger" Partisipasi Nyata Dalam Pembangunan", Disertasi "Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Penganggaran Daerah Berbasis Kearifan Lokal" Pada *Program Doktor Ilmu Akuntansi (Pdia). Universitas Brawijaya Malang*. 2012.

Subagiarta, I Wayan. "Vircous Cirle Economic Adat Suku Tengger Di Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur". *Jurnal Isei Jembe*r. Vol. 5. No. 3. April. 2015.

Subekti, Slamet. *Pelaksanaan Ritual Kasada Pada Komunitas Tengger, Jawa Timur*. 2014. Academia.edu.

Supanto, Fajar. "Agro Ekowisata Sebagai Penyangga Ekonomi Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru: Studi Pada Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang". *Prosiding Seminar Nasional.* Gedung Pascasarjana Feb Unej. 17 Desember 2016.

Suyono, Capt. R. P. *Mistisme Tengger*. Yogyakarta: LKiS. 2009.

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

Syahza, Almasdi. "Dampak Nyata Pengabdian Perguruan Tinggi Dalam Membangun Negeri". *Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pekanbaru*. Vol. 1. 2019.

Tri Haryanto, Joko. "Kearifan Lokal Pendukung Kerukunan Beragama pada Komuntias Tengger Malang Jatim". *Jurnal Analisa*. Volume 21 Nomor 02 Desember. Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang. 2014.

Tri Haryanto, Joko. "Local Wisdom Supporting Religious Harmony In Tengger Community, Malang, East Java, Indonesia". *Jurnal Analisa*. Vol. 21. No. 02. Desember. 2014.

W Creswell, Jennifer Wisdom and John. "Mixed Methods: Integrating Quantitative and Qualitative Data Collection and Analysis While Studying Patient-Centered Medical Home Models." *AHRQ Publication*. No: 13-0028-EF. 2013.

Internet

https://kemendesa.go.id. Diakses pada 4 November 2021. Pukul 15.00.

https://sdgsdesa.kemendesa.go.id/dari-tpb-ke-sdgs-desa/. Diakses pada 23 Nopember 2021. Pukul 21.36.

repo uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

https://setkab.go.id/membangun-indonesia-dari-pinggiran-desa/. Diakses pada 4 November 2021. Pukul 15.00.

https://www.beritasatu.com/nasional/520481/jokowi-tegaskan-pemerintah-beri-perhatian-besar untuk-desa. Diakses pada 4 November 2021. Pukul 15.00.

https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1744/persentase-penduduk-miskin-maret-2020-naik-menjadi-9-78-persen.html. Diakses pada 5 November 2021. pukul 08.00.

https://www.masterplandesa.com/penataan-desa/pentingnya-pembangunan-desa. Diakses pada 9 November 2021. Pukul 08.00.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/news/communications-material. Diakses pada 9 November 2021. Pukul 08.00.

https://www.liputan6.com/lifestyle/read/4590866/mengenal-yadnya-kasada-yang-dirayakan-suku-tengger-di-gunung-bromo-dari-24-26-juni-2021

https://jatim.genpi.co/seni-budaya/8925/festival-samin-ke-5-bentuk-keberagaman-kabupaten-bojonegoro diakses pada tanggal 28 November 2021

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

Wawancara

Achmad Maqin, Warga Samin pada tanggal 12 Oktober 2021.

Bambang Sutrisno, Warga Samin pada tanggal 12 Oktober 2021.

Hardjo Kardi, Warga Samin pada tanggal 12 Oktober 2021.

Harjo Kardi, Warga Samin pada tanggal 12 Oktober 2021.

Miran QR, Warga Samin pada tanggal 13 Oktober 2021.

Misnoyo, warga Tengger pada tanggal 13 Oktober 2021.

Nuryanto, warga Samin pada tanggal 13 Oktober 2021.

Alim, warga Tengger pada tanggal 12 Oktober 2021.

Rujianto, warga Tengger pada tanggal 12 Oktober 2021.

Slamet Susandi, warga Tengger pada tanggal 13 Oktober 2021.

repo uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN AMPEL SURABAYA
NOMOR 851 TAHUN 2021
TENTANG
TIM ANALISIS DATA DAN INFORMASI SERTA KAJIAN MODEL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI BERBASIS KOMUNITAS

REKTOR UIN SUNAN AMPEL SURABAYA,

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka menuju perguruan tinggi yang berbasis pada penguatan masyarakat (*University Community Engangement*) dibutuhkan strategi nyata dengan program-program yang terarah sistematis dan berbasis pada pengembangan komunitas, maka UIN Sunan Ampel melakukan kerjasama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Bidang Penelitian , Analisis Data dan Informasi Kajian Perdesaan;
b. bahwa untuk menghasilkan analisis data dan informasi serta kajian model pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi berbasis komunitas, perlu dibentuk tim yang menangani kegiatan dimaksud;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya tentang Tim Analisis Data dan Informasi Serta Kajian Model Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Berbasis Komunitas;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sunan Amel Surabaya;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;

Memperhatikan :
1. Nota Kesepahaman antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Nomor: 09/HK.07.- 01/IV/2021 dan Nomor: Pt.976/Un.07/01/R/HM.01/04/2021 tentang Pendidikan, Penelitian, Pelatihan dan Pengabdian pada Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
2. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Badan Pengembangan Dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi dengan Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Nomor: 38/BPI/HK.07.01/IX/2021 dan Nomor: B-549/Un.-07/01/LP/HM.01/09/2021 tentang Analisis Data dan Informasi Serta Kajian Model Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Berbasis Komunitas.

repo uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN AMPEL SURABAYA TENTANG TIM ANALISIS DATA DAN INFORMASI SERTA KAJIAN MODEL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI BERBASIS KOMUNITAS.

KESATU : Menetapkan Tim Analisis Data dan Informasi serta Kajian Model Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Berbasis Komunitas sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas tim sebagaimana diktum Kesatu adalah sebagai berikut:
1. Melakukan analisis data dan informasi serta kajian model pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi berbasis komunitas;
2. Melakukan Penulisan Buku "Model Partisipasi Komunitas Dalam Pembangunan Desa; Studi Peran Komunitas Samin dan Tengger di Jawa Timur";
3. Membuat laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan sesuai aturan yang berlaku.

KETIGA : Kegiatan analisis data dan informasi serta kajian Model Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Berbasis Komunitas dan Penulisan Buku "Model Partisipasi Komunitas Dalam Pembangunan Desa; Studi Peran Komunitas Samin dan Tengger di Jawa Timur" dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2021 – 30 November 2021.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 29 September 2021
REKTOR /
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

MASDAR HILMY

Tembusan:
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
2. Wakil Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya;
3. Kepala Biro AUPK UIN Sunan Ampel Surabaya;
4. Ybs.

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UIN SUNAN AMPEL SURABAYA
NOMOR 851 TAHUN 2021
TENTANG TIM ANALISIS DATA DAN INFORMASI SERTA KAJIAN MODEL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI BERBASIS KOMUNITAS

TIM ANALISIS DATA DAN INFORMASI SERTA KAJIAN MODEL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI BERBASIS KOMUNITAS

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	Prof. Masdar Hilmy,S.Ag., MA, Ph.D	Pengarah
2	Dr. Muhid, M.Ag	Penanggung Jawab
3	Dr. Phil. Khoirun Ni'am	Koordinator Tim Ahli
4	Drs. H. Abd. Basyid, MM	Anggota Tim Ahli
5	Dr. Rubaidi, M. Ag	Anggota Tim Ahli
6	Dr. H. Abd. Halim, M.Ag	Anggota Tim Ahli
7	Dr. Ali Arifin MM	Anggota Tim Ahli
8	Dr. Ali Mustofa, M.Pd	Anggota Tim Ahli
9	Dr. H. Moh. Syaeful Bahar,M.Si	Koordinator Penyusun
10	Dr. Wasid, M.Fil.I	Penyusun kajian komunitas Tengger
11	Bahauddin Amyasi, M.Pd	Penyusun kajian komunitas Tengger
12	Hasan Mahfudz, M, Hum	Penyusun kajian komunitas Tengger
13	Dr. Hj. Aniek Nurhayati, M.Si.	Koordinator kajian Komunitas Samin
14	Muhammad Nuril Huda, M.Pd	Penyusun kajian komunitas Samin
15	Dr. Sulanam,M.Pd	Penyusun kajian komunitas Samin
16	Ratna Indriati, SE,MM	Administrasi Keuangan
17	Muhlisin, M.Pd.I	Administrasi data
18	Emy Tyartiani, SE,MM	Administrasi data

REKTOR /
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

MASDAR HILMY

repo uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

BIODATA PENYUSUN

Moh. Syaeful Bahar, Lahir di Bondowoso 15 Maret 1978. Ia tercatat sebagai alumni Pondok Pesantren Nurul Jadid. Lantas melanjutkan pendidikan formal S-1 Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, S-2 dan S-3 UNAIR. Sekarang aktif sebagai Dosen di UINSA Prodi Ilmu Politik, sekaligus sebagai Wakil Koordinator Kopertais IV. Selain itu, Bahar juga aktif di PCNU Bondowoso sebagai Wakil Ketua PCNU Bondowoso.

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

Aniek Nurhayati, Lahir di Kediri 7 September 1969 Ia tercatat sebagai alumni Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada S-1, Magister Ilmu-Ilmu Sosial universitas Airlangga Lulus Tahun 2002, dan S-3 Minat Studi Sosiologi Pedesaan di Program Doktor Ilmu Pertanian, Universitas Brawijaya, Lulus 2012. Sekarang aktif sebagai Dosen di Program Studi Ilmu Politik FISIP, sekaligus Sekretaris Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam, Pascasarjana UIN Sunan Ampel, Surabaya.

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

Sulanam, Lahir di Gresik 43 tahun yang lalu. Menyelesaikan program doktor pada Program Kajian Islam Kontemporer di UIN Sunan Ampel Surabaya (2017-2021). Di samping sebagai pengajar tetap di Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, UIN Sunan Ampel Surabaya, ia juga tercatat sebagai ketua umum Persatuan Santri Alumni Sunan Drajat (Pessandra) - Lamongan (2018-2021 dan 2021-2024). Selain itu, ia juga tercatat sebagai section editor, Journal of Indonesian Islam.

pos uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

Muhammad Nuril Huda, Lahir di Bojonegoro, 27 Juni 1980. Saat ini sebagai dosen di Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, UIN Sunan Ampel Surabaya. Pendidikan S1 diselesaikan di Jurusan Kependidikan Islam IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2002, lalu melanjutkan magister Manajemen Pendidikan di UNESA lulus tahun 2005, dan saat ini sedang menyelesaikan Program Doktoral di kampus yang sama. Selain mengajar, ia aktif sebagai Tim Ahli Society Education Centre Bojonegoro.

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

Wasid, Lahir di Bangkalan 18 Februari 1974. Ia tercatat sebagai alumni Lembaga Pesantren al-Khoziny Buduran Sidoarjo. Lantas melanjutkan pendidikan formal S-1 Bahasa dan Sastra Arab IAIN Sunan Ampel Surabaya, S-2 Pemikiran Islam IAIN Sunan Ampel, dan S-2 Islamic Studies UINSA. Sekarang aktif sebagai Dosen di Prodi Sejarah Peradaban Islam UINSA, sekaligus aktif di PW GP Ansor Jawa Timur.

pos uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

Hasan Mahfudh, Lahir di Gresik 20 September 1989. Ia merupakan Santri Pondok Pesantren Qomaruddin Bungah Gresik dan tamatan pendidikan formal S-1 dan S-2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jurusan Agama dan Filsafat. Saat ini tercatat sebagai Dosen di UIN Sunan Ampel Surabaya Jurusan Al-Qur'an dan Hadis, sekaligus aktif di Moderate Moslem Institute (MMI) UINSA, arrahim.id dan editor Jurnal Mutawatir. Selain itu, ia merupakan trainer Pesantren For peace dan Pengurus PETANESIA Gresik.

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id